



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Visualisasi Realitas Pemilu 1971-2004 dalam Kartun Editorial**

*Oom Pasikom Harian Kompas*

**SKRIPSI**

**RIFNI ARIFA**

**0806462363**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH**

**DEPOK**

**JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Visualisasi Realitas Pemilu 1971-2004 dalam Kartun Editorial**

*Oom Pasikom* Harian *Kompas*

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Humaniora**

**RIFNI ARIFA**

**0806462363**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH**

**DEPOK**

**JULI 2012**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 10 Juli 2012



Rifni Arifa

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rifni Arifa

NPM : 0806462363

Tanda Tangan : 

Tanggal : 10 Juli 2012



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Rifni Arifa

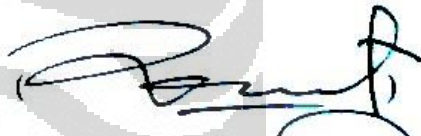

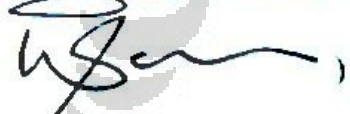

NPM : 0806462363

Program Studi : Ilmu Sejarah

Judul : Visualisasi Realitas Pemilu 1971-2004 dalam Kartun Editorial  
*Oom Pasikom Harian Kompas*

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang Penguji	Abdurakhman, M.Hum	(  )
Pembimbing Penguji	Dr. Mohammad Iskandar	(  )
Pembaca / Penguji	Siswantari, M.Hum	(  )
Panitera	Tini Ismiyani, M.Hum	(  )

Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok

Tanggal : 10 Juli 2012

oleh  
Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia



Dr. Harbong Wibawarta  
NIP: 1965.19003.1002

## KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur kepada Allah SWT, karena atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa diberikan kepada manusia paling mulia di muka bumi ini, Nabi Muhammad saw, seorang revolusioner terbesar dalam sejarah dunia yang membawa umat islam dari zaman kegelapan menuju cahaya kemenangan.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Jurusan Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Mohammad Iskandar , selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Suatu kehormatan bisa menjadi salah satu mahasiswi bimbingannya. Terima kasih banyak, Mas Is.
2. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral. Terima kasih yang tak terhingga untuk Ibuku Nur Hidayati dan Bapakku Bakri Sungkar serta kakak-kakakku Aming dan Lila.
3. Terima Kasih banyak untuk dr.Rofiq karena berkat pertolongannya, saya bisa kembali sehat dan dapat mengejar *deadline* sidang skripsi serta melaluinya dengan lancar. *Alhamdulillah*. Terima kasih juga untuk sahabatku Bella, yang sudah memberikan penjelasan, saran, ilmu kedokterannya, dan berbagi pengalaman menarik selama *coass*-nya yang amat sangat menghibur sehingga bisa membantu mempercepat pemulihanku setelah operasi.
4. Terima kasih untuk semua teman-teman di Jurusan Sejarah angkatan 2008, khususnya kepada Riska, Indah, Novi, Ken, Kikin, Lena, Yunita, Natasia, Iit, Aniek, Rara, Diana, Dimas, Ryan, Griffith, Benaya, Adit, dan masih banyak lagi yang tak mungkin disebutkan satu persatu. Terima kasih sudah memberi warna dalam hari-hari selama kuliah di Jurusan Sejarah.

4. Terima Kasih untuk Komunitas Tutor Indonesia yang telah menjadi keluarga baru dan banyak memberikan ilmu yang sangat berharga. Untuk para petarung Novi dan Ken, Semangatt Bu Guru! *We can do it!*
5. Terima Kasih banyak untuk keluarga besar BEM UI 2010 yang telah memberikan warna dalam kehidupan kampus. Kak Hesty, Kak Toil, Babeh Iqbal, Kak Gils, seluruh staff KKI BEM UI 2010. *Especially* “Genk Gentong”, Gema, Fiza, Kikin, dan Desta. Kalian semua sangat berarti. *No words can Describe.*
6. Terima kasih untuk sahabat terbaikkku sejak SMP, Andi, Mida, dan Bella. Semoga suatu hari nanti proyek kita bisa terealisasi dengan SUKSES!! Amin.
7. Terima Kasih untuk “Sahabat Kedondong” yang selalu memberikan keceriaan dan kegilaan disetiap hari-hari, *anytime, anywhere.* Coco&Dayu, yang selalu menemani ke perpustakaan, Any, Imel, Aris, Perdi, Dado, Umam, Bendel. Dewasa all!
8. Terima Kasih juga untuk Keluarga Besar BEM FIB UI 2011. Khususnya Divisi IT-Media. Nurul, Nisa, Ninis, Kiki, Cita, Arif, Mela, Indra. Kalian adalah staff terhebat yang pernah saya kenal.
9. Terima kasih untuk seluruh Dosen Ilmu Sejarah UI. Mas maman, Mbak ii, Mas Is, Mas Agus, Mbak Meli, Prof.Santo, Mas Didik, Mas Bondan, Mbak Linda, Bu nana, Bu Manus, dan semuanya yang tak mungkin disebutkan satu persatu.
10. Terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu memudahkan pengerjaan skripsi ini. Maaf jika ada yang belum disebutkan.

Akhir kata, saya berharap Allah swt berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Sejarah.

Depok, 10 Juli 2012



Rifni Arifa

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifni Arifa  
NPM : 0806462363  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Departemen : Sejarah  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Visualisasi Realitas Pemilu 1971-2004 dalam Kartun Editorial *Oom Pasikom*  
*Harian Kompas***

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juli 2012

Yang menyatakan



**Rifni Arifa**

## ABSTRAK

Nama : Rifni Arifa

Program Studi : Ilmu Sejarah

Judul : Visualisasi Realitas Pemilu Indonesia tahun 1971-2004 dalam Kartun Editorial *Oom Pasikom* Harian *Kompas*

Skripsi ini membahas tentang Visualisasi Realitas Pemilu Indonesia tahun 1971-2004 dalam Kartun Editorial *Oom Pasikom* Harian *Kompas*. Dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, kartun editorial memiliki peran yang cukup penting sebagai media kontrol sosial-politik. Selama penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, kartun editorial berfungsi untuk mengawal jalannya demokrasi. Kartun editorial pun menjadi semacam pemberi peringatan awal ketika ketidakberesan sedang terjadi. Berbagai bentuk pelanggaran pemilu direfleksikan kedalam gambar satire yang sarat humor. Kartun editorial biasanya menggunakan metafora untuk menyampaikan pesannya. Sebagai editorial visual, kartun tersebut tentunya mencerminkan kebijakan dan garis politik media yang memuatnya. Dalam penelitian ini dapat dilihat bagaimana dinamika perkembangan kartun editorial *Oom Pasikom* sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi. Dapat terlihat dengan jelas bahwa pengungkapan visual kartun editorial sangat terkait erat dengan kebijakan politik rezim yang berkuasa. Sebagai penelitian sejarah, telaah ini berfokus pada verifikasi gambar terhadap teks dan konteks realitas peristiwa. Kemudian direkonstruksi secara kronologis kedalam sebuah cerita sejarah.

### **Kata kunci:**

Kartun Editorial, Pemilihan Umum, Visualisasi

## ABSTRACT

Name : Rifni Arifa  
Study Program : History  
Title : Reality Visualization of Indonesia Elections 1971-2004 on  
*Oom Pasikom* Editorial Cartoons in *Kompas* Newspaper.

This thesis discusses the Reality Visualization of Indonesia Elections 1971-2004 on Editorial Cartoons *Oom Pasikom* in *Kompas* Newspaper. In the course of democracy in Indonesia, editorial cartoons have an important role as a medium of social and political control. During the General Election in Indonesia, editorial cartoons serve to guard the way of democracy. Editorial cartoons had become a sort of early warning when the irregularities taking place. Various forms of violations of the election were reflected into an image satire with full of humor. Editorial cartoons often use metaphors to convey his message. Being a visual editorial, cartoon certainly reflects the policy and political opinion of the media. In this description can be seen how the dynamics of the editorial cartoon *Oom Pasikom* since the New Order period to the Reformation era. Obviously, that the visual display of the editorial cartoons is closely related to the political policy of the regime. As historical research, this study focuses on the image verification to the text and to the context of the reality of events. Later, this has been chronologically reconstructed into historical story.

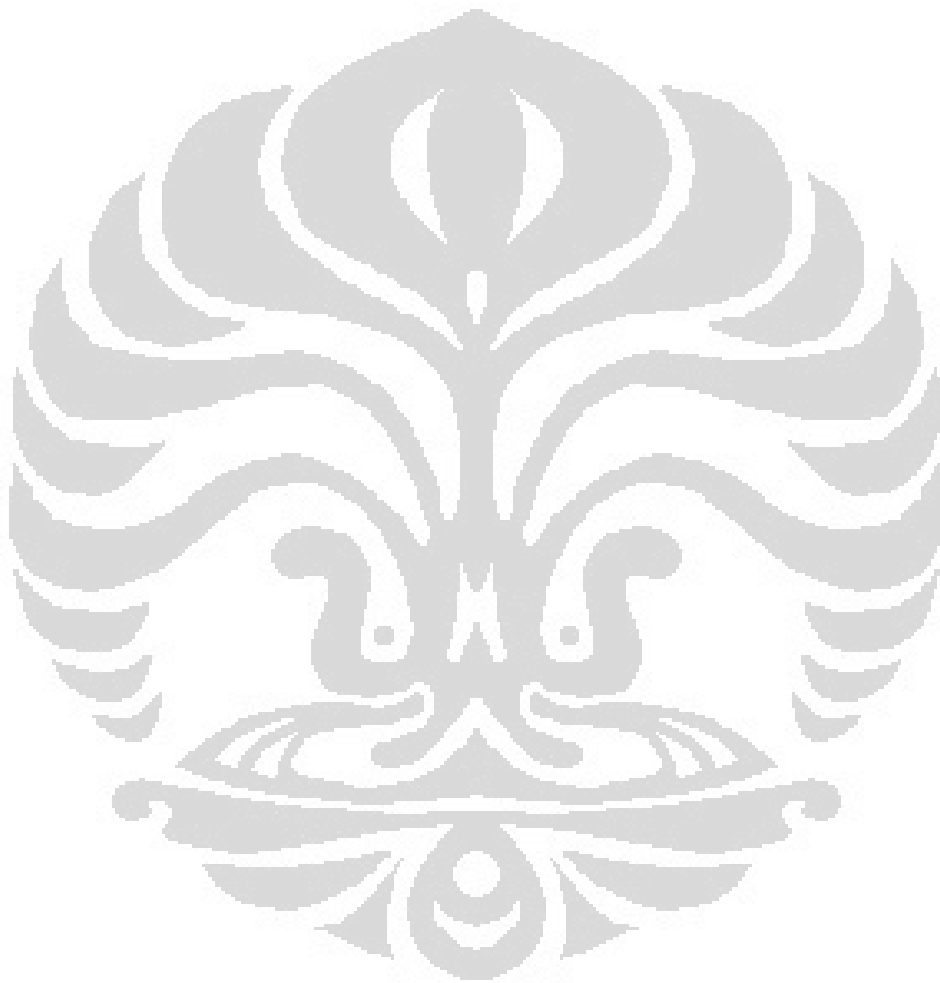
### **Keywords:**

Editorial cartoon, Elections, Visualization

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Tinjauan Pustaka.....	12
1.7 Sumber Penelitian.....	13
1.8 Sistematika Penulisan .....	14
<b>II. Kartun dan Karikatur di Indonesia</b>	
2.1 Wacana Kartun dan Karikatur.....	16
2.2 Perkembangan Kartun Editorial di Indonesia.....	20
2.3 Tinjauan Umum Surat Kabar <i>Kompas</i> .....	26
2.4 Kartunis GM. Sudarta.....	31
2.5 Lahirnya Oom Pasikom.....	34
<b>III. Visualisasi Realitas Pemilihan Umum Masa Orde Baru (Pemilu 1971-1977) dan Masa Reformasi (Pemilu 1999) dalam Kartun Editorial <i>Oom Pasikom</i></b>	
3.1 Pemilihan Umum di Indonesia.....	37
3.2 Pemilu Masa Orde Baru.....	40
3.2.1 Pemilu 1971.....	40
3.2.2 Pemilu 1977.....	44
3.2.3 Pemilu 1982.....	47
3.2.4 Pemilu 1987.....	49
3.2.5 Pemilu 1992.....	53
3.2.6 Pemilu 1997.....	57
3.3 Pemilu Masa Reformasi.....	59
3.3.1 Pemilu 1999.....	59
<b>IV. Visualisasi Pemilu 2004 dalam Kartun Editorial Oom Pasikom</b>	
4.1 Pemilihan Umum 2004.....	67

<b>V. KESIMPULAN.....</b>	<b>78</b>
<b>VI. DAFTAR SUMBER .....</b>	<b>81</b>
<b>VII. LAMPIRAN</b>	



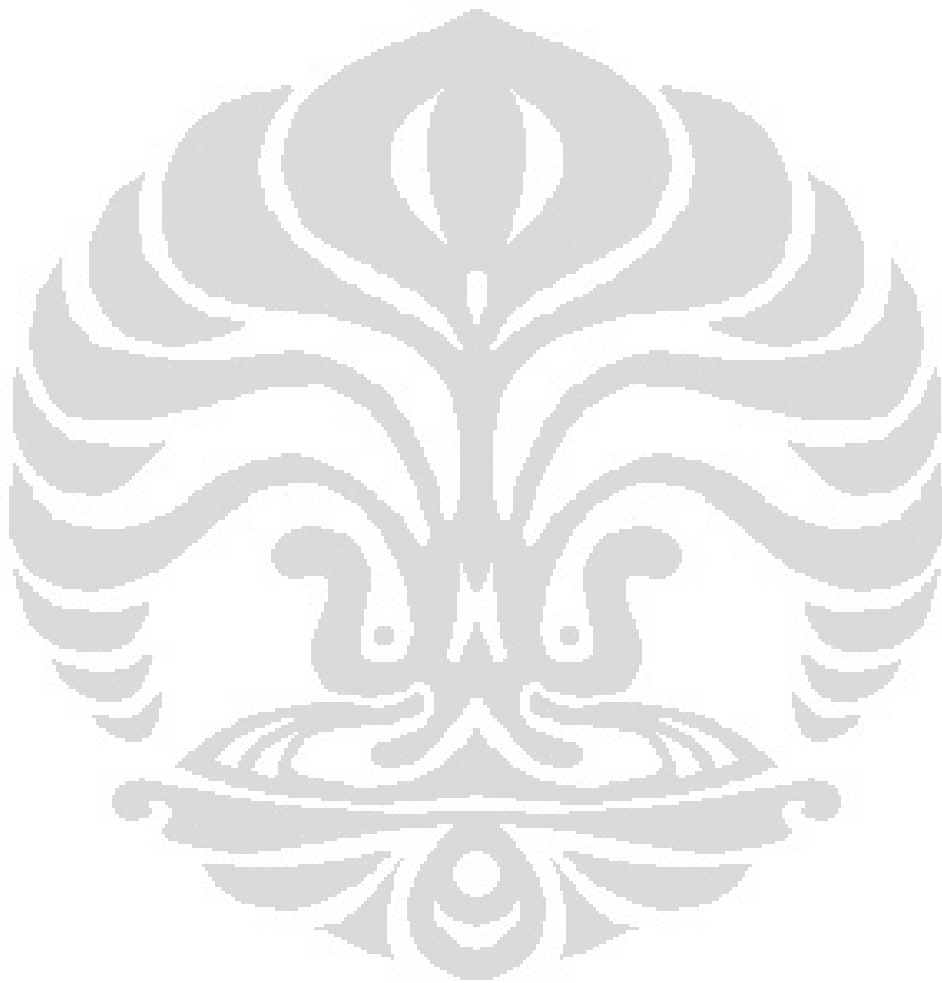


## DAFTAR AKRONIM & SINGKATAN



DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Golput	: Golongan Putih
IPKI	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
ICW	: <i>Indonesia Corruption Watch</i>
Keppres	: Keputusan Presiden
KKN	: Korupsi Kolusi Nepotisme
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Luber-Jurdil	: Langsung Umum Bebas Rahasia- Jujur Adil
LPU	: Lembaga Pemilihan Umum
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
NU	: <i>Nahdatul Ulama</i>
OPP	: Organisasi Peserta Pemilu
Orsospol	: Organisasi Sosial Politik
PAN	: Partai Amanat Nasional
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilu
Parkindo	: Partai Kristen Indonesia
Parmusi	: Partai Muslimin Indonesia
Parpol	: Partai Politik
PDI-P	: Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perti	: Persatuan Tarbiyah Islamiyah
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa

PKI	: Partai Komuis Indonesia
PKPB	: Partai Karya Peduli Bangsa
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PSII	: Partai Syarikat Islam Indonesia
RUU	: Rancangan Undang Undang
Sekber-Golkar	: Sekretariat Bersama- Golongan Karya
SIT	: Surat Izin Terbit
SIUPP	: Surat Izin Penerbitan Pers
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UUD	: Undang-Undang Dasar



*“Dengan kartun kita berteriak dalam bisikan yang menyampaikan bahwa kita belum terlambat untuk memperbaiki”*

— Prof. Yasuo Yoshitomi, Kartunis Senior, Guru Besar Departemen Kartun, Universitas Seika, Kyoto, Jepang.

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kritik sosial berupa kartun editorial sering kali ditemui didalam berbagai media cetak, seperti surat kabar, majalah, dan tabloid. Di dalam media ini kartun biasanya disajikan sebagai selingan setelah para pembaca menikmati rubrik-rubrik atau artikel-artikel yang lebih serius. Dengan kartun, para pembaca dibawa ke dalam situasi yang lebih santai. Meskipun pesan-pesan di dalam beberapa kartun sama seriusnya dengan pesan-pesan yang disampaikan lewat berita dan artikel. Namun pesan-pesan kartun sering lebih mudah dicerna atau dipahami sehubungan dengan sifatnya yang menghibur. Tambahan pula kritikan-kritikan yang di sampaikan secara jenaka tidak begitu dirasakan melecehkan atau mempermalukan<sup>1</sup>.

Aspek pertentangan dalam tradisi penciptaan kartun sebenarnya bukanlah lebih mementingkan naluri untuk mengkritik, melainkan lebih menekankan fakta-fakta historis bahwa masyarakat telah memasuki bentuk komunikasi politik yang modern, dan tidak lagi mempergunakan kekuatan atau kekuasaan<sup>2</sup>. Pandangan kartun politik di media masa, dapat memberikan cakrawala baru mengenai kondisi politik, ekonomi, sosial, bahkan olah raga disebuah negara. Menurut kartunis Mochamad Fauzie, kartun editorial dapat dijadikan sebagai media penyampaian gagasan dan pikiran tentang persoalan politik yang terjadi di Masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam hal ini, media massa merupakan sebuah medium yang efektif serta memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap masyarakat. Beberapa kalangan menggunakan media cetak seperti surat kabar ataupun majalah untuk menyebarkan pengaruh serta ideologinya demi kepentingannya untuk menggalang suara, terutama ketika masa kampanye Pemilihan Umum. Media cetak juga memiliki fungsi kritik dan pengawasan sosial (*Social Control*) yang biasa dikemas

---

<sup>1</sup> I Dewa Putu Wijana, 2004, *Kartun: Studi Tentang Permainan Bahasa*, Jakarta: Penerbit Ombak. Hlm.4

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm.4

<sup>3</sup> Mochamad Fauzie, "*Kartunis Mochamad Fauzie*", dalam Brotoatmodjo et al, 1997, *Demokrasi dan HAM dalam Kartun Pers.* (Cet.1), Jakarta: Institut ECATA-INPI-PACT, Hlm.34.

dalam rubrik, opini, artikel berita, ataupun informasi yang disampaikan dengan bergaya humor, seperti dalam kartun dan karikatur.

Sudah sejak lama terdapat beberapa media cetak yang menyampaikan kritiknya melalui representasi gambar kartun ataupun karikatur politik, Seperti *Djawa Baroe*<sup>4</sup>, *Fikiran Ra'jat*<sup>5</sup>, *Harian Rakjat*<sup>6</sup>, *Indonesia Raya*<sup>7</sup>, dll. Selain itu juga terdapat beberapa kartunis seperti Dwi Kundoro Brotoatmodjo yang melahirkan sederet karya parodi kartunnya dalam *Kompas*, dengan ikon terkenalnya 'Panji Koming'. Kemudian GM Sudarta yang melahirkan karya besarnya di *Kompas* pula dengan 'Oom Pasikom-nya'. Lalu kartunis Mochamad Fauzie dalam Majalah *Jakarta Jakarta*, Pramono R. Pramodjo dengan tokoh 'Si Keong' untuk *Sinar Harapan*, karya-karyanya juga dimuat oleh media cetak *Suara Pembaruan*, dan Tabloid *Mutiara*. Lalu ada Priyanto Sunarko yang mengisi rubrik kartun di Majalah *Tempo*, *Forum Keadilan*, dan *D&R*, Tarcisius Sutanto karyanya tersebar di berbagai media, antara lain *Tempo*, *Jakarta Post*, dan *Pikiran Rakyat*. Masih banyak lagi para kartunis yang mengisi kolom editorial di berbagai media cetak. Sindiran/kritik ini disampaikan secara simbolik dan penuh humor.

Kartun editorial merupakan proyeksi suatu peristiwa yang dibahasakan dalam bentuk gambar pada kolom editorial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>8</sup>, editorial adalah artikel di dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar (majalah) mengenai

<sup>4</sup> *Djawa Baroe* adalah majalah terbitan pemerintahan pendudukan Jepang tahun 1943-1945. Sebuah majalah propaganda Jepang yang isinya lebih menunjukkan kekuatan dan kehebatan Jepang demi menggalang massa dalam perang Asia Timur Raya. (<http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/djawa-baroe>, diakses 10 Mei 2011, pukul 00.05 WIB)

<sup>5</sup> *Fikiran Ra'jat* adalah majalah politik populer tahun 1932. "Kaoem Marhaen! Inilah Madjallah Kamoe" Begitulah kalimat yang selalu tertulis dalam setiap edisinya. Majalah Politik Populer ini dipimpin langsung (Pemimpin Sidang Redaksi) oleh: Ir. Soekarno. Terbit seminggu sekali. Soekarno ketika itu banyak membuat karikatur yang dimuat dalam majalah *Fikiran Ra'jat* untuk tujuan politik anti-imperialisme. (<http://merahputihbookshop.xikat.com/product/item/6/books/non.fiction/2mj.fikiran.rajat>, diakses 10 Mei 2011, pukul 23.04 WIB)

<sup>6</sup> *Harian Rakjat* adalah surat kabar Indonesia yang pertama kali terbit pada 1951 dengan jargon "Untuk rakjat hanja ada satu harian *Harian Rakjat*!". Koran ini merupakan media resmi Partai Komunis Indonesia. (<http://history22education.wordpress.com/2010/harian-rakjat>, diakses 10 Mei 2011, pukul 23.22 WIB)

<sup>7</sup> *Indonesia Raya* adalah surat kabar harian dengan pemimpin redaksi Mochtar Lubis. Surat kabar ini pernah dua kali dibredel pemerintah Indonesia, pertama saat rezim Orde Lama (dibredel sejak 1958 hingga diterbitkan kembali tahun 1968) dan kemudian pada tahun 1974 oleh pemerintah Orde Baru saat terjadi Peristiwa Malari (<http://books.google.co.id/books/koran+indonesia+raya>, diakses 10 Mei 2011, pukul 00.18 WIB)

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, cet.4, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm.284

beberapa pokok masalah. Sebuah editorial/tajuk yang berupa gambar atau dikenal dengan sebutan kartun editorial, biasanya menghiasi kolom pojok dalam surat kabar yang berisi komentar atas isu atau berita yang sedang ramai dibicarakan masyarakat.

Jadi sebagai editorial visual, kartun tersebut mencerminkan kebijakan dan garis politik media yang memuatnya, sekaligus mencerminkan pula budaya komunikasi masyarakat masanya. Dalam mengungkap komentar, kartun menampilkan masalah tidak secara harfiah tetapi melalui metafora. Dapat dikatakan bahwa kartun editorial adalah suatu alternatif membaca peristiwa dalam sebuah surat kabar atau majalah dalam bentuk gambar sebagai tajuk rencana.

Posisi kartun editorial ini biasanya berdiri sebagai oposan dari pemerintah yang sedang berkuasa. Meminjam istilah GM Sudarta, Kartunis ataupun karikaturis bisa berperan sebagai anjing penjaga<sup>9</sup>, yang memberikan “*early warning*” (peringatan awal) bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Hal tersebut merupakan peran kartun editorial dalam menyikapi keadaan sosial-politik di suatu Negara. Peran kartun editorial pun bisa bersifat universal, dalam artian setiap orang dari berbagai lapisan sosial dapat dengan mudah mengetahui gambaran umum mengenai suatu peristiwa melalui sebuah gambar, walaupun tidak secara mendalam, namun kehadiran kartun editorial sebagai bagian dari elemen jurnalisme cukup penting dalam penerbitan pers, khususnya untuk membuat suatu ‘*Icon*’ yang unik sehingga surat kabar tersebut dengan mudah dikenali.

Salah satu surat kabar yang memiliki ‘*icon*’ yang unik adalah *Kompas* dengan kartun editorialnya yang bernama ‘*Oom Pasikom*’, karya GM. Sudarta. *Kompas* terbit pertama kali pada tanggal 28 Juni 1965 dan karya GM Sudarta pertama kali muncul di *Kompas* pada bulan April 1967, ketika naiknya rezim Orde Baru. Hal ini ditandai dengan munculnya kartun editorial pada tanggal 4 April 1967 yang menggambarkan sosok Jendral Soeharto sedang menyapu komponen Orde Lama. Didalamnya terdapat pesan bertuliskan “*Euforia berdirinya Orde Baru!*”. Lihat gambar berikut:

---

<sup>9</sup> istilah *kartunis* atau *karikaturis* menurut GM Sudarta dalam sebuah Kata Pengantar “*Reformasi: Sejak Tumbangnya Orde Baru sampai Lahirnya Reformasi dalam Kartun*”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2000. Hlm.xii



(Kompas, 4 April 1967)

Karya-karya GM Sudarta banyak pula memuat kritik sosial-politik yang merekam perjalanan Pemilu di Indonesia. Misalnya selama pemilu-pemilu Orde Baru hingga masa Reformasi. Selama rezim otoriter Soeharto, Indonesia telah menyelenggarakan 6 (enam) kali Pemilu, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Namun dalam perjalanannya kemudian Orde baru melakukan rekayasa pemilu dan menempatkan pemilu 'seolah-olah' hanya sebagai proses untuk mendapatkan legitimasi atas kekuasaannya<sup>10</sup>. Penyelenggaraan Pemilu ketika itu sangat didominasi oleh peran (intervensi tunggal) pemerintah, sehingga pemilu-pemilu Orde baru merupakan pengukur yang tidak sempurna sebagai kehendak politik rakyat. Semua pemilihan di era rezim Soeharto itu mencerminkan proses elektoral yang dikelola dan dikontrol sangat ketat sebagai hasil rancangan pemerintah<sup>11</sup>.

Pada masa Orde Baru, GM sudarta harus berhati-hati dalam menyisipkan kritik dalam kartunnya. Karena iklim politik semasa Orde Baru tidak memungkinkan semua ide bisa diangkat, kecuali kalau koran ingin mengambil risiko akan teguran keras dari Departemen Penerangan, atau malah pencabutan SIUPP<sup>12</sup>. Namun setelah tumbangny rezim Orde baru, Era Reformasi seolah memunculkan optimisme baru dengan membawa hawa kebebasan. Keterbukaan mulai terasa dan

<sup>10</sup> Wahidah Suaib. 2005. *Optimalisasi tindak lanjut pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu: Dilema pengawasan pemilu 2004*. Tesis FISIP-UI. Hlm. 18

<sup>11</sup> R. William Liddle. 1994. *Pemlu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*. Jakarta: LP3ES. Hlm. 37.

<sup>12</sup> Ninok Leksono, sebuah Kata Pengantar, dalam GM Sudarta. 2007. *40 Tahun Oom Pasikom Peristiwa dalam Kartun 1967-2007*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hlm.xxiii

kehidupan seni kartun mulai semarak. Pada masa ini GM Sudarta mulai banyak menghasilkan karya-karya yang mengkritik lebih tajam. Tetapi ia tetap memegang prinsip pembuatan kartun di Indonesia yaitu dengan menggunakan cara tidak sarkastik, dan tidak *to the point*.

Ketika memvisualisasikan jalannya Pemilu 1999, iklim reformasi memberi banyak ruang kebebasan untuk berekspresi. Banyak kasus persoalan yang diangkat mengenai Pemilu 1999 ini, misalnya mengenai situasi keamanan serta instabilitas politik. Lalu penggambaran mengenai indikasi kecurangan menjelang pelaksanaan Pemilu dengan melakukan politik uang, penggunaan fasilitas negara dan pemanfaatan jabatan pemerintah dan masih banyak lagi penggambaran yang merefleksikan realitas Pemilu ketika itu.

Terlebih ketika Pemilu 2004, dimana pada masa ini Indonesia telah menjalani masa transisi demokrasi selama kurang lebih 6 tahun. Dalam iklim kebebasan reformasi ini, kartun editorial *Oom Pasikom* pun menjadi lebih produktif dan lebih berani dalam mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan saat proses Pemilu. Persoalan yang dihadapi pun lebih banyak dan lebih kompleks. Pola-pola lama yang muncul dalam setiap momentum Pemilu seperti, Praktek-praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), persoalan netralitas KPU, golongan putih, sosialisasi pemilu yang kurang maksimal, *Money politics*, *black campaign*, intervensi, mobilisasi massa serta penyalahgunaan wewenang dan fasilitas pejabat masih menjadi fenomena yang kerap muncul.

Hal ini terjadi karena secara teknis proses pelaksanaannya pun juga berbeda dengan Pemilu sebelumnya. 'Pesta Demokrasi' kali ini memilih langsung wajah-wajah calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Secara teknis, cara ini lebih rumit dan persoalan yang dihadapi pun semakin banyak. Oleh karena itu GM sudarta pun banyak menggambarkan realitas Pemilu yang terjadi di masyarakat ketika itu. Hal inilah yang membedakan Pemilu 2004 dengan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

Media di Indonesia pun mulai berproses menjadi pilar keempat dari demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kemampuan pers dalam



menyebarkan banyak hal untuk secepatnya diketahui berbagai pihak, membuat keberadaannya seakan memiliki kekuatan dan kekuasaan tersendiri. Lalu dikenalah istilah “*the fourth estate of the press*”, Pers adalah kekuatan keempat sesudah legislatif, eksekutif, dan yudikatif<sup>13</sup>. Peran media massa cukup signifikan dalam menyampaikan informasi khususnya mengenai kondisi Pemilu di Indonesia. Berbagai kritik Sosial-politik seperti pelaksanaan kampanye pada Pemilu, beberapa kekurangan, pelanggaran dan penyelewengan didalamnya, dilontarkan dengan berbagai macam cara, seperti melalui tulisan ataupun berbentuk gambar-gambar sindiran berupa karikatur ataupun kartun politik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menarik untuk membahas mengenai ‘Visualisasi Realitas Pemilu 1971-2004 dalam Kartun Editorial *Oom Pasikom* Harian *Kompas*’. Mengingat kartun editorial *Oom Pasikom* merekam perjalanan Pemilu di Indonesia sejak tahun 1971-2004. Dalam hal ini dapat diketahui bagaimana GM Sudarta, sebagai seorang kartunis, merefleksikan Pemilu 1971-2004 dalam bentuk kartun editorial *Oom Pasikom* serta perbedaan visualisasi dari masa-ke-masa selama Pemilu Orde baru hingga Reformasi (1971-2004). Melalui perkembangan ini pula dapat diketahui pula bagaimana kebijakan rezim yang berkuasa sangat mempengaruhi cara kartun menyampaikan sebuah kritik dan sindiran dengan gaya humor.

Dalam hal ini Harian *Kompas* banyak mempublikasikan kritik sosial-politik dalam bentuk kartun editorial *Oom Pasikom* selama Pemilu 1971-2004. GM Sudarta adalah salah satu kartunis Indonesia yang paling aktif dan produktif dalam menggambarkan dinamika suasana Pemilu di Indonesia. Selain itu *Kompas* yang ketika itu memiliki tempat di hati pembaca dengan ikon *Oom Pasikom* yang cukup terkenal. Dapat dikatakan harian *Kompas* ini memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman serta pendidikan politik terhadap publik, terutama melalui kartun editorial yang mudah dipahami oleh semua kalangan.

Terlebih pada tahun 2004 *Kompas* merajai penjualan surat kabar secara nasional., tiras hariannya mencapai 530.000 eksemplar, khusus untuk edisi Minggunya bahkan mencapai 610.000 eksemplar. Pembaca koran ini mencapai 2,25

---

<sup>13</sup> Novel Ali, 1999, *Peradaban Komunikasi Politik..* Bandung: Rosda Karya. Hlm.271.

juta orang di seluruh Indonesia<sup>14</sup>. Kartun editorial *Oom Pasikom* karya Gerardus Mayela (G.M.) Sudarta tidak hanya membuat orang tersenyum untuk kemudian membenarkannya, tetapi juga membuat orang yang menjadi sasaran kritiknya pun ikut tersenyum, meski kecut<sup>15</sup>. Menangkap sebuah fenomena atau suatu peristiwa penting kemudian menuangkannya dalam sebuah gambar bukanlah suatu hal yang mudah. Ketajaman pemikiran diperlukan dalam membaca serta menganalisis perubahan apa yang digambarkan oleh kartun. Dengan demikian pesan yang ingin disampaikan tidak salah arti walaupun perbedaan tafsiran itu mungkin saja terjadi. Kartun editorial *Oom Pasikom* karya GM Sudarta ini kemudian tampil sebagai representasi atas keadaan sekitar.

Kasus-kasus ini cukup menarik untuk dikaji mengingat sebelumnya belum pernah ada penelitian yang membahas visualisasi kartun editorial dari perspektif sejarah. Umumnya karya ilmiah yang berkaitan dengan gambar kartun editorial ini diteliti dengan menggunakan pendekatan ilmu Komunikasi ataupun Seni Rupa yang lebih membahas dari aspek linguistik serta simbol-simbol pada gambar. Oleh karena itu, penulis akan membahasnya dari perspektif sejarah secara kronologis-historis dan menguji kevalidan sebuah kartun terhadap fakta-fakta historis serta penjelasan cerita dibalik kartun tersebut kemudian dinarasikan dalam sebuah cerita sejarah. Dengan begitu dapat diketahui pula hubungan media dengan masyarakat, pemerintah, serta dapat pula mempelajari budaya politik dan komunikasi masyarakat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam kurun waktu yang relatif panjang (1971-2004), terlihat adanya perbedaan gaya visualisasi *Oom Pasikom* terutama setelah era reformasi yang berubah menjadi lebih bebas dan berani. Perubahan visualisasi tersebut tentu bukannya tanpa sebab. Paling tidak ada beberapa faktor politis-ekonomis yang melatarbelakanginya yang menjadi pertimbangan pemilik harian *Kompas*, tempat

<sup>14</sup> Cecep Rukendi, *Analisis wacana Pariwisata di Harian Kompas*, dalam Jurnal Kepariwisata Indonesia, Vol. 3 No. 2 Juni 2008, Hlm. 184, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/3208181193.pdf>, diakses 3 Desember 2011, pukul 00.05 WIB

<sup>15</sup> Suryopratomo (Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab Kompas), "*Kritik Jenaka, Senyum Kecut*" dalam Kata Pengantar *40 tahun Oom Pasikom peristiwa dalam kartun tahun 1967-2007*. Jakarta: Gramedia, 2007. Hlm.xi

bernaungnya *Oom Pasikom*, misalnya faktor Politik yang tercermin dalam SIUPP (Surat Izin Penerbitan Pers) dan SIT (Surat Izin Terbit). Bertolak dari pernyataan itu, muncul pernyataan yang sekaligus menjadi pokok permasalahan disini, yaitu bagaimana cara GM Sudarta memvisualisasikan realitas Pemilu dalam kartun tanpa terjebak dalam perangkap kebijakan pemerintah. Berdasarkan pokok permasalahan ini maka timbul pertanyaan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana GM Sudarta memvisualisasikan realitas Pemilu 1971-2004 dalam bentuk gambar kartun editorial *Oom Pasikom*?
- Apakah perbedaan antara visualisasi Pemilu masa Orde Baru (Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997) dengan era Reformasi (Pemilu 1999 dan 2004) ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dinamika perkembangan kartun editorial *Oom Pasikom* sejak Pemilu masa Orde Baru sampai era Reformasi, dimulai dari Pemilu 1971 sampai Pemilu 2004. Kemudian penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana sindiran/kritik atas realitas Pemilu disampaikan dan bagaimana kartun tersebut memotret berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan yang kerap terjadi di setiap penyelenggaraan Pemilu.

Melalui kartun editorial ini, dapat dipahami bagaimana hubungan media dengan masyarakat, pemerintah, serta dapat pula mempelajari budaya politik dan komunikasi masyarakat.

### 1.4 Ruang lingkup Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada tahun 1971-2004. Yaitu sejak dimulainya pemilu pertama Orde Baru tahun 1971 hingga Pemilu 2004. Namun untuk lebih mengetahui dan memahami proses perkembangan *Oom Pasikom* yang membahas Pemilu, beberapa sampel kartun editorial yang memiliki relevansi dengan Pemilu diambil sebelum tahun 1971. Semua kartun editorial bersumber dari Harian *Kompas*. Kartun editorial yang memiliki relevansi dengan Pemilu Orde baru, muncul dari tanggal 18 Oktober 1969- 4 Juni 1997. Sedangkan pada Pemilu era Reformasi muncul dari tanggal 13 Desember 1998- 14 Juli 2004.

## 1.5 Metode Penelitian

Peristiwa yang dikaji dalam penulisan ini dilakukan dengan kajian dan pengamatan langsung terhadap sejumlah objek terkait (Kartun) untuk mendapatkan persepsi yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi suatu penjelasan ilmiah. Objek penelitian dikumpulkan dari sumber-sumber otentik yaitu surat kabar *Kompas*, untuk selanjutnya dilakukan seleksi, verifikasi, dan justifikasi untuk mendapatkan sejumlah objek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini penulis juga menggunakan metode Roland Barthes sebagai alat bantu untuk menganalisis kartun yang bertujuan untuk mengungkapkan makna simbol-simbol yang ada. Dalam teknik Barthes untuk menganalisis suatu kartun politik diperlukan lima elemen<sup>16</sup>. Kelima elemen tersebut yaitu, konteks, konten, target, teknik, dan pesan.

### 1. Konteks

Konteks merupakan elemen pertama untuk menganalisis sebuah kartun politik. Elemen ini biasanya menggambarkan suatu isu atau peristiwa yang menjadi latar belakang atau topik sebuah kartun politik. Pembaca akan mudah memahami pesan yang ingin disampaikan kartunis jika memahami konteks peristiwanya.

### 2. Konten

Elemen kedua untuk menganalisis kartun politik adalah elemen konten atau isi. Pada elemen ini, isi dari kartun politik digambarkan secara lebih detail sehingga memberikan penggambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa atau topik yang diangkat. Dalam tahap ini, pembaca sudah mulai memahami apa yang diutarakan oleh kartun politik.

### 3. Target

Elemen target merupakan salah satu poin penting dalam menganalisis dan menginterpretasikan sebuah kartun politik. Elemen ini berfungsi untuk mengidentifikasi target dari kartun politik yang biasanya bisa saja seorang tokoh, sebuah pemikiran, atau sebuah institusi.

<sup>16</sup> Alex Sobur. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2003. Hlm.133

#### 4. Teknik

Pada umumnya seorang kartunis menggunakan teknik persuasif dalam menggambarkan kartun politik. Terdapat beberapa teknik persuasif yang sering dipergunakan oleh seorang kartunis untuk dapat menyampaikan inti dari kartun politik, seperti simbolisasi, efek berlebihan, pemberian label, analogi, dan ironi<sup>17</sup>. Ketika sebuah kartun menggunakan teknik-teknik ini, maka inti yang disampaikan oleh para kartunis semakin jelas terbaca oleh pembaca.

- a. *Simbolisasi*, para kartunis menggunakan objek sederhana atau simbol untuk memaparkan konsep atau idenya. Simbol-simbol yang terdapat didalam sebuah kartun politik biasanya memiliki arti tersendiri dan mewakili suatu benda, peristiwa, atau seorang individu. Kefektifan sebuah simbol sangat tergantung pada penggambarannya yang mudah untuk dipahami oleh pembaca.
- b. *Efek berlebihan*. Kartun politik tidak menggambarkan suatu peristiwa yang nyata secara harfiah, kartunis seringkali menggambarkan objek dari kartun politiknya secara berlebihan atau justru mengecilkannya. Efek ini juga sering digunakan untuk menekankan besarnya kekuasaan, kepentingan, atau bahaya terhadap suatu isu.
- c. *Label*. Kartunis biasanya memberikan label pada objek pada individu pada sebuah kartun, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan kepada pembaca makna apa atau mewakili objek atau individu tersebut. Pemberian label yang bermacam-macam bentuk ini juga perlu diperhatikan dalam menganalisis sebuah kartun politik.
- d. *Analogi*. Analogi merupakan sebuah perbandingan antara dua hal yang berbeda, perbandingan ini dimaksudkan untuk membandingkan isu atau situasi yang hampir sama. Teknik ini digunakan oleh kartunis untuk memberikan pemahaman bagi para pembacanya mengenai suatu peristiwa serupa namun sedikit berbeda.

---

<sup>17</sup> *Cartoon Analysis Guide*,

<http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/activities/political-cartoon/cag.html>, diakses pada 4 Desember 2011, pukul 23.43 wib.

- e. *Ironi*. Teknik ini merupakan penggambaran antara peristiwa pada kenyataannya dan peristiwa yang seharusnya terjadi atau peristiwa yang diharapkan terjadi oleh para kartunis. Ironi dimaksudkan untuk mengekspresikan opini kartunis ke dalam suatu isu.

Kelima teknik persuasif ini merupakan teknik-teknik yang sering diterapkan oleh kartunis, namun perlu diingat bahwa tidak setiap kartun politik memiliki kelima unsur persuasif ini. Oleh karena itu, dalam menganalisis kartun politik, perlu dilakukan juga analisis mengenai teknik yang dipakai oleh kartunis.

#### 5. Pesan

Elemen terakhir dalam proses menganalisis kartun politik adalah pesan yang tersirat dalam kartun politik. Pesan dapat berupa sekumpulan gambar, kata-kata humor, atau gabungan keduanya<sup>18</sup>. Pesan melalui sekumpulan gambar, umumnya dilakukan dengan melebih-lebihkan karakteristik unik dari seorang individu atau penekanan pada benda yang berhubungan dengannya seperti pakaian, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh. Untuk penyampaian pesan melalui kata-kata, biasanya terdapat dalam bentuk judul, keterangan, name tag, balon, komentar, atau dialog.

Kelima metode ini diperlukan untuk menganalisis kartun editorial yang penuh dengan perlambangan yang sarat makna. Selain dikaji sebagai teks, juga secara kontekstual untuk menghubungkannya dengan situasi yang sedang terjadi di masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan penafsiran. Kemudian penulis juga menggunakan metode Kualitatif-Kuantitatif, hal ini diperlukan untuk menilai kartun editorial yang memiliki relevansi dengan tema penelitian serta menyeleksi data kuantitatif terkait hasil penghitungan suara dalam Pemilu.

Selain itu penelitian ini menggunakan metode sejarah sebagai landasan untuk memastikan atau menguji akurasi kartun editorial agar sesuai dengan realitas historis dan guna mendeskripsikan peristiwa Pemilu. Metode ini dilakukan melalui pengumpulan sumber dengan heuristik, kritik, interpretasi, dan Historiografi. Pada tahap heuristik penulis mengumpulkan data yang bisa dijadikan sumber, baik

<sup>18</sup> <http://www.collectionscanada.gc.ca/education/008-3050-e.html>, diakses pada 4 Desember 2011, pukul 00.01 wib.

sumber primer<sup>19</sup> maupun sumber sekunder<sup>20</sup>. Kemudian pengumpulan data yang dapat mendukung penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang didapatkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). Perpustakaan *Kompas* Pal Merah, Perpustakaan FIB, Perpustakaan Pusat UI, dan koleksi pribadi yang diklasifikasikan dan dikumpulkan dari sejumlah bahan-bahan tertulis dari berbagai sumber seperti buku, majalah, surat kabar sezaman dan lain-lain. Serta naskah tertulis lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap sesuai dengan pembahasan penelitian.

Setelah berbagai sumber didapatkan, kemudian penulis melakukan kritik. Tahapan ini merupakan tahap pengujian akurasi dan kredibilitas sumber yang didapatkan. Dalam tahap ini penulis dapat memilih dan memilah serta mempertimbangkan sumber tersebut layak atau tidak untuk dijadikan sumber penelitian.

Kemudian tahap selanjutnya adalah interpretasi. Dalam tahapan ini sumber-sumber yang ditemukan diberi pemaknaan oleh penulis sehingga sumber-sumber tersebut benar-benar menggambarkan suasana zaman yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Berbagai sumber yang ada diberikan pemaknaan sesuai dengan data yang ditemukan. Lalu tahapan selanjutnya adalah Historiografi. Tahapan ini merupakan tahap terakhir dari metode sejarah, yaitu tahap penulisan sebuah peristiwa menjadi sebuah karya sejarah.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

Terdapat Disertasi Priyanto Sunarto 2005, yang berjudul *Metafora Visual Kartun Editorial pada Surat Kabar Jakarta 1950-1957*, FSRD ITB Bandung yang membahas mengenai kartun editorial. Namun penelitian ini menggunakan pendekatan Seni Rupa dan membahas mengenai situasi sosial-politik selama periode Demokrasi Parlementer. Sampel yang diambil juga berasal dari beberapa surat kabar berbeda yang dianggap memiliki pengaruh ketika itu. Dalam tulisannya, ia mengulas

<sup>19</sup> *Sumber Primer* adalah kesaksian seorang saksi dengan mata-kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain, Lihat: Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (terj. Nugroho Notokusanto), Jakarta: UI Press, 2006. Hlm.43

<sup>20</sup> *Sumber Sekunder* merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya. *Ibid.*, Hlm.43

satu-persatu kartun editorial dari berbagai aspek seperti topik berita, metafora, segi perupa-an, emotif dan ungkapan budaya. Disertasi ini kiranya dapat menjadi bahan komparasi yang dapat diperhitungkan. Dalam disertasinya, beliau meneliti teks visual dan simbol-simbol dengan metode semiotik untuk menginterpretasi sebuah kartun editorial. Secara umum penelitian ini merupakan penelitian seni rupa yang memusatkan perhatian pada penggunaan metafora visual dan aspek emotif kartun editorial pada masa Demokrasi Parlementer. Objek kartun diteliti secara mendalam melalui penelaahan rupa dasar (bentuk, teknik, corak, susunan).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis meneliti kartun editorial dengan cara yang berbeda yaitu dalam sebuah penelitian berperspektif sejarah, dimana sebelumnya beberapa kartun editorial akan diuji akurasi dengan menggunakan bantuan metode semiotik sehingga bisa dikatakan bahwa kartun editorial tersebut benar-benar memiliki kredibilitas dan sesuai dengan fakta serta realitas historis. Kemudian direkonstruksi secara kronologis menjadi cerita sejarah. Sebelumnya belum ada penelitian mengenai kartun editorial yang memvisualisasikan Pemilu Orde Baru Pemilu (1971-1997) hingga reformasi (Pemilu 1999-2004) dengan menggunakan metode sejarah.

### **1.7 Sumber Penelitian**

Penulisan mengenai “Visualisasi Realitas Pemilu 1971-2004 dalam kartun editorial *Oom Pasikom* Harian *Kompas*” ini berupaya untuk mendeskripsikan peristiwa Pemilu yang direpresentasikan melalui kartun editorial. Penggambaran kartun editorial ini dapat dikatakan mewakili keadaan ketika itu, karena dalam pembuatannya, sang kartunis pun memerlukan pengamatan yang tajam serta analisis yang kuat agar dapat dengan tepat memvisualisasikannya. Kartun editorial ini juga berperan penting dalam membuat pemahaman serta memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Karena dengan gambaran yang menarik, masyarakat lebih mudah memahami realitas politik khususnya pada masa itu.

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer penelitian bersumber dari Surat kabar *Kompas* serta koran-koran sezaman yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dan Perpustakaan *Kompas* Pal Merah. Selain sumber primer,



penulisan ini pun juga menggunakan sumber sekunder. Terutama buku-buku yang berkaitan dengan Kartun Editorial, seperti buku-buku karangan GM Sudarta, *40 Tahun Oom Pasikom: Peristiwa dalam Kartun Tahun 1967-2007* (2007), Brotoatmodjo, et al., *Demokrasi dan HAM* (1997), I Made Putu Wijana, *Kartun* (2003), Agustin Sibarani, *Karikatur dan Politik* (2001), McCloud, Scott, *Understanding Comics* (2001), dll. Selain itu penulis juga menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan Pemilu 2004 seperti, Denny J.A, *Jejak-jejak Pemilu 2004* (2006), Tri Wahyuning M.Irsyam et al, *Sketsa perjalanan Bangsa Berdemokrasi* (2005), Dokumen Laporan Pengawasan Pemilu, dan beberapa buku referensi lainnya yang mendukung penelitian.

### **1.8 Sistematika penulisan**

Untuk membahas penelitian ini, penulis membagi penulisan ini menjadi lima Bab. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, yaitu:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Ruang lingkup penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sumber Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

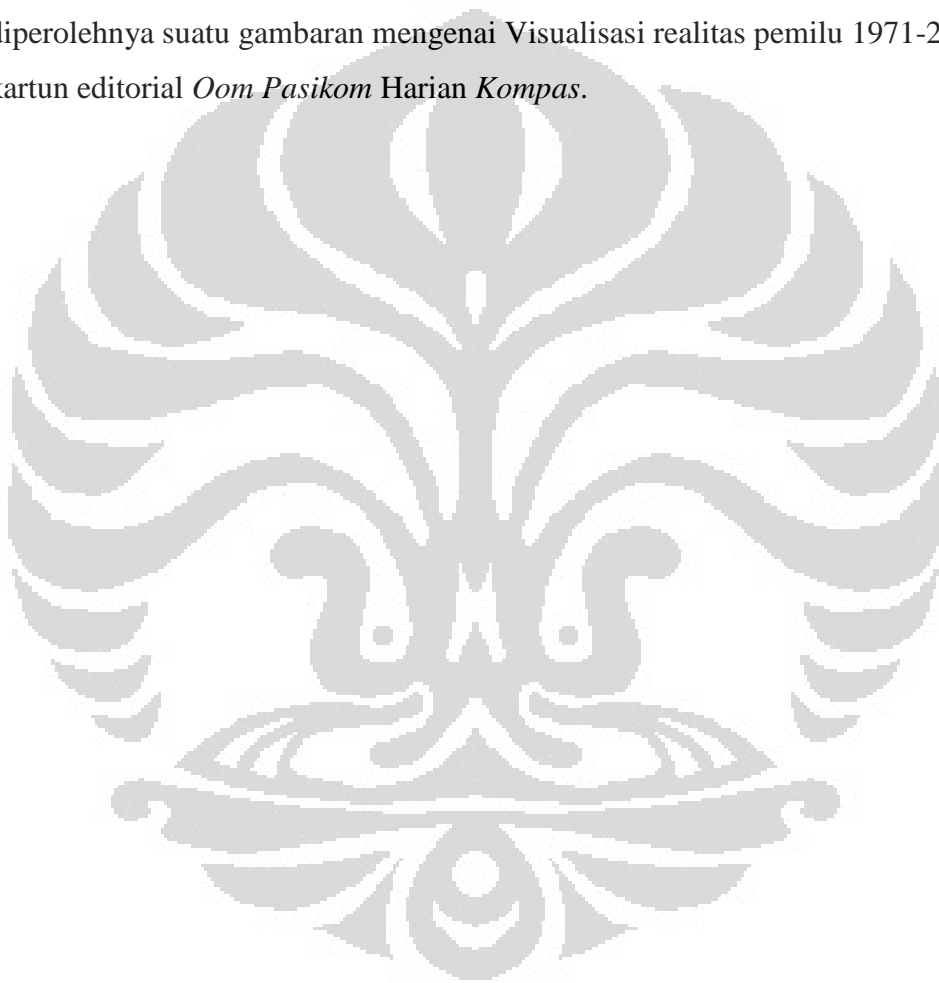
Bab II, dalam Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai perkembangan Kartun Editorial di Indonesia, awal munculnya kartun politik dalam surat kabar. Kemudian akan dijelaskan pula beberapa tokoh kartunis Indonesia yang berpengaruh dalam mengisi kolom tajuk rencana di beberapa surat kabar di Indonesia, khususnya GM Sudarta. Selain itu, bab ini juga memaparkan mengenai tinjauan umum profil surat kabar *Kompas* serta lahirnya *Oom Pasikom*.

Bab III, dalam Bab ini penulis memberikan penjelasan Pemilihan Umum di Indonesia, kemudian gambaran mengenai perkembangan Kartun Editorial *Oom Pasikom* pada masa kekuasaan Soeharto yaitu Pemilu sejak tahun 1971 sampai 1997 dan Pemilu masa Reformasi tahun 1999 yang berupa sindiran / sindiran atas realitas Pemilu yang digambarkan oleh kartunis GM Sudarta.

Bab IV, dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai visualisasi realitas Pemilu tahun 2004. Dimana pada masa ini terlihat perubahan yang lebih bebas dan berani mengenai cara mengkritik suatu peristiwa dalam bentuk kartun editorial. Pada

era Reformasi ini kartun editorial lebih banyak memotret berbagai persoalan Pemilu berupa kasus pelanggaran dan penyelewengan dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya. Persoalan yang ada divisualisasikan dalam Kartun Editorial *Oom Pasikom* yang telah diverifikasi berdasarkan fakta dan realitas historis.

BabV, Penutup. Dalam Bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang diajukan. Dengan demikian diharapkan diperolehnya suatu gambaran mengenai Visualisasi realitas pemilu 1971-2004 dalam kartun editorial *Oom Pasikom* *Harian Kompas*.



## **BAB II**

### **Kartun dan Karikatur di Indonesia**

#### **2.1 Wacana Kartun dan Karikatur**

Media pers di Indonesia menampilkan kartun dan karikatur sebagai gambar visual yang senantiasa dimuat untuk melengkapi artikel-artikel dalam surat kabar. Kartun dan karikatur dalam sebuah surat kabar cenderung merupakan wacana hiburan karena penciptaannya ditujukan untuk menghibur pembaca disamping sebagai wahana kritik sosial terhadap segala bentuk ketimpangan yang terjadi ditengah masyarakat. Pesan-pesan yang tergambar biasanya tersamar dan tersembunyi. Dalam penyampaian kritiknya pun mengutamakan unsur humor<sup>21</sup>, sehingga orang yang menjadi objek kartun ataupun karikatur tidak tersinggung atau merasa dilecehkan.

Menurut definisinya, terdapat beberapa pengertian mengenai kartun dan karikatur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartun adalah gambar dengan penampilan yang lucu, berkaitan dengan keadaan yang sedang berlaku (terutama mengenai politik)<sup>22</sup>. Sedangkan Karikatur adalah gambar olok-olok yang mengandung pesan, sindirin, dsb<sup>23</sup>.

Dalam *The Oxford English Dictionary*, Karikatur didefinisikan sebagai:  
<sup>24</sup> “*A grotesque usually comic representation of a person by exaggeration of characteristic traits, in a picture, writing, or mime*”. “*A ridiculously poor or absurd imitation or version*”. (Sesuatu yang aneh sekali biasanya representasi komik dari karakter seseorang yang berlebihan, dalam gambar, tulisan, atau tiruan". "tiruan/versi yang konyol atau absurd). Sedangkan Kartun<sup>25</sup> : “*A humorous drawing*

---

<sup>21</sup> *Humor* adalah segala bentuk rangsangan, baik verbal maupun non-verbal, yang potensial memancing senyum dan tawa penikmatnya. Senyum dan tawa merupakan indikasi yang paling jelas bagi terjadinya penikmatan humor. Lihat Mahadev L. Apte, *Humour and Laughter* (Ithaca: Cornell University Press, 1985), Hlm. 14.

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Cetakan pertama. Edisi ke-2. Jakarta: Balai Pustaka, 1991. Hlm.448

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm.447

<sup>24</sup> *The Oxford English Reference Dictionary*. Edited by Judy Pearsall And Bill Trumble. New York: Oxford University Press, 1995. Hlm.221.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm.225.

*in a newspaper, magazine, etc. especially as a topical comment*” (Sebuah gambar lucu di koran, majalah dan lain-lain terutama sebagai komentar topikal).

Kemudian, Karikatur diartikan sebagai gambar sindir serius (*satire*) sedangkan kartun hanyalah gambar lucu<sup>26</sup>. Asal mula perkataan “*caricature*” (Bahasa Inggris), “*caricatuur*” (Bahasa Belanda), “Karikatur” (Bahasa Jerman), adalah dari kata Italia: “*Caricare*”, yang berarti “*to load*” atau “*to surcharge*” atau dalam bahasa Indonesianya: memuat, dalam hal ini memuat berlebihan. Kata “*caricare*” ada hubungannya dengan kata lain, yaitu kata “*carattere*”, bahasa Italia untuk “*Character*” (Bahasa Inggris) atau “karakter” (Bahasa Belanda) dan Bahasa Indonesia: Watak. Ini juga ada kaitannya dengan “*cara*” (Bahasa Spanyol) untuk “wajah”.<sup>27</sup>

Kata Indonesia “kartun” diambil sebagai terjemahan kata Inggris *Cartoon*. Kata ‘*Cartoon*’ sendiri berasal dari kata Prancis ‘*Cartone*’ yang berarti kertas. *Cartoon* itu biasa dilukis diatas kertas atau bahan sejenisnya. Walau kartun juga sesungguhnya memiliki titik satiris (*Satirical Point*), namun titik satirisnya tidak ditekankan sebagai sesuatu yang dominan. Kartun juga tidak mengandung pengertian adanya distorsi yang memang mutlak untuk karikatur. Kartun bisa saja bebas dari distorsi pada pengubahan bentuk dalam pengolahan wajah pada sebuah gambar yang diciptakan.<sup>28</sup>

Kartun tidak terlalu terikat pada distorsi. Kerap distorsinya bukan hal utama, karena lebih mengutamakan humor daripada satire. Untuk sederhananya, dapat dikatakan bahwa sebuah karikatur adalah sebuah kartun. Tetapi sebuah kartun belum tentu merupakan sebuah karikatur, dan untuk memberikan kekhususan tanpa mengurangi fungsi sebuah kartun, maka biasa disebut adanya *political cartoon* atau *editorial cartoon*.<sup>29</sup>

Kata kartun pun mulai mengalami perluasan makna ketika media massa baik elektronik maupun cetak mulai hadir di tengah-tengah masyarakat. Pada media

<sup>26</sup> Agustin Sibarani, 2001, *Karikatur dan Politik*, Jakarta: Garba Budaya, Hlm.9

<sup>27</sup> *Karikatur dan Politik, Ibid.*, Hlm.11

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hlm 35

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hlm. 35

cetak, kartun lebih dikenal dengan istilah kartun modern yang terdiri dari kartun politik, kartun opini, kartun humor, dan komik. Pada media elektronik seperti televisi, kartun lebih dikenal sebagai kartun animasi yang sering kita jumpai dan umumnya disenangi oleh anak-anak. Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, terdapat tiga jenis kartun, yang diantaranya adalah,<sup>30</sup>

1. Kartun Murni (*Gag Cartoon*) yaitu gambar kartun yang hanya menyajikan gambar lucu dengan tujuan menghibur pembaca.
2. Komik Strip merupakan gambar kartun cerita yang terpisah-pisah, dimana karakter setiap gambar berkesinambungan dengan gambar lainnya dengan disertai dialog dalam setiap gambarnya.
3. Kartun Editorial atau kartun politik (*Political Cartoon*) yaitu gambar kartun satu panel yang biasanya ditemukan di media cetak.

Untuk menciptakan sebuah kartun, seorang kartunis harus memperhatikan beberapa kaidah yang berkaitan dengan teknis pembuatan kartun editorial atau karikatur, antara lain<sup>31</sup>:

1. Harus informatif dan komunikatif
2. Harus situasional dengan pengungkapan yang hangat
3. Cukup memuat kandungan humor
4. Harus mempunyai gambar yang baik

Para kartunis Indonesia pun memiliki persepsinya sendiri mengenai kartun dan karikatur. Menurut Pramono, Kartun dan karikatur ibarat binatang dan gajah. Kartun adalah binatang, sedangkan karikatur adalah gajah. Maksudnya adalah karikatur merupakan bagian dari kartun.

Senada dengan Pramono, Kartunis GM Sudarta mendefinisikan kartun adalah semua gambar humor. Termasuk karikatur itu sendiri. Sedangkan karikatur adalah deformasi berlebihan atas wajah seseorang, biasanya orang terkenal, yang dipercantik dengan penggambaran ciri khas fisik untuk tujuan mengejek. Istilah karikatur dan kartun pun sampai hari ini masih sering digunakan bersama dalam

<sup>30</sup> I Dewa Putu Wijana, *Kartun: Studi tentang permainan bahasa*, Hlm. 11-12

<sup>31</sup> Pramono, *Kartun Bukan Sekadar Benda Seni*, Prisma 1 Januari 1996, Hlm. 49

pengertian yang rancu. Karikatur diartikan sebagai gambar sindir serius (satire) sedangkan kartun hanyalah gambar lucu<sup>32</sup>. Untuk menghindari kerancuan, penelitian ini menggunakan istilah “kartun editorial” agar dapat membatasi lingkup kegiatan khusus, yaitu kartun sindiran yang dimuat di media surat kabar dan majalah sebagai editorial (tajuk rencana).

*Editorial Cartoon* atau Kartun editorial muncul sebagai sebuah tajuk rencana atau secara sederhana dapat disamakan dengan “pojok yang bersifat visual”. Artinya ia merupakan media yang khusus menyuguhkan cara berkomunikasi melalui visualisasi yang kocak namun intens<sup>33</sup>. Pentingnya kartun editorial disajikan dalam surat kabar adalah ketika kata-kata sudah tidak mampu lagi menggambarkan realitas sosial yang sebenarnya dan tidak mampu melakukan kritik sosial secara terang-terangan. Dalam hal ini menjadi relevan pernyataan Ben Anderson bahwa kartun adalah alat untuk menciptakan keadaan kolektif tanpa harus memasuki birokrasi, atau berbagai bentuk kekuatan politik, seperti tertulis dalam kutipan berikut:

*“Cartoons were a way of creating collective consciences by people without access bureaucratic or other institutionalized forms of political muscle”<sup>34</sup>.*

Berdasarkan beberapa definisi dan penjelasan mengenai wacana kartun dan karikatur diatas, dapat dikatakan bahwa objek pembahasan yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah mengenai kartun dan tergolong sebagai kartun editorial yang menjadi maskot dalam tajuk rencana atau editorial surat kabar *Kompas*. Kartun editorial *Oom pasikom* dalam hal ini menjadi sarana pengungkapan berbagai peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat dalam bentuk gambar kartun sekaligus menjadi cermin masyarakat pada zamannya. Peristiwa-peristiwa yang akan diangkat yaitu terkait dengan peristiwa politik, khususnya mengenai Pemilihan Umum di Indonesia.

<sup>32</sup> *Op.cit.*, *Karikatur dan Politik.*, Hlm.19

<sup>33</sup> Th. Sumarthana, *Sekapur Sirih Tentang Karikatur dan Karikaturis*. Dalam Pramono, *Karikatur-Karikatur 1970-1980*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1981, Hlm.vi

<sup>34</sup> Benedict R.O’G. Anderson, *Cartoons and Monuments: The Evolution of Political Communication Under The New Order*, dalam Karl D. Jackson and Lucian W.Pye (ed.), *Political Power and Communications in Indonesia* (Berkeley: University of California Press, 1978, Hlm.292

## 2.2 Perkembangan Kartun Editorial di Indonesia

Kartun dan karikatur sebagai sindiran politik dalam surat kabar Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Namun ketika itu hanya terdapat kartunis asing yang menggambar kartun dan karikatur politik dan umumnya terdapat dalam surat kabar berbahasa Belanda. Menurut kartunis Agustin Sibarani, belum pernah ada karikatur Indonesia di zaman Belanda. seperti tertulis dalam kutipan berikut:

*“Adakah Karikatur Indonesia di zaman Belanda?” Pernahkah timbul pertanyaan tersebut di kalangan Pers Indonesia? Sepanjang pengetahuan dan ingatan saya: belum pernah. Lalu timbul pertanyaan, “Kenapa sampai begitu?”, dapat dimengerti karena persoalan peranan karikatur dalam pers kita sebetulnya masih dalam taraf tidak tahu menahu. Banyak orang pers sendiri masih awam dan tidak mengerti peranan karikatur, padahal peranan karikatur sesungguhnya amat penting.”<sup>35</sup>*

Ketika masa penjajahan Belanda, surat kabar Hindia Belanda pernah memuat gambar sindiran tentang situasi politik di Indonesia. Tepatnya setelah berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Ketika itu diadakan Kongres Nasional pertama di gedung Sekolah Guru (*Kweekschool*), di Jetisharjo Yogyakarta. Sambutan terhadap kongres ini sangat meluas. Peristiwa ini dianggap sebagai kejadian yang penuh kesanggupan dan menggembirakan. *“Si Jawa telah bangun. Insulinde si cantik molek telah bangun”*. Demikian kata-kata dalam Pers Belanda<sup>36</sup>. Memang Kongres Budi Utomo pertama merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah dibuka pembicaraan secara bebas, terus terang, dan dengan argumentasi mempertahankan pendirian dalam forum sebuah Kongres Budi Utomo. Lihat gambar berikut:

<sup>35</sup> *Karikatur dan Politik, Op.cit.*, Hlm 63

<sup>36</sup> Abdurrachman Surjomihardjo, 1979, *Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi*, Jakarta: Yayasan Idayu, Hlm. 22



**Sumber:** Abdurrachman Surjomihardjo. 1979. *Pembinaan Bangsa dan Masala Historiografi*, Jakarta: Yayasan Idayu. Hlm. 22

Kemudian ada pula surat kabar Belanda bernama *Bataviaas Nieuwsblad* yang amat digemari masyarakat karena pada halaman depannya sering dimuat gambar-gambar sindiran yang menarik tentang situasi politik dunia. *Bataviaas Nieuwsblad* adalah salah satu koran yang paling banyak dibaca oleh kaum intelektual<sup>37</sup> Indonesia dan orang-orang Belanda di Batavia. Pada akhir tahun 1941 surat kabar *Bataviaas Nieuwsblad* menggambarkan tentang perkembangan politik di Asia. Seorang kartunis Belanda bernama Hover menggambarkan seekor gurita besar berkepala orang Jepang yang dibuat tidak berdaya oleh ksatria A.B.C.D Front (Australia, British, Cina, Dutch)<sup>38</sup>. Lihat gambar berikut:



**Sumber:** Agustin Sibarani, 2001, *Karikatur dan Politik*, Jakarta: Garba Budaya, Hlm.62

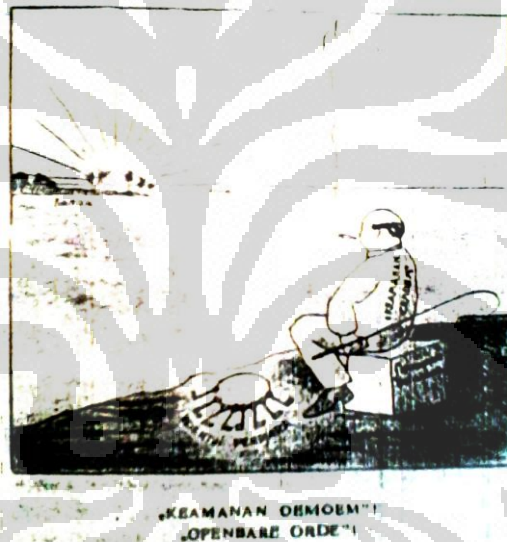
<sup>37</sup> *Kaum Intelektual* yang dimaksud, atau lebih tepat disebut *Kaum Semi-Intelektual*, adalah kelas menengah yang biasanya pandai berbahasa Belanda dan memakai bahasa itu sebagai bahasa pergaulan sehari-hari.

<sup>38</sup> *Karikatur dan Politik*, *Loc.cit.*, Hlm 61.



Surat kabar yang terbit pada masa penjajahan Belanda umumnya memuat tentang iklan-iklan atau reklame perdagangan. Peranan kartun editorial Indonesia dalam pers juga belum marak bergema media cetak. Banyak kalangan pers Indonesia yang masih awam dan belum mengerti peran sebuah kartun editorial.

Namun dalam sebuah majalah *D'Orient*, pernah terdapat sebuah artikel yang disertai gambar politik. Jelas sekali gambar tersebut adalah sebuah kritikan tentang orang Belanda yang harus mengeluarkan biaya 150 juta Gulden untuk memenjarakan para pemimpin Indonesia ke Banda dan Digul. Belanda juga harus berjaga-jaga dipantai dengan cemeti dan kunci raksasa. Dibawah gambar tersebut jelas tertulis nama sang kartunis, 'Soemini'<sup>39</sup>.



**Sumber:** Agustin Sibarani, 2001, *Karikatur dan Politik*, Jakarta: Garba Budaya, Hlm.153

Gambar politik yang dimuat dalam Majalah *D'Orient* merupakan karya Soemini dan Soemini tidak lain adalah Bung Karno. Bung Karno memakai nama samaran 'Soemini' untuk gambar-gambar politiknya. Seandainya gambar-gambar politik itu dilukis secara sempurna, dengan distorsi satiris yang jitu, maka Bung Karno sesungguhnya dapatlah disebut sebagai kartunis pertama Indonesia di zaman Penjajahan.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> *Ibid.*, Hlm. 82

<sup>40</sup> *Ibid.*, Hlm 82

Kartun politik bangsa Indonesia baru mulai marak pada masa pendudukan Jepang, yang dimuat di majalah propaganda pendudukan Jepang, *Djawa Baroe*. Pada masa pendudukan Jepang kartun tidak digunakan sebagai opini politik pribumi terhadap situasi dalam negeri, tetapi pada masalah luar negeri<sup>41</sup>. Meskipun kesenian pada masa pendudukan Jepang sangat dikontrol, namun masa itu merupakan awal pembelajaran berbagai hal yang nantinya bermanfaat dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Dengan bekerja pada kantor propaganda Jepang banyak seniman belajar mengenai fungsi dan peran kesenian, khususnya seni rupa.

Seiring dengan berjalannya waktu, kartun editorial Indonesia pun semakin berkembang dan semakin marak bermunculan kartunis Indonesia yang menerbitkan gambarnya di berbagai surat kabar Indonesia. Sebuah gambar dalam surat kabar memang cenderung mudah ditangkap pikiran seseorang, sedangkan artikel perlu dibaca terlebih dahulu dan dipikirkan secara aktif agar dapat memahami makna isinya.

Karena itu sebagai bahasa gambar, kartun lebih efektif dan efisien dalam merasuki pikiran seseorang. Ide atau pesan yang disampaikan kartun lebih cepat merasuk. Namun kartun memiliki kelemahan karena ia tidak menceritakan banyak hal. Suatu masalah yang difokuskan, disederhanakan dan diperas dalam sebuah kartun, tidak dapat terurai secara tuntas<sup>42</sup>.

Pengaruh kartun pun memang tidak secara langsung dapat mengubah opini masyarakat, hal ini dikarenakan sebagian besar penikmat kartun berasal dari kalangan yang memiliki minat kecil terhadap politik atau berasal dari kaum minoritas. Meskipun terdapat penikmat kartun yang posisinya dekat dengan dunia politik, besar kemungkinan untuk dapat mengubah pandangan seseorang terhadap suatu isu<sup>43</sup>. Dalam beberapa zaman, kartun seringkali digunakan sebagai alat 'pertarungan' politik. Dalam gambarnya tersirat pesan-pesan politik yang digunakan

<sup>41</sup> Priyanto Sunarto, 2005, *Metafora Visual Kartun Editorial pada Surat Kabar Jakarta 1950-1957*, Disertasi FSRD ITB Bandung. Hlm. 106

<sup>42</sup> T. Sutanto, Pamflet Politik Sulit Dihindari, dalam Prisma 1 Januari 1996, Hlm. 39.

<sup>43</sup> Haydon Manning and Robert Phiddian. *Censorship and the Political Cartoonist*. Konferensi Asosiasi studi politik Australia di Universitas Adelaide, 29 September-1 Oktober 2004. Hlm. 15-16. Dalam [http://www.adelaide.edu.au/apsa/docs\\_papers/Others/Manning.pdf](http://www.adelaide.edu.au/apsa/docs_papers/Others/Manning.pdf).

untuk menyampaikan opini ataupun ‘saling serang’ antar partai politik. Namun kartun editorial dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial yang efektivitasnya cukup berarti.

Misalnya, pada masa Soekarno, Kartun yang bermunculan di surat kabar umumnya bernada menghantam kolonialisme-imperialisme. Lalu pada sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an, ada istilah “Perang Kartun”<sup>44</sup>. Dalam artian, kartun dalam surat kabar digunakan untuk saling menyindir lawan politik. Terlebih surat kabar ketika itu dijadikan organ partai atau surat kabar yang berafiliasi dengan partai politik tertentu. Otomatis gambar-gambar yang diterbitkan mengusung visi dan misi surat kabarnya. Kekhasan kartun dalam surat kabar juga sejalan dengan kebijakan medianya. Jadi secara tidak langsung kartun editorial tersebut pun merupakan opini surat kabar yang bersangkutan. Misalnya kartun berikut ini:



*Harian Rakjat, 26 September 1955*

Kartun diatas dimuat dalam *Harian Rakjat* yang *notabene* surat kabar tersebut berhaluan ‘kiri’ sebagai corong partai PKI. Gambar ini dimuat ketika masa kampanye menjelang Pemilu 1955. Dalam gambar terdapat Tulisan “*Dibawah kekuasaan PSI-Masjumi sawah tidak ditraktor, Pilihlah PKI*”. Pernyataan ini jelas merupakan sindiran bernada frontal dan sinis yang ditujukan kepada lawan politiknya (PSI dan Masyumi).

Memasuki masa kekuasaan Soeharto, kartun dan karikatur di Indonesia hidup dan tumbuh dengan subur. Perkembangannya bahkan melibatkan perasaan ketimuran orang Indonesia dan mengikuti kaidah pancasila atau tidak menyinggung

<sup>44</sup> Alex Dinuth, *Kartun sebagai Cermin intelektualitas*, Prisma 1 Januari 1996, Hlm. 63

SARA. Kartun tidak lagi memunculkan sifat kesukuan tetapi menampilkan nasionalisme Indonesia. Namun Orde Baru pun lama kelamaan enggan melihat kelemahannya sendiri. Pada gilirannya, koridor penyampaian ekspresi lewat kartun juga semakin sempit. Tetapi bagi kartunis hal demikian menjadi sebuah tantangan menarik. Justru dalam keadaan yang sulit membuat kartunis menjadi kreatif<sup>45</sup>. Menurut seorang kartunis, Priyanto, karena posisi penguasa lebih kuat, kartun berupa retorika yang lebih halus. Kartunis tidak berani terang-terangan mengkritik pemerintah yang berkuasa<sup>46</sup>. Hal serupa juga dikemukakan oleh seorang kartunis Priyanto Sunarto:

*“...permainan kartun ditujukan untuk golongan yang tinggal di perkotaan dan berpendidikan baik. Yang menonjol masa itu, berkias digunakan untuk memperkeras olokan. Sikap demikian berbeda dengan kartun masa matang Orde Baru, yang umumnya lebih sembunyi-sembunyi, elipsis<sup>47</sup>, metafora<sup>48</sup>, samar, dan eufimism<sup>49</sup>. Sindiran kartun masa demokrasi parlementer sangat terbuka, tunjuk hidung, dan seringkali sinis.”<sup>50</sup>*

Bahkan membuat kartun politik selama masa kekuasaan Suharto menjadi sesuatu hal yang sangat berisiko. Siapapun yang berani mengkritik militer secara umum atau Jendral Suharto khususnya, akan mendapatkan konsekuensi serius seperti ditangkap atau dipenjarakan<sup>51</sup>.

Namun, kondisi jauh berbeda tentunya dialami saat memasuki masa Reformasi. Perkembangan Kartun editorial dalam surat kabar menjadi lebih bebas

<sup>45</sup> GM Sudarta, *Mengolah Kritik dengan Menghaluskan Kartun*, Prisma 1 Januari 1996, Hlm. 43.

<sup>46</sup> Agus Hamonangan, *Kartun Politik Bukan Lagi Satu-satunya Tema*, <http://www.mail-archive.com/forum-pembaca-kompas@yahoo.com/msg17217.html>, diakses pada hari Minggu, 18 Maret 2012 pukul 21.39 wib.

<sup>47</sup> **E.lip.sis/** élipis/ *n Ling* menggambarkan kalimat yg terputus-putus atau menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yg dihilangkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed.3, 2007, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 302

<sup>48</sup> **Eu.fe.mis.me/** éufemismé/ *n* ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar, yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed.3, 2007, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 310

<sup>49</sup> **Me.ta fo.ra/** métafora/ *n Ling* Pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed.3, 2007, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 739

<sup>50</sup> Priyanto Sunarto, TEMPO, 17 Agustus 2007. Hlm 108

<sup>51</sup> Richard Ostrom, *Risky Business: Three Political Cartooning Lessons from Indonesia during Suharto's Authoritarian Rule*, Political Science and Politics, Vol.40 No.2 (April 2007), Hlm. 297, Publisher: American Political Science Association. <http://www.jstor.org/stable/20451948>, diakses pada hari Rabu, 6 Februari 2012 pukul 17.15 wib.

dan kartun tetap menjadi menu utama media massa. Para kartunis juga lebih leluasa mengekspresikan segala pemikiran serta kritiknya. Kritik bagi pemerintah dikemukakan, usulan solusi permasalahan yang dihadapi pemerintah juga terkadang diungkapkan dalam visualisasi gambar kartun editorial, bahkan ada pula sindiran bagi kinerja pemerintah. Isu-isu yang diangkat juga sudah mulai berkembang, tidak hanya persoalan politik, namun juga ekonomi, pendidikan, sosial, kemiskinan, dan lain-lain.

### 2.3 Tinjauan Umum Surat Kabar *Kompas*

Pada awal tahun 1965, Letjen Ahmad Yani selaku Menteri/Panglima TNI AD menelepon rekannya sekabinet, Drs. Frans Seda. Yani melemparkan ide menerbitkan koran melawan pers Komunis. Frans Seda menanggapi ide itu, membicarakannya dengan Ignatius Josef Kasimo —sesama rekan di Partai Katolik— dan dengan rekannya yang memimpin majalah *Intisari*, Petrus Kanisius Ojong dan Jakob Oetama. Kedua nama terakhir inilah yang kemudian mempersiapkannya. Nama koran itu *Bentara Rakyat*, sebuah penegasan diri sebagai pembela rakyat yang sebenarnya. Berbeda dengan koran-koran dibawah nama Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memanipulasi nama rakyat<sup>52</sup>.

Pada awal Penerbitannya, Frans Seda pada waktu itu menjabat sebagai menteri perkebunan rakyat yang mengantarkan Jendral Ahmad Yani menyarankan bahwa supaya *Kompas* memberikan wacana untuk menandingi wacana PKI yang berkembang pada saat itu. Namun secara pribadi Jakob Oetama dan beberapa pemuka agama Katolik seperti Monsignor Albertus Soegijapranata, Ignatius Josef Kasimo tidak mau menerima begitu saja mengingat kontekstual politik, ekonomi, dan infrastruktur pada saat itu tidak mendukung<sup>53</sup>.

Tapi tekad Partai Katolik menerbitkan koran sudah final Ojong dan Oetama ditugaskan membangun perusahaan. Mulailah mereka bekerja mempersiapkan penerbitan koran baru, corong Partai Katolik. Tapi, suhu politik yang memanas saat

<sup>52</sup> Berawal dari Kantor Tumpangan dan Mesin Tik Pinjaman. Dalam Lembaran Brosur *Kompas* untuk Hari Pers Nasional 1989. Sumber: Litbang *Kompas*

<sup>53</sup> Jakob Oetama, *Mengantar Kepergian P.K Ojong*, *Kompas*, 2 Juni 1980.

itu, membuat pekerjaan ini tak mudah. Rencananya, koran ini diberi nama *Bentara Rakyat*. Menurut Frans Seda PKI tahu rencana itu, lantas dihadap, namun karena Bung Karno setuju jalan terus hingga izinnya keluar. Frans Seda mengacu pada Partai Komunis Indonesia adalah salah satu partai besar di Indonesia pada 1950-an dan 1960-an serta PKI memenangkan tempat keempat dalam pemilihan umum 1955<sup>54</sup>.

Untuk mendapatkan izin penerbitan ketika itu bukan perkara mudah. Selain aparat yang mengatur perizinan dikuasai PKI, penerbit juga harus bisa menunjukkan bukti bahwa sudah ada pelanggan sekurang-kurangnya 3.000 orang. Maka, Frans Seda kemudian menginstruksikan kepada anggota-anggota partai, guru-guru sekolah, dan anggota Koperasi Kopra Primer di Kabupaten Sikka, Ende Lio, dan Flores Timur untuk secepat mungkin mengirim daftar 3.000 pelanggan, lengkap dengan tanda tangan dan alamat<sup>55</sup>. Akhirnya beberapa orang utusan pergi ke pulau Flores untuk mendapatkan tanda tangan tersebut, karena memang Flores mayoritas adalah penduduk beragama Katolik.

Setelah tercapai 3000 tanda tangan, Frans Seda melaporkan rencana terbit dengan datang ke Istana Merdeka menemui Presiden Soekarno. Presiden bertanya nama koran yang akan terbit. Dijawab oleh Seda bernama *Bentara Rakyat*. Bung Karno menimpali, “*Sebaiknya koran baru itu diberi nama Kompas supaya jelas diterima sebagai penunjuk arah*”. Kemudian koran itu akhirnya dinamai *Kompas*. *Bentara Rakyat* dijadikan nama yayasan yang menerbitkannya<sup>56</sup>.

*Kompas* terbit pertama kali Senin, 28 Juni 1965 sebagai surat kabar mingguan dengan 8 halaman, lalu terbit 4 kali seminggu, dan dalam kurun waktu 2 tahun telah berkembang menjadi surat kabar harian nasional dengan oplah mencapai 30.650 eksemplar<sup>57</sup>. Pada bulan-bulan pertama *Kompas* diplesetkan sebagai *Kompt Pas Morgen* atau “*Kompas yang datang dikeesokan harinya*”, karena sering telat terbit. Oleh PKI namanya diplesetkan sebagai “*Komando Pastor*”, sebab tokoh-

<sup>54</sup> <http://repository.unhas.ac.id>, Hlm. 61, diakses pada tanggal 9 Maret 2012. Pukul 00.26 wib.

<sup>55</sup> “*Nama Kompas Pemberian Bung Karno*”, <http://lipsus.kompas.com/hut45/sejarahkompas>. diakses pada tanggal 9 Maret 2012. Pukul 17.42 wib.

<sup>56</sup> *Berawal dari Kantor Tumpangan dan Mesin Tik Pinjaman*, *Op.cit.*, Hlm.1

<sup>57</sup> *HISTORY*, dalam <http://www.kompasgramedia.com/aboutkg/history>, diakses pada tanggal 20 Maret 2012. Pukul 13.24 wib.

tokoh pendiri dan perintisnya berasal dari golongan katolik<sup>58</sup>. Meskipun bermula dari orang-orang Partai Katolik, sejak awal, PK Ojong dan Jakob Oetama sepakat minta agar harian Kompas tetap independen. Sebab, menurut keduanya, hanya koran yang independenlah yang akan bisa berkembang dari sisi bisnis maupun redaksionalnya.<sup>59</sup>

*Kompas* pernah dua kali dilarang terbit (dibredel). Pertama, pada tanggal 2 Oktober 1965, pemerintah melarang semua koran terbit, berkait dengan peristiwa G30S/PKI, termasuk *Kompas*. August Parengkuan dan Ponis Purba (Wartawan *Kompas*), berkeyakinan bahwa sebenarnya *Kompas* tidak perlu dilarang terbit. Alasannya, *Kompas* sudah mengecam pemberontakan G30S/PKI, dan dalam *lay out* sudah disiapkan bahwa *Kompas* edisi 2 Oktober juga memuat pernyataan sikap dari kepala Staf Angkatan Laut Laksamana RE Martadinata. Namun kenyataannya ketika itu *Kompas* termasuk yang dilarang naik cetak<sup>60</sup>.

Larangan itu kemudian dicabut, dan *Kompas* terbit kembali tanggal 6 Oktober 1965. Saat terbit kembali pada 6 Oktober 1965, tiras *Kompas* menembus angka 23.268 eksemplar. Zaman berganti, Soekarno diganti Jenderal Soeharto. Pada 1999, tiras *Kompas* mencapai angka lebih dari 600 ribu eksemplar per hari. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset *AC Nielsen* tahun 1999 menunjukkan pasar terbesar masih seputar Jakarta 46,77%, Bogor, Tangerang, dan Bekasi 13,02%, Jawa Barat 13,02%, Jawa Tengah, Yogyakarta 6,67%, Jawa Timur 2,04%, Sumatera 8,81%, Kalimantan 2,16%, dan Indonesia Timur 4,23%.<sup>61</sup>

Pembredelan kedua terjadi 21 Januari 1978. Ketika itu, *Kompas* bersama sejumlah koran lain dilarang terbit karena pemberitaan-pemberitaan *Kompas* Pra-Malari 1974 dianggap terlalu bersemangat dalam memberitakan aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa sehingga dianggap terlalu mendorong mahasiswa untuk meningkatkan unjuk rasa. Jika hal tersebut terus terjadi, suhu politik akan semakin

<sup>58</sup> *Kilas balik: Sekilas Sejarah Kompas*. Hlm.1. Sumber: Litbang *Kompas*

<sup>59</sup> *Jakob Oetama: meresapi komitmen keentrepreneuran*, <http://sosok.kompasiana.com/2011/10/17/jakob-oetama-meresapi-komitmen-keentrepreneuran/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2012. Pukul 15.40 wib.

<sup>60</sup> *Berawal dari Kantor Tumpangan dan Mesin Tik Pinjaman*, *loc.cit.*, Hlm.3

<sup>61</sup> *Seperempat abad Oom Pasikom*, Tempo 30 Juni 1990, Hlm. 80-81.

memanas dan dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas nasional. Namun akhirnya izin larangan terbit itu pun dicabut pada tanggal 5 Februari 1978<sup>62</sup>.

Kompas yang kini berkantor di Jakarta Pusat, saat pertama kali cetak memiliki tiras 4.800 eksemplar. Sejak tahun 1969 Kompas merajai penjualan surat kabar secara nasional. Pada tahun 2004, tiras hariannya mencapai 530,000 eksemplar. Bahkan khusus Kompas edisi minggu tirasnya mencapai 610.000 eksemplar. Dari sisi jumlah pembaca, koran ini mencapai 2,25 juta orang diseluruh Indonesia.<sup>63</sup>

Sewaktu lahir, sesuai dengan ketentuan perundangan pada waktu itu yang mengharuskan surat kabar berafiliasi ke salah satu organisasi politik, Kompas berafiliasi pada Partai Katolik. Namun sejak semula, terutama para perintis surat kabar ini berpendapat, visi kemasyarakatan koran haruslah terbuka. Visi dan sikap itu selain sesuai dengan keyakinan pimpinan, juga cocok dengan fungsi pers di Indonesia, yakni ikut mengembangkan saling pengertian dalam masyarakat yang majemuk. Hal itu sesuai dengan paham Pancasila.<sup>64</sup>

Moto “Amanat Hati Nurani Rakyat” dibawah logo Kompas menggambarkan visi dan misi bagi disuarakannya hati nurani rakyat. Kompas ingin berkembang sebagai institusi pers yang mengedepankan keterbukaan, meninggalkan pengkotakan, latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Ingin berkembang sebagai “Indonesia Mini”, karena dia sendiri adalah menjadi lembaga yang terbuka, kolektif dan ingin ikut serta dalam upaya mencerdaskan bangsa. Kompas ingin menempatkan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi, mengarahkan fokus perhatian dan tujuan pada nilai-nilai yang transenden atau mengatasi kepentingan kelompok. Rumus bakunya adalah “Humanisme Transendental”.<sup>65</sup>

<sup>62</sup> [http://repository.upi.edu/operator/upload/s\\_sej\\_022715\\_chapter4.pdf](http://repository.upi.edu/operator/upload/s_sej_022715_chapter4.pdf), diakses pada tanggal 20 Maret 2012. Pukul 14.17 wib.

<sup>63</sup> Cecep Rukendi, *Analisis wacana Pariwisata di Harian Kompas*, dalam Jurnal Kepariwisata Indonesia, Vol. 3 No. 2 Juni 2008, Hlm. 184, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/3208181193.pdf>, diakses 20 Maret 2012, pukul 15.25 WIB

<sup>64</sup> *Op.cit.*, Hlm.4

<sup>65</sup> *Kilas balik: Sekilas Sejarah Kompas, Op.cit.*, Hlm.1



*Visi* Kompas adalah menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat. Serta menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan. Sedangkan *Misi* Kompas adalah mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara profesional, sekaligus memberi arah perubahan (*Trend Setter*) dengan menyediakan dan menyebarkan informasi yang terpercaya. Kemudian, *Raison d'être* (fungsi/tujuan) *Kompas* adalah menjadi hati nurani rakyat, mencerdaskan bangsa, bertanggungjawab terhadap masyarakat (termasuk usaha mengurangi pengangguran). Kompas pun memegang nilai-nilai dasar seperti, menghormati individu (Manusia adalah asset utama, profesionalisme dalam semua aspek usaha, kerjasama dan sinergi, integritas dan kejujuran<sup>66</sup>. *Visi- misi* serta nilai-nilai tersebut diatas merupakan prinsip yang dipegang *Kompas* sehingga eksistensinya masih diakui dan tetap diperhitungkan sebagai surat kabar berskala nasional.

Berikut merupakan kronologi perjalanan Surat Kabar *Kompas*:

#### Kantor

Tahun	Keterangan
1965	Redaksi Pagi dan Tata Usaha berkantor di Pintu Besar Selatan 86-88. Redaksi Sore beralamat di Kramat Raya 45, agar dekat dengan PN Eka Grafika. Sementara administrasi dan sirkulasi ditangani PT Kinta. Karyawan Kompas berjumlah sekitar 20 orang.
1968	Redaksi Kompas pindah ke Pintu Besar Selatan No.80 yang juga tetap sempit, sementara jumlah karyawan membengkak menjadi 65 orang.
1969	Redaksi Kompas dan Intisari tetap menempati sebuah ruangan di Pintu Besar Selatan 80 Lt. 2, segedung dengan PT Kinta, Redaksi Sinar Harapan dan Majalah Djaja.
Januari	Bagian Iklan, sirkulasi, Keuangan dan Kontrol menempati gedung di Jl. Gajah Mada 104 yang dibeli atas nama Yayasan Intisari pada 3 Desember 1968.
1971	Gedung Percetakan Gramedia mulai dibangun.

<sup>66</sup> Sumber: Litbang Kompas

1972, Oktober	Redaksi Kompas dan Intisari pindah dari Jl. Pintu Besar Selatan ke Jl. Palmerah Selatan No. 28, ke sebuah rumah dengan dinding-dinding berlapis porselen seperti WC.
November	Gedung Percetakan Gramedia diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

### Percetakan

Tahun	Keterangan
1965, 28 Juni	Dicetak di percetakan <i>Eka Grafika</i> di Jl. Kramat Raya, dekat bioskop Rivoli. Biasanya menunggu giliran hingga <i>Koran Karya Bhakti</i> selesai dicetak.
2 Agust.	Pindah ke percetakan <i>Massa Merdeka</i> di Petojo Selatan. Namun nasibnya tetap sama, harus antre di belakang <i>Harian Angkatan Bersenjata</i> .
Oktober	Pindah lagi ke percetakan <i>PT Kinta</i> , setelah <i>Harian Suluh Indonesia</i> yang biasa dicetak di sana, dilarang terbit.
1972, 25 Nov.	Dicetak oleh PT Gramedia.
1997, 1 Sept.	Cetak jarak jauh (CJJ) di Bawen, Jateng dimulai.
1 Okt.	Mulai CJJ di Makassar
1999, 1 Des.	Mulai CJJ di Rungkut Surabaya
2001, 20 Juni	Mulai CJJ di Palembang
1 Nov.	Mulai CJJ di Surabaya
2002, 1 Sept.	Mulai CJJ di Banjarbaru (Kalsel)
2003, 28 Juni	Mulai CJJ di Medan
2009, 1 April	Mulai CJJ di Gianyar, Bali

Sumber: Litbang Kompas

### 2.4 Kartunis GM (Gerardus Mayela) Sudarta

Gerardus Mayela Sudarta atau biasa dikenal dengan panggilan GM Sudarta, adalah seorang kartunis yang lahir di Klaten, Jawa Tengah, 20 September 1945. Ia Menempuh pendidikan SD (1958), SMP (1962) dan SMA (1965), semuanya diselesaikannya di Klaten. Mengenyam pendidikan di ASRI, Yogyakarta sampai tingkat II (1965-1967)<sup>67</sup>.

<sup>67</sup> <http://www.cartoonesia.web.id/2011/05/sekilas-mengenai-gm-sudarta.html>. diakses pada tanggal 9 Maret 2012. Pukul 13.56 wib.

Sudarta aktif membuat komik dan gambar sejak duduk di bangku SMA untuk *Pos Minggu* dan *Suluh Indonesia* di Jakarta, serta *Penyebarkan Semangat* di Surabaya. Bersama Pramono dan Sapto Hadi, seorang kartunis, terpilih mendisain diorama Museum Nasional, Jakarta. Ia pun terlibat dalam mendisain Monumen Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya. Dan sejak tahun 1967 bergabung dengan harian *Kompas*<sup>68</sup>.

Di harian ini, ia menciptakan tokoh kartun yang menjadi salah satu ikon ibukota, *Oom Pasikom*. Yang dicitrakan sebagai sosok produk manusia zaman Belanda, tidak mewakili angkatan apapun, dan lebih hadir sebagai tokoh "atas angin", tidak berpihak kepada satu organisasi dan partai mana pun. Popularitas tokoh ini, sempat diangkat ke film dan disinetronkan. Sekalipun penggambarannya sinis, namun tetap toleran, inilah yang disebut kartun *tepo sliro*.

Lahir di kota kecil Klaten di Jawa Tengah, Sudarta sangat menyadari filosofi Jawa *ngono yo ngono ning ojo ngono* (apa yang Anda lakukan, lakukan, tapi tidak mengganggu orang lain dengan melakukan itu) dan *tepo seliro* (jangan melakukan sesuatu yang Anda tidak ingin dilakukan untuk diri sendiri)<sup>69</sup>. Meminjam istilah Franz Magnis Suseno, seorang budayawan, dalam buku *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Orang Jawa*, Filosofi yang dipegang Sudarta mengedepankan dua kaidah penting dalam relasi sosial manusia Jawa, yakni "prinsip kerukunan" dan "prinsip hormat". Kaidah pertama menentukan bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa agar terhindar dari konflik. Sedangkan kaidah kedua menuntut agar cara berkomunikasi dan membawa diri selalu disertai sikap hormat yang ditunjukkan terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Keduanya merupakan kerangka normatif yang menentukan semua interaksi dalam masyarakat Jawa. Tujuannya jelas, memelihara harmoni atau keselarasan. Di selinap dua prinsip tersebut, "prinsip humor" menjadi ruh penting pada tiap karya kartun Oom Pasikom.

<sup>68</sup> <http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/691>, diakses pada tanggal 9 Maret 2012. Pukul 13.58 wib.

<sup>69</sup> <http://kartunmartono.wordpress.com/semua-tentang-gm-sudarta/>. "GM Sudarta: Master of the art of criticism". diakses pada tanggal 9 Maret 2012. Pukul 14.19 wib.

Oom Pasikom menghadirkan berbagai gambaran penderitaan warga masyarakat ketika harus berhadapan dengan kekuasaan atau dengan birokrasi Indonesia. Kartun ini juga mengetengahkan kondisi ekonomi yang buruk serta sakit-sakit akibat kemiskinan lainnya. Sudarta pun kemudian mengangkat tema politik bagi karya kartunnya. Betapapun ini tak selalu mudah karena pada satu sisi ia setia dengan misi yang inheren pada kartun editorial –condong pada pihak yang miskin, lemah, dan tertindas–, namun disisi lain penguasa tak selalu bisa menerima kritik, bahkan yang disampaikan dengan gaya satire atau guyonan pun<sup>70</sup>. Dalam sebuah artikel yang berjudul “*GM Sudarta: Master of The Art of Criticism*”, ia mengatakan “*Orang di sini tidak suka dikritik. Oleh karena itu Anda harus melakukannya (red: kritik) sedemikian rupa untuk mencapai target, Daripada mengatakan 'pencuri', Anda bisa mengatakan` orang yang mengambil orang lain barang-barang tanpa izin*”<sup>71</sup>. Bagi Sudarta kartun adalah katup pembuka untuk tekanan sosial masyarakat. Ia dikenal sebagai kartunis yang hati-hati, dan jauh dari sarkastik, karena menurutnya kartun pun memiliki etika tersendiri<sup>72</sup>.

Pada tahun 1970-an, Sudarta pernah menyampaikan kartun yang keras kepada bapak Jakob Oetama, Pemimpin Redaksi *Kompas*, namun saat itu juga ketika beliau melihat kartun karya sudarta, beliau mengatakan, “*Tugas Pers bukan untuk mengubah pendapat orang lain, bukan untuk mendobrak atau revolusi, melainkan untuk menyampaikan misi perbaikan*”. Ucapan itulah yang sampai sekarang dipegang sebagai credo dalam pembuatan kartun Oom Pasikom.

Fakta bahwa banyak orang Indonesia tidak suka dikritik telah membuat Sudarta lebih kreatif dalam menyampaikan pesan dari karyanya, dalam apa yang disebut "cara Bahasa Indonesia mengkritik". Karena kemampuannya menyiasati tekanan sensor politik, dengan demikian ia selalu punya cara untuk menerobos

<sup>70</sup> Ninok Leksono, sebuah Kata Pengantar “*GM Sudarta dan ‘Tragedi yang tertawa’ itu*”. Dalam *40 Tahun Oom Pasikom: Peristiwa dalam Kartun tahun 1967-2007*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Hlm. xiv

<sup>71</sup> <http://kartunmartono.wordpress.com/semua-tentang-gm-sudarta/>. Diakses pada hari Minggu, 12 Maret 2012 pukul 19.55 wib.

<sup>72</sup> Heyder Affan, *40 Tahun Oom Pasikom: Kartun Tepo seliro*, disiarkan Radio BBC Siaran Indonesia, pada Rubrik Seni dan Budaya, Minggu, 8 Juli 2007, dalam <http://heyderaffan.multiply.com/journal/item/7>. Diakses pada hari Minggu, 12 Maret 2012 pukul 19.45 wib.

*status quo*, kartun editorial dari masa ke masa telah dilihat sebagai wahana untuk menyuarakan soal-soal sensitif seperti ketidakadilan politik dan ketidakberesan sosial-ekonomi.

Sebagai seorang kartunis, GM Sudarta pun beberapa kali menerima penghargaan seperti, Hadiah Adinegoro 1983 dan 1984, dan penghargaan Kalam Kencana dari Dewan Press. Karya Tulisnya antara lain: *Duileee* (1973), *Smiles in Indonesia* bersama OG Roeder (Gunung Agung, 1974), *Seni Lukis Bali dalam Tiga Generasi* (*Kompas*, 1975), *Indonesia 1967-1980: Kumpulan Kartun* (Gramedia, 1980)<sup>73</sup>.

Dia juga tercatat sebagai perintis berdirinya Bentara Budaya Jakarta, dan dalam kurun waktu yang lama menjadi Direktur Pengelolaanya. Terakhir, mengadakan Pameran Tunggal Seni Lukis di Jakarta, Agustus 2001. Dalam pamerannya tersebut, karyanya yang tetap memiliki konteks dengan suasana sosial yang kini sedang berkembang. Menurut Agus Dermawan T, seorang kritikus, karya GM merupakan perjuangan keyakinan bahwa sebuah kartun juga layak diangkat sebagai seni lukis.

## 2.5 Lahirnya Oom Pasikom

Sebagaimana surat kabar lain yang mempunyai tokoh maskot, seperti tokoh ‘*Mang Ohle*’ di harian *Pikiran Rakyat*, ‘*Mat Karyo*’ di *Suara Karya*, *Panji Koming*, ‘*Si Keong*’ di *Sinar Harapan*, ‘*Doyok*’ di *Pos Kota*, dan lain-lain, *Kompas* pun memiliki maskot khas yang biasa menghiasi kolom opini dalam penerbitan surat kabar.

Bersama dengan salah seorang redaksi yang sudah senior, J. Adisubrata, GM Sudarta merencanakan untuk menciptakan maskot bagi *Kompas*<sup>74</sup>. GM Sudarta membuat tokoh rekaan yang berpenampilan dengan jas tambalan dan topi baret. Bicaranya banyak menggunakan bahasa Belanda, karena menurutnya tokoh ini

<sup>73</sup> GM Sudarta, *40 Tahun Oom Pasikom: Peristiwa dalam Kartun tahun 1967-2007*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Hlm.271-272

<sup>74</sup> GM Sudarta, *Memilih Hidup Sebagai Kartunis: Perjalanan Menuju Dunia dibalik Cakrawala*, dalam *40 tahun Oom Pasikom: Peristiwa dalam Kartun Tahun 1967-2007*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Hlm. 262

merupakan produk zaman penjajahan Belanda. Seorang yang tidak mewakili Angkatan' 45, atau Angkatan' 66, atau sudah terlalu tua untuk digabungkan ke angkatan Orde Baru maupun Era Reformasi. Jadi dia lebih sebagai manusia di atas angin, artinya tak berpihak kepada organisasi maupun partai apapun.

Topi baret membuatnya berpenampilan internasional, dari pada kopiah atau blangkon yang mencerminkan golongan atau kesukaan. Sedang jas walaupun tambalan, menunjukkan bahwa kita ini lebih senang berpakaian resmi, daripada berbaju batik, demi gengsi. Sedangkan raut wajahnya tidak sengaja diambil dari raut wajah pak Adisubrata.



Sumber: GM Sudarta. 2007. *40 Tahun Oom Pasikom: Peristiwa dalam Kartun Tahun 1967-2007*. Jakarta: PT Gramedia. Hlm. 262

Dari pencarian itulah, kemudian lahirnya seorang toko karikatur yang diberi nama Pasikom muncul dari pengucapan secara berulang-ulang 3 kali... *si Kompas, si Kompas, si Kompas*, lalu muncullah nama itu, kemudian panggilan 'Oom' sebagai paman, karena orangnya sudah setengah tua. Sejak itulah awal munculnya tokoh *Oom Pasikom*.

Semula Oom Pasikom, yang mulai tampil pada bulan April 1967, lebih banyak sebagai humor belaka, tanpa kritik sosial. Tokoh *Oom Pasikom* pun ikut

mengalami kemajuan teknik percetakan, dari mula-mula menggunakan teknik “cetak tinggi” dengan menggunakan klise timah, ke percetakan *offset* yang mulai digunakan Kompas pada tahun 1972. Dengan teknik lama, kemampuan menggambar terbatas, hanya dengan garis-garis sederhana. Bandingkan dengan Oom Pasikom abad ke-21 yang kadang tampil dengan arsir, dengan bagian gambar penuh gradasi, satu kali dengan montase<sup>75</sup>, lain hari dengan bayangan foto<sup>76</sup>.

Oom Pasikom secara perlahan berubah menjadi *editorial cartoon*. Menjelang Pemilu 1971, *Oom Pasikom* muncul di Kompas. Ia tampil berjalan di bawah curah hujan. Sewaktu menjilat air hujan, ia berujar air hujan terasa kecap, padahal musim kampanye belum tiba. Komentar itulah yang membuat marah golongan partai besar ketika itu, dan hal itu menyadarkan Sudarta bahwa ia bisa berbuat sesuatu dengan kartun<sup>77</sup>

<sup>75</sup> **Mon•ta•se/** montase/ *n* komposisi gambar yg dihasilkan dr pencampuran unsur beberapa sumber, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed.3, 2007, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 745

<sup>76</sup> Ninok Leksono, Sebuah Kata Pengantar, *GM Sudarta dan “Tragedi yang Tertawa” itu*, dalam 40 tahun *Oom Pasikom: Peristiwa dalam Kartun Tahun 1967-2007*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Hlm. xv

<sup>77</sup> *Ibid.*, Hlm. 263

## BAB III

### Visualisasi Realitas Pemilu Orde Baru (Pemilu 1971-1997) dan Masa Reformasi (Pemilu 1999) dalam Kartun Editorial *Oom Pasikom*

#### 3.1 Pemilihan Umum

Dalam perjalanan berdemokrasi sampai dengan saat ini (tahun 2012), Indonesia telah menyelenggarakan sepuluh kali Pemilihan Umum. Pemilihan umum menjadi salah satu bentuk implementasi dalam mewujudkan kehidupan berdemokrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat seorang pakar Ilmu Politik, Prof. Miriam Budiardjo, yang menyatakan bahwa bagi sebuah negara demokrasi terdapat beberapa hal yang mutlak keberadaannya, yaitu mengharuskan adanya Pemilihan Umum (Pemilu), adanya rotasi atau kaderisasi kepemimpinan nasional, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri, adanya representasi kedaulatan rakyat melalui kelembagaan parlemen yang kuat dan mandiri, adanya penghormatan dan jaminan hak asasi manusia, adanya konstitusi yang memberikan jaminan hal-hal tersebut berjalan<sup>78</sup>.

Pemilu merupakan salah satu prinsip demokrasi yang harus dijalankan dan tidak bisa dilepaskan dari sebuah negara demokrasi, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya secara aktif dan keikutsertaannya dalam pemerintahan melalui mekanisme Pemilu. Pemilu bertujuan sebagai sarana untuk memobilisasikan dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Pemilu pun terkadang disebut sebagai ‘Pesta Demokrasi’ dalam arti bahwa rakyat berkesempatan merayakan kebebasannya dalam penyelenggaraan demokrasi untuk memilih seorang figur yang dianggapnya pantas menjadi seorang pemimpin. Melalui Pemilu, keikutsertaan rakyat dalam pemilihan calon wakil rakyat dipandang sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pemerintahan. Namun pada kenyataannya, Pemilu selama masa Orde Baru dilangsungkan hanya untuk kepentingan rezim yang berkuasa, bukan ditujukan untuk menerapkan dan mewujudkan prinsip dan nilai-

---

<sup>78</sup> Prof. Miriam Budiardjo. 1992. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cet.4., Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.Hlm.60.



nilai demokrasi, melainkan hanya untuk melegitimasi kekuasaan belaka. Proses Pemilu pun dikontrol dan direayasa sedemikian rupa oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi regenerasi atau rotasi kepemimpinan politik, apalagi perubahan yang mendasar bagi demokrasi. Berbagai mekanisme dan aturan main yang dibentuk pun tidak menciptakan ruang bagi para kontestan untuk bersaing secara *fair* dan seimbang. Misalnya penerapan ‘fusi partai’, dengan penggabungan partai politik ini berarti kompetitor menjadi lebih sedikit dan menjadi lebih mudah dikendalikan. Belum lagi berbagai aksi kecurangan dan intimidasi yang menjadi pemandangan umum pemilu-pemilu Orde Baru. Padahal dalam sebuah negara demokrasi, pemilu seharusnya menjadi suatu proses politik yang menjadi kunci terciptanya demokrasi.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “*demos*” (rakyat) dan “*kratein*” (memerintah), yang maknanya adalah cara memerintah negara oleh rakyat. Sehingga demokrasi diartikan secara sederhana adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah<sup>79</sup>.

Indonesia memiliki serangkaian panjang pengalaman berdemokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu. Proses penyelenggaraan Pemilu pun tak lepas dari sorotan media yang menjadi salah satu pilar demokrasi. Pers memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi (sosialisasi) mengenai proses dan ketentuan Pemilu, kinerja peserta pemilu, serta hak dan kewajiban pemilih. Melalui peran tersebut pers ikut aktif melakukan pendidikan politik, yaitu membantu masyarakat menentukan pilihan politik mereka. Selain itu, pers juga berperan penting dalam melakukan kontrol atas pelaksanaan pemilu.

Berbagai dinamika dan perjalanan Pemilu di Indonesia di pun direkam dalam sebuah kartun editorial di beberapa surat kabar. Kartun editorial yang cukup terkenal dan produktif dalam menghasilkan karya-karya kartun editorial adalah ‘*Oom Pasikom*’ yang dimuat di *Kompas* karya kartunis GM Sudarta. *Oom Pasikom* adalah kartun editorial yang banyak menyoroti isu politik khususnya perihal Pemilu di

---

<sup>79</sup> Koentjoro Poerbopranoto. 1960. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Surabaya: Penerbitan Universitas Airlangga, Hlm.14

Indonesia. Kartun editorial *Oom Pasikom* muncul pertama kali pada tahun 1967 dan mulai menyoroti Pemilu sejak masa Pemerintahan Soeharto tahun 1971.

Namun sebelumnya, kartun editorial pun telah mewarnai dunia surat kabar sejak Pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. Tahun 1950-an ketika itu adalah masa Demokrasi Liberal, dimana terdapat ruang seluas-luasnya dalam menyampaikan pendapat. Dinamika yang sama juga terlihat pada berbagai media, terutama surat kabar yang terbit pada masa itu. Pada masa Demokrasi Liberal, partai-partai mengkomunikasikan opini dan menyebarkan pengaruh melalui surat kabar terbitannya, yang dikenal sebagai surat kabar partisan atau surat kabar corong partai<sup>80</sup>. Kebanyakan media cetak pada waktu itu menjadi organ partai, ideologi, aliran politik atau golongan primordial<sup>81</sup>. Surat kabar partai pada masa itu antara lain adalah *Abadi* (Masjumi), *Suluh Indonesia* (PNI), *Harian Rakjat* dan *Bintang Timur* (PKI), *Duta Masyarakat* (NU), dll<sup>82</sup>.

Beberapa surat kabar menggunakan kartun editorial sebagai media penyampai opini dan kritik. Misalnya sebagai media kampanye ketika mendekati masa Pemilihan umum 1955. Beberapa surat kabar, baik surat kabar partisan (partai) maupun independen (non partai), memanfaatkan kartun editorial untuk menyampaikan opini. Seperti *Harian Rakyat* yang menjadi media kampanye PKI.

Suasana politik ketika menjelang Pemilu 1955 menjadi tidak sehat karena banyak surat kabar yang saling mencurigai, saling ingin menang sendiri, saling menjelekkkan dan membenci dan bermuara pada sikap saling memusuhi. Kondisi ini memicu sikap emosional-konfrontatif<sup>83</sup>. Hal ini terlihat ketika *Harian Rakjat* (PKI) menyindir lawan politiknya Masyumi dan PSI. Dalam kartun editorialnya, *Harian Rakyat* menyinggung persoalan “Gunting Syafrudin”, yaitu kebijakan moneter yang diterapkan oleh Syafrudin Prawiranegara seorang tokoh Masyumi yang menjabat sebagai menteri keuangan pada Kabinet Hatta II. PKI dalam hal ini menentang

<sup>80</sup> Simanjuntak, Togi. 1998. *Wartawan Terpasung*. Jakarta: ISAI. Hlm. 22

<sup>81</sup> Alfian. 1993. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 33

<sup>82</sup> Edward C Smith, 1983, *Pembreidelan Pers di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Pers. Hlm. 94-95

<sup>83</sup> *Op.cit.*, Alfian, Hlm. 32

kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh kabinet yang didominasi oleh anggota PNI dan Masyumi. Lihat gambar berikut:



*Harian Rakyat*, 25 September 1955

Maraknya kartun editorial yang beredar di surat kabar ketika itu cukup memberikan gambaran bahwa sebuah kartun pun memiliki peran penting dalam menyampaikan kritik dan menyebarkan pengaruh ideologi partai tertentu. Berbagai kemelut politik serta dinamika perjalanan Pemilu 1955 tak sempat terekam dalam kartun editorial *Oom Pasikom* karena kartun editorial *Kompas* ini baru muncul pada tahun 1967. Namun *Oom Pasikom* secara penuh menyoroti dan merekam perjalanan Pemilu masa Orde Baru dan Pemilu masa Reformasi khususnya tahun 1999 dan 2004 yang menjadi fokus penelitian ini.

### 3.1 Pemilu Masa Orde Baru

#### 3.1.1 Pemilu 1971

Berakhirnya masa kekuasaan Soekarno menandai era baru dalam pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Jendral Soeharto. Di masa pemerintahan baru ini, budaya Demokrasi Pancasila memberikan sebuah harapan baru bagi terciptanya kebebasan berserikat, berkarya, berkumpul, dan menghargai adanya perbedaan dalam berpendapat di berbagai bidang, termasuk dalam berpolitik.

Dalam visualisasi *Oom Pasikom* terlihat penggambaran beberapa orang yang sedang menaiki mobil dan berjalan menuju arah 'Demokrasi' dengan 'Pemilu' yang terpasang sebagai penunjuk arah. Namun jalannya terlihat tidak rata. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia perlu

melewati jalan yang penuh rintangan tidak mudah dalam melewati proses Pemilu yang menjadi salah satu cara untuk menuju kehidupan berdemokrasi<sup>84</sup>. Dalam penggambaran *Oom Pasikom* yang lain juga Terlihat seorang anak kecil dengan raut wajah ketakutan melihat bayangan hitam yang menghantuinya ketika sedang berjalan menuju papan arah yang bertuliskan “*Pemilu+Pembangunan*”. Gambaran ini menunjukkan adanya ketakutan dan kekhawatiran adanya sisa-sisa mental lama seperti *korupsi, politik kekuatan, dan hukum rimba* yang disimbolkan dengan bayangan hitam saat menuju Pemilu 1971<sup>85</sup>.

Ketika Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Soekarno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya menyelenggarakan Pemilu seperti yang diamanatkan oleh MPRS. Sebaliknya ia berusaha melakukan ‘pelemahan’ terhadap Parpol-Parpol yang ada atau mengeleiminasi kekuatan-kekuatan yang dianggap berpotensi mengganggu kekuasaannya. Sebagai contoh Pemerintah tidak mengizinkan berdirinya kembali Partai Masyumi dan Partai Demokrasi Islam yang dipimpin oleh Moh. Hatta. Sebaliknya pemerintah Orde Baru bersikap toleran terhadap partai-partai Islam yang dinilai moderat seperti NU (*Nahdatul Ulama*) dan juga mendukung berdirinya partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang didirikan pada 20 Februari 1968 yang dipimpin oleh orang-orang yang dinilai dapat bekerjasama dengan pemerintah Orde Baru. Selain menjalin kerjasama, Soeharto juga membesarkan Ormas yang ada yang kesetiaannya dapat diandalkan seperti Sekretariat bersama Golkar (Sekber-Golkar) yang lebih dikenal dengan Golkar<sup>86</sup>.

Menurut Tap MPRS No.IX/MPRS/1966, Pemilu selambat-lambatnya harus diselenggarakan pada tahun 1968. Tetapi karena berbagai pertimbangan politik dan keamanan, Pemilu baru dapat diselenggarakan pada tahun 1971. Lembaga Pemilu sebagai pelaksana Pemilu dibentuk dan ditempatkan dibawah

---

<sup>84</sup> Lihat Lampiran 1

<sup>85</sup> Lihat Lampiran 2

<sup>86</sup> Anhar Gonggong, 2005, *Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi*, Departemen Komunikasi dan Informatika. Hlm. 149

koordinasi Departemen Dalam Negeri, sedangkan peserta Pemilu ditetapkan oleh presiden melalui surat Keputusan Presiden No.23 tanggal 23 Mei 1970<sup>87</sup>. Berdasarkan surat keputusan itu, jumlah partai politik yang boleh ikut serta dalam Pemilihan Umum berjumlah sembilan, yaitu: NU, Parmusi, PSII, Perti, PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Khatholik, Partai Murba, dan IPKI ditambah dengan Golkar. Golkar pada waktu itu mendeklarasikan diri sebagai Organisasi non-politik, walaupun dalam praktiknya adalah Partai Politik.

Berdasarkan pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka dalam pelaksanaan Pemilu 1971 pun memegang asas LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia), yaitu<sup>88</sup>:

- 1) **Langsung**, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya.
- 2) **Umum**, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih.
- 3) **Bebas**, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nuraninya, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.
- 4) **Rahasia**, artinya bahwa pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya tanpa perantara, dan tanpa tingkatan.

Dalam proses Pemilu juga melalui beberapa tahapan, yaitu tahap awal / persiapan, tahap kampanye, dan tahap akhir, yaitu penghitungan dan penetapan hasil pemilu. Berbagai visualisasi selama kampanye pemilu 1971 tergambar dalam beberapa kartun editorial *Oom Pasikom*.

Misalnya dalam *Oom Pasikom* edisi 3 Oktober 1970 menggambarkan beberapa orang yang sedang berkampanye dengan memegang poster dan meminta orang yang sedang lewat untuk memilih partainya. Lalu dalam *Oom*

<sup>87</sup> *Ibid.*, Hlm. 149

<sup>88</sup> [http://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1c.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf) diakses pada hari Rabu, 2 Mei 2012 pukul 12.32 wib.

*Pasikom* edisi 20 Maret 1970, menggambarkan orang yang sedang berkampanye sambil berkata “*Pilihlah aku*”, ia tidak peduli dengan kondisi sekitarnya yang banjir, ia tetap berpromosi untuk memilih dirinya. Seruan untuk memilih salah satu partai dengan jargon anti sukuisme, anti golonganisme, dan lain-lain juga tergambar dalam *Oom Pasikom* edisi 22 Februari 1971. Beberapa gambaran tersebut menandakan gencarnya seruan kampanye menjelang Pemilu 1971<sup>89</sup>.

Kemudian dalam edisi 5 Maret 1971 terlihat pula seseorang pasien berpeci yang sedang berbaring di tempat tidur. Orang tersebut menyimbolkan Indonesia yang sedang terserang ‘demam Pemilu’ dan disebelahnya terlihat tulisan Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang disimbolkan sebagai seorang dokter yang akan mengobati pasien. Memang dalam suasana menjelang pemilu, Kopkamtib dalam hal ini bertugas untuk menjaga stabilitas keamanan negara menjelang Pemilu di Indonesia. Beberapa kartun selanjutnya menggambarkan sindiran kampanye yang mengarah ke salah satu peserta Pemilu berlambang pohon beringin. Terlihat dalam *Oom Pasikom* seseorang yang sedang bernyanyi menyebutkan “*Pohon bering....*”, maksudnya adalah ‘pohon beringin’ (Lambang Golkar) namun tak diselesaikan ucapannya. Penggambaran ini menandakan adanya sedikit ketakutan untuk menyebutkan langsung objek sasaran yang dimaksud.

Dalam hal kebebasan memilih, kartun *Oom Pasikom* memunculkan kesan lucu dan menyindir, karena menganalogikan hal politik ke kisah asmara yang disimbolkan oleh seorang wanita yang sedang jatuh cinta kepada seorang pria, namun ketika sang pria memutuskan untuk tidak memilihnya, sang wanita memukulinya sampai *babak belur*. Dalam edisi 5 Juni 1971 juga tertulis “*Pilihlah aku, kalau tidak saja retool!*”. Visualisasi yang digambarkan dalam beberapa *Oom Pasikom* ini secara tidak langsung menandakan adanya tindak kekerasan dan intimidasi terhadap pemilih yang akan menggunakan hak suaranya saat Pemilu 1971.

---

<sup>89</sup> Lihat Lampiran 3

Setelah ketegangan masa kampanye usai, akhirnya perolehan suara Pemilu 1971 menetapkan Golkar sebagai pemenang dan mendapat 236 kursi (62,82%), NU: 58 kursi(18,68%), Parmusi: 24 kursi (5,36%), PNI: 20 kursi (6,93%), PSII: 10 kursi (2,39%), Parkindo: 7 kursi (1,34%), Katolik: 3 kursi (1,10%). Perti, IPKI, Murba mendapat perolehan suara kurang dari 1%. Namun berdasarkan hasil penghitungan suara secara keseluruhan, ternyata banyak diantara daftar pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya, atau biasa disebut Golput<sup>90</sup> (Golongan Putih). Menurut data Litbang harian *Kompas*, jumlah Golput dalam Pemilu 1971 sebanyak 6,67%<sup>91</sup>. Isu golput ini pun divisualisasikan dalam *Oom Pasikom* dengan kertas kosong tanpa gambar, dan disampingnya berdiri seseorang berkata “...ini bukan kampanye GOLPUT. Saja tjuma sedang kehabisan bitjara”<sup>92</sup>. Pernyataan klarifikasi ini mengandung pesan tersamar, tidak *to the point*, dan terkesan takut-takut untuk mengungkapkan ‘kampanye golput’. Tabel Perolehan suara Pemilu 1971 dapat dilihat di lampiran 5<sup>93</sup>.

### 3.1.1 Pemilu 1977

Setelah Pemilu 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan. Imbauan mengenai Pemilu 1977 tervisualisasi dalam kartun *Oom Pasikom* yang mengingatkan bahwa Pemilu 1977 sudah dekat<sup>94</sup>. Dalam gambar terlihat seseorang yang dengan optimis berkata tentang harapan pemilu yang demokratis jujur, adil, dan bersih. Namun selanjutnya ia menambahkan “...toh saya tidak akan menang”. Disini terlihat nada pesimis akan peluang kemenangannya dan nampak ia bisa memprediksikan siapa yang akan menang dalam Pemilu 1977.

<sup>90</sup> *Golput* adalah orang yang secara sadar tidak menggunakan hak pilihnya karena berpendapat bahwa pemilu seperti yang kita laksanakan dewasa ini tidak relevan, jadi mereka termasuk kelompok yang tidak ke TPS (Tempat Pemungutan Suara). Lihat Prof. Miriam Budiardjo, 1994, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 265.

<sup>91</sup> <http://kanalpemilu.net/?q=node/80> dalam *Jumlah Golput pada Pemilu 1955-2004*, diakses pada hari Rabu, 9 Mei 2012 pukul 14.25 wib.

<sup>92</sup> Lihat Lampiran 4

<sup>93</sup> Lihat Lampiran 5

<sup>94</sup> Lihat Lampiran 6

Pemilu 1977 ini memiliki perbedaan dengan pemilu sebelumnya, yaitu pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973. Sembilan partai yang ada berfusi kedalam dua partai baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Empat partai Islam yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Perti bergabung dalam PPP. Sementara itu lima partai non-Islam, yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Khatolik, Partai Murba, dan IPKI bergabung dalam PDI<sup>95</sup>. Visualisasi mengenai fusi partai ini tergambar dalam *Oom pasikom* edisi 14 April 1976<sup>96</sup>. Terlihat seseorang dengan wajah tersenyum memegang papan bertuliskan 'PDI' yang sedang bersalaman, menandakan sebuah kesepakatan adanya fusi partai.

Penyederhanaan partai politik memiliki alasan tertentu, seperti pada kasus 'Demokrasi Liberal'. Pada masa itu, banyaknya penyederhanaan partai ternyata tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya malah menambah permasalahan. Penyebabnya bukan saja karena persaingan antar-parpol, melainkan juga persaingan di dalam tubuh parpol, antara para pemimpinnya yang sering memicu munculnya krisis bahkan perpecahan. Akibatnya peranan dan fungsi mereka dalam memantapkan stabilitas politik yang sedang dibangun oleh pemerintah Orde Baru semakin lemah. Atas dasar itu, pemerintah berpendapat perlu adanya penyederhanaan partai, sebagai bagian dari pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Awalnya banyak parpol yang menolak gagasan itu, karena dinilai telah merampas hak asasinya, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945. Namun tekanan pihak penguasa menyebabkan mereka tidak punya pilihan lain.

Pemungutan suara Pemilu 1977 terlaksana pada tanggal 2 Mei 1977. Sebelumnya terdapat proses dimana partai politik dan Golkar diizinkan berkampanye selama dua bulan dimulai dari tanggal 24 Februari 1977-24 April 1977<sup>97</sup>. Minggu terakhir sebelum tanggal pemungutan suara direncanakan

---

<sup>95</sup> Mahrus Irsyam, et.al, 1985, *Sejarah Kepartaian di Indonesia*. Jakarta: IDSN, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Hlm. 60

<sup>96</sup> Lihat Lampiran 7

<sup>97</sup> William Liddle, 1992, *Pemilu-Pemilu Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, Hlm. 65



sebagai ‘minggu tenang’. Visualisasi mengenai minggu tenang tergambar saat tokoh *Oom Pasikom* berjalan mengendap-ngendap di malam hari sambil berkata, “*Ssstt...minggu tenang!*”<sup>98</sup>. Ketenangan disini disimbolkan dengan malam hari yang identik dengan suasana sunyi-senyap. Minggu ini memang umumnya digunakan para pemilih untuk mempertimbangkan pilihan mereka setelah melihat visi misi dan program kerja yang didengungkan saat masa kampanye.

Pada dasarnya inti dari pemilihan Umum 1977 adalah mempertahankan dominasi dan berusaha melegitimasiannya melalui proses yang seolah-olah demokratis. Masa-masa kampanye tergambar dalam *Oom Pasikom* yang menganalogikan pemilu dengan ‘*Kontes Miss Pemilu*’. Pemilu dalam hal ini tak ubahnya sebuah panggung yang menampilkan sosok-sosok yang menarik tampak luarnya. Dalam kartun editorial tersebut tergambar 3 wanita yang masing-masing terpasang nomer 1,2,3 yang menjadi lambang dari jumlah peserta pemilu<sup>99</sup>. Ketiganya tampil seolah menunjukkan kecantikannya. Gambaran ini menyimbolkan bahwa ketiga wanita tersebut masing-masing mewakili peserta pemilu yang sedang berkampanye.

Perihal dana kampanye, jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya tahun 1971, dengan lebih 54 juta pemilih, pemerintah memberi plafon anggaran Rp 17 milyar. Pemilu 1977, dengan pemilih 64 juta, anggaran meningkat menjadi Rp 60 milyar<sup>100</sup>. Besarnya dana kampanye ini tergambar dalam kartun editorial *Oom Pasikom* yang menyindir dengan tulisan “*Harga sebuah Demokrasi memang mahal!, dan Kalau Boleh, Pak...saya ingin ikut ngedaftar jadi pemborong pembikinan kotak suara!*”<sup>101</sup>. tokoh *Oom Pasikom* disini seolah tergiur dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk dana kampanye, sampai-sampai ia ingin menjadi pemborong kotak suara agar uang tersebut juga masuk kantongnya.

<sup>98</sup> Lihat Lampiran 8

<sup>99</sup> Lihat lampiran 9

<sup>100</sup> <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1987/03/28/NAS/mbm.19870328.NAS29262.id.html> dalam “*Sebuah pesta tanpa selimut gula ini dia kampanye*”, diakses pada hari Rabu, 2 Mei 2012 pukul 15.11 wib.

<sup>101</sup> Lihat Lampiran 10

Imbauan mengenai pencoblosan tanggal 2 Mei 1977 pun tergambar dalam *Oom Pasikom* edisi 30 April 1977<sup>102</sup>. Dalam gambar terlihat seorang ibu dengan bijak menasihati tokoh *Oom Pasikom* yang sedang bingung agar bersikap tenang, berpikir, dan memilih calon yang benar. Hasilnya pemilu 1977 pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen<sup>103</sup>. Keadaan ini secara langsung ataupun tidak terlihat bahwa kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Kondisi setelah masa penghitungan suara ini tergambar dalam *Oom Pasikom* edisi 4 Mei 1977<sup>104</sup>. Terlihat tokoh *Oom Pasikom* yang merasa lega karena sudah menggunakan hak suaranya. Namun rasa leganya kemudian diikuti rasa kekhawatiran akan realisasi dari janji-janji yang dinyatakan semasa kampanye. Tabel Perolehan suara Pemilu 1977 dapat dilihat di lampiran 13<sup>105</sup>.

### 3.1.3 Pemilu 1982

Pemilu 1982 merupakan pemilu ketiga yang diselenggarakan pada pemerintahan Orde Baru. Pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982. Pemilu 1982 ini secara teknis hampir sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu berpedoman dengan asas LUBER.

Kemudian proses penyelenggaraannya pun hampir serupa, mengacu pada Peraturan Pemerintah No.37/1990, yaitu pemilu harus melalui berbagai tahap seperti Masa persiapan pemilu, masa kampanye pemilu, pemungutan Suara, Kegiatan pengawasan, penghitungan suara dan pengumuman hasil suara, penetapan hasil pemilu, dan pengambilan sumpah janji badan anggota Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat. Masa-masa kampanye tergambar dalam beberapa kartun editorial *Oom pasikom*<sup>106</sup>. Dalam kompas edisi 16 Maret 1982, terlihat tiga kontestan yang sedang bernyanyi sambil bermain alat musik. ‘nyanyian’ ini menganalogikan jargon-jargon kampanye dimana para calon peserta pemilu tampil untuk menebar janji-janjinya, visi-misi, dan program kerjanya. Lalu kartun edisi 24 April 1982 tergambar tiga orang yang terlihat

<sup>102</sup> Lihat Lampiran 11

<sup>103</sup> [http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=41](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41) dalam “Pemilu 1977-1997” diakses pada hari Rabu, 2 Mei 2012 pukul 01.40 wib.

<sup>104</sup> Lihat Lampiran 12

<sup>105</sup> Lihat Lampiran 13

<sup>106</sup> Lihat Lampiran 14

telah menetapkan pilihan dengan menyebutkan pilihan A,B,C..., namun tokoh *Oom Pasikom* berkata “*Pilihanku L.U.B.E.R!*”. Pernyataan ini terkesan tokoh *Oom Pasikom* menunjukkan dirinya sebagai tokoh netral dengan tidak memihak pada salah satu kubu.

Penggambaran mengenai awal kampanye ini terlihat dalam *Oom Pasikom*, dimana terdapat tiga orang yang mengenakan baju bernomorurut partai masing-masing yang akan mengadakan lomba lari. Nomor urut 2 (Golkar) terlihat sangat santai seolah yakin akan menang, sedangkan dua orang lainnya dalam keadaan ‘bersiap’<sup>107</sup>. Penggambaran ekspresi wajah dan sikap yang ditampilkan menandakan kesiapan masing-masing peserta Pemilu dalam menghadapi persaingan politik. Hal serupa terlihat dalam penggambaran *Oom Pasikom*, dimana terdapat seseorang yang sedang mengarahkan busurnya ke arah papan putaran yang diputar oleh LPU (Lembaga Pemilihan Umum), dan hasilnya busur menancap pada papan nomor 2 (Golkar). Penggambaran ini terkesan bahwa tokoh *Oom Pasikom* seolah-olah sedang memprediksikan siapa yang akan menang dalam Pemilu 1982.<sup>108</sup>

Pada masa kampanye pemilu 1982 ini pun sempat diwarnai aksi ketegangan antara massa Golkar dan massa PPP. Tepatnya pada tanggal 18 Maret 1982, pada mulanya kampanye masih berjalan tenang. Massa Golkar yang menguningkan Lapangan Banteng masih menunggu kedatangan juru kampanye Golkar, Ali Murtopo. Tapi situasi berubah seketika pada saat massa beratribut PPP melintasi Lapangan Banteng. Saling cela dan lempar batu antara massa Golkar dengan massa PPP pun semakin menjadi-jadi. Mereka terlibat dalam baku hantam. Insiden yang kemudian dikenal sebagai *Insiden Lapangan Banteng*<sup>109</sup> itu secara cepat meluas ke beberapa titik di Jakarta. Dalam situasi ini *Oom pasikom* memvisualisasikan bagaimana seharusnya kampanye pemilu berlangsung, hal ini digambarkan dalam bentuk 3 orang dengan ekspresi wajah bahagia (mewakili masing-masing partai yaitu PPP, Golkar, dan PDI) yang

<sup>107</sup> Lihat Lampiran 15

<sup>108</sup> Lihat Lampiran 16

<sup>109</sup> <http://politik.vivanews.com/news/read/4926-perang-batu-di-lapangan-banten-1-2>, oleh Bonnie Triana, “Perang Batu di Lapangan Banteng”, diakses pada hari Rabu, 2 Mei 2012 pukul 23.38 wib.

melepaskan baju fanatismena kemudian saling berjabat tangan yang menyimbolkan perdamaian dan persatuan bangsa.<sup>110</sup>

Setelah menghadapi ketegangan masa kampanye, tahap berikutnya adalah masa minggu tenang, sebelum menuju ke masa pencoblosan. Tahap ini digambarkan dalam tokoh *Oom Pasikom* yang sedang harap-harap cemas sambil berbicara monolog untuk menenangkan dirinya sendiri<sup>111</sup>. Setelah masa minggu tenang barulah dilakukanlah tahap pemungutan suara, hal ini juga tervisualisasi dalam *Oom Pasikom* edisi 5 Mei 1982 yang seolah-olah menunjukkan rasa lega setelah menggunakan hak pilih, namun tiba-tiba mimik mukanya berubah menjadi galau. Hal ini menunjukkan rasa kekhawatiran akan hal realisasi dari janji-janji saat kampanye<sup>112</sup>.

Kemudian sesuai dengan prediksi *Oom Pasikom* dalam visualisasi sebelumnya, hasil Pemilu 1982 menunjukkan Golkar kembali sukses dalam mengumpulkan suara tunggal yaitu 48.334.724 atau 242 kursi. Secara nasional Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi dan itu berarti kehilangan masing-masing 5 kursi bagi PPP dan PDI. Adapun cara pembagian kursi pada Pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan Pemilu 1971, seperti dalam tabel yang dapat dilihat pada lampiran 20<sup>113</sup>.

### 3.1.4 Pemilu 1987

Pemilu keempat pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Pemilu ini ditandai dengan proses pembaharuan politik yang memantapkan Pancasila sebagai asas tunggal. Penerapan Pancasila sebagai asas tunggal ini sesuai dengan ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR-RI Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum, yang merupakan penyempurnaan dan perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2

---

<sup>110</sup> Lihat Lampiran 17

<sup>111</sup> Lihat Lampiran 18

<sup>112</sup> Lihat Lampiran 19

<sup>113</sup> Lihat Lampiran 20

Tahun 1980, maka organisasi politik peserta Pemilu hanya berdasarkan Pancasila dalam menjabarkan program-programnya demi mewujudkan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Perubahan RUU menjadi RUU ini tergambar dalam *Oom Pasikom*. Nampak beberapa orang dengan ekspresi wajah tersenyum sedang berembuk dan menyatukan tangannya diatas kertas bertuliskan ‘RUU Perubahan UU Pemilu 1969’. Pemandangan ini menunjukkan sikap kesepakatan mengenai perubahan Undang-Undang Pemilu. Namun disampingnya terlihat sosok memakai peci yang menyimbolkan seorang rakyat Indonesia berkata, “*Tentunya nanti pemilu bersih kan?*”. Pertanyaan ini tersirat mengandung harapan dengan perubahan UU Pemilu, akan terjadi pula perubahan dalam sistem penyelenggaraan Pemilu.<sup>114</sup>

Pada Pemilu 1987 ini mulai ditetapkan asas tunggal sebagai ideologi bagi partai-partai politik dan hal ini tak lepas dari berkembangnya isu politik yang memanas menjelang Pemilu. Kebijakan ini bertujuan agar tidak terjadi masalah yang bersifat ideologis, baik dalam program, tema, dan materi kampanye.

Inti pokok dari kekisruhan dalam tubuh dari kedua partai tersebut sebagian besar berkaitan dengan kebijakan partai tentang apa yang harus dilakukan dalam kampanye Pemilu 1987<sup>115</sup>. Pertentangan dalam tubuh partai ini nampaknya tak bisa dilepaskan dari persoalan ‘fusi partai’, dimana partai-partai gabungan yang bersatu menjadi satu partai, masih memiliki kecenderungan membawa kepentingan masing-masing kelompok. Ada kecenderungan pula bahwa masing-masing anggota dalam tubuh partai tersebut masih kuat ikatannya dengan induk partai yang lama, dimana masing-masing memiliki ideologi yang berbeda.

Konflik internal yang terjadi dalam tubuh PPP ini berkisar pada tiga masalah<sup>116</sup>, yaitu (1) ideologi, (2) Posisi, (3) alienasi Partai. Dari ketiga isu tersebut, yang paling dominan adalah masalah yang ada kaitannya dengan

<sup>114</sup> Lihat Lampiran 21

<sup>115</sup> Dr. Harsono Suwardi, 1993, *Peranan Pers dalam Politik di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Hlm. 94.

<sup>116</sup> *Ibid.*, *Peranan Pers dalam Politik di Indonesia*, Hlm. 96

masalah posisi atau kesempatan di dalam partai. Konflik itu sendiri lebih banyak diwarnai oleh adanya perbedaan pendapat dan pandangan antara Naro (Ketua Umum PPP) dengan Soedardji yang pada waktu itu masih menjabat menjadi salah seorang ketua pengurus partai. Perbedaan pendapat itu lebih banyak berkaitan dengan kebijakan partai tentang siapa yang paling berwenang menentukan para calon yang akan duduk di Lembaga Perwakilan.

Sedangkan konflik internal yang dihadapi PDI adalah persoalan yang berkaitan dengan masalah *Leadership* dan kaderisasi kepemimpinan. Salah satu penyebab krisis kepemimpinan ini adalah karena sulitnya PDI dalam merekrut kader-kader politik terbaik untuk mengisi posisi-posisi penting dalam partai.

Golkar sebagai salah satu organisasi peserta Pemilu dalam Pemilu 1987 tak nampak adanya isu kekisruhan. Hal ini dikarenakan Golkar telah memiliki kemantapan dan kematangan dalam pengelolaan organisasinya serta tak hanya memiliki sejumlah *human resources* kelas prima sebagai kader, namun juga memiliki semacam disiplin organisasi yang cukup kuat. Disamping itu Golkar memiliki kemudahan dan kelebihan berupa tersedianya dana dan sarana yang dapat dihimpun dari berbagai sumber<sup>117</sup>. Oleh karena itu tak mengherankan jika Golkar selalu terlihat prima.

Kondisi kesiapan masing-masing Organisasi Peserta Pemilu dalam menghadapi Pemilu 1987 ini divisualisasikan dalam *Oom Pasikom* edisi 22 Oktober 1985. Dalam visualisasinya tergambar tiga orang yang masing-masing mengenakan kaos berlambang tiga partai berbeda sedang bersiap melakukan lomba lari. Namun seseorang dengan kaos berlambang 'beringin' terlihat dalam posisi yang sangat siap untuk lomba lari. Sedangkan dua orang lainnya yang masing-masing menggunakan kaos berlambang 'bintang' dan 'banteng' terlihat masih sibuk dengan persiapannya. Kondisi ini menggambarkan bahwa Golkar ketika itu sangat siap untuk bersaing dalam Pemilu kali ini, sedangkan PPP dan PDI sedang sibuk mengatasi masalah yang dihadapi dirinya sendiri.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, Hlm. 105

<sup>118</sup> Lihat Lampiran 22

Masa kampanye Pemilu 1987 juga divisualisasikan dalam *Oom Pasikom* dua minggu sebelum pemungutan suara pada edisi 1 April 1987. Terlihat tokoh *Oom Pasikom* berinteraksi dengan beberapa orang yang berbeda dengan menggunakan bahasa tubuh sambil mengacungkan jari 1,2,3,dan 5. Angka 1,2,3 menandakan nomor urut partai. Sedangkan angka 5 hanya sekadar lelucon dalam menanggapi pilihan dalam Pemilu<sup>119</sup>. Lalu pada tanggal 23 April 1987 pemungutan suara dilaksanakan. Hal ini pun tergambar dalam *Oom Pasikom* edisi 24 April 1987<sup>120</sup>. Penggambaran ini sudah beberapa kali ditampilkan oleh GM Sudarta di pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam gambar tertulis “*janjimu yang kunantikan..*”. Hal ini menandakan bahwa dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, *Oom Pasikom* tidak bosan untuk mengingatkan dan menuntut para pejabat terpilih untuk menepati janji-janji kampanye. Karena setelah menjadi penguasa, biasanya para pejabat akan lupa merealisasikan janji manis saat kampanye.

Setelah selesai masa pemungutan suara, Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam selaku ketua panitia Pemilihan Umum Indonesia mengumumkan hasil tetap pemilihan umum. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang sah mencapai 85.869.816 atau 91,32 persen. Cara pembagian kursi juga tidak berubah, yaitu tetap mengacu pada Pemilu sebelumnya.<sup>121</sup>

Hasil Pemilu kali ini ditandai dengan kemerosotan terbesar PPP, yaitu hilangnya 33 kursi dibandingkan Pemilu 1982, sehingga hanya mendapat 61 kursi. Penyebab merosotnya PPP antara lain karena tidak boleh lagi partai itu memakai asas Islam dan diubahnya lambang dari Ka'bah kepada Bintang dan terjadinya pengembosan oleh tokoh- tokoh unsur NU, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah.<sup>122</sup>

Sementara itu Golkar memperoleh tambahan 53 kursi sehingga menjadi 299 kursi. PDI, yang tahun 1986 dapat dikatakan mulai dekat dengan

<sup>119</sup> Lihat Lampiran 23

<sup>120</sup> Lihat Lampiran 24

<sup>121</sup> [http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=41](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41) dalam “*Pemilu 1977-1997*” diakses pada hari Rabu, 2 Mei 2012 pukul 23.42wib.

<sup>122</sup> *Ibid.*, <http://www.kpu.go.id>

kekuasaan, sebagaimana diindikasikan dengan pembentukan DPP PDI hasil Kongres 1986 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam, berhasil menambah perolehan kursi secara signifikan dari 30 kursi pada Pemilu 1982 menjadi 40 kursi pada Pemilu 1987 ini. Hasil perolehan suara ini divisualisasikan dalam *Oom Pasikom* edisi 2 Mei 1987<sup>123</sup>. Dalam penggambarannya terlihat 3 orang yang sedang menduduki kursi dengan wajah mendongak keatas menandakan keangkuhan. Kursi dalam hal ini adalah lambang kedudukan dan jabatan. Terlihat kursi yang paling tinggi bergambar pohon beringin (Golkar), tertinggi kedua bergambar banteng (PDI), dan kursi terendah bergambar bintang (PPP). Ketiga orang yang menduduki kursi tersebut berkata, “*PUAS!*”. Namun ada seorang anak kecil dan seorang memakai peci yang meymbolkan rakyat biasa berkata, “*PUAS! LANTAS?*”. Pernyataan kedua orang tersebut terkesan bernada skeptis. Bahwa sesungguhnya selain berpuas diri atas hasil penghitungan suara, para pejabat terpilih harus merealisasikan janji-janji kampanye. Lihat lampiran 26.<sup>124</sup>

### 3.1.5 Pemilu 1992

Pemilihan Umum kelima pada masa Orde baru ini berlangsung serentak pada tanggal 9 Juni 1992. Pemilihan Umum yang didahului dengan masa kampanye selama 25 hari itu selain untuk memperebutkan 400 kursi di DPR, sekaligus juga untuk mengisi keanggotaan MPR periode 1992-1997<sup>125</sup>. Pemilu kali ini juga hampir sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang masih berpedoman pada asas LUBER-JURDIL (Langsung Umum Bebas Rahasia-Jujur dan Adil). Hal ini divisualisasikan dalam *Oom Pasikom* ketika menjelang Pemilu 1992<sup>126</sup>. Terlihat dialog antara tokoh *Oom Pasikom* dengan anak kecil. Tokoh *Oom Pasikom* berbicara, LUBER, JURDIL, TIDCUR (Tidak Curang), TANTIN (Tanpa Intimidasi) namun dengan raut wajah ragu-ragu, sedangkan anak kecil tersebut berbicara dengan raut wajah polos. Di akhir dialog Tokoh *Oom Pasikom* berkata, “*Pokoke aku Menang!*”, kemudian anak

<sup>123</sup> Lihat Lampiran 25

<sup>124</sup> Lihat Lampiran 26

<sup>125</sup> Sudibjo M., 1995, *Pemilihan Umum 1992*, Jakarta: CSIS. Hlm. 12

<sup>126</sup> Lihat Lampiran 27



kecil tersebut hanya tersenyum getir. Penggambaran ini menandakan seseorang yang berambisi untuk menang, tanpa menjalani proses Pemilu yang bersih.

Dalam pemilu kali ini juga partai PPP dan PDI telah sah menggunakan lambang baru. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam pemilu 1987, bahwa ketika itu PPP dan PDI mengalami konflik internal. Kondisi yang tidak stabil itu memunculkan ide pemerintah untuk menerapkan asas tunggal Pancasila kepada ketiga Orsospol. Konsekuensi dari asas tunggal ini juga membawa dampak pada perubahan lambang kedua parpol tersebut. PPP mengubah lambang Ka'bah menjadi Bintang, yang melambangkan sila pertama. Dan PDI yang muncul hanya lambang Kepala Bantengnya saja, sedangkan padi dan kapas yang mengitari kepala banteng tersebut hilang. Lambang Orsospol yang baru ini di visualisasikan dalam *Oom Pasikom* edisi 3 Juli 1991<sup>127</sup>. Dalam gambar terlihat 3 papan reklame dari masing-masing partai. Kartun mengandung pesan ingin menginformasikan lambang baru yang digunakan partai tersebut.

Dibanding dengan pemilu sebelumnya, pada Pemilu 1992 ini memang sudah ada perbaikan. Setiap Orsospol mendapat hari khusus untuk menyelenggarakan kampanye sehingga kemungkinan bentrokan antara dua orsospol dapat ditekan. Juga terdapat larangan untuk mengadakan pawai bermotor, sekalipun masih dilanggar disana-sini, pada umumnya telah meningkatkan ketertiban dibandingkan sebelumnya. Jauh sebelum Pemilu 1992 berlangsung, terdapat beberapa pendapat yang melarang berkampanye di lingkungan kampus. Beberapa rektor universitas (ITB, UGM, IKIP Yogya) telah menyatakan sepakat untuk tidak memberi izin kampanye di kampus.

Para rektor universitas yang menjabat ketika itu menyatakan bahwa kampus tidak layak dijadikan ajang kampanye untuk kontestan peserta pemilu. Rektor ITB Wiranto Arismunandar tidak mengizinkan kampus menjadi tempat kampanye. Menurutnya, semua kegiatan di kampus harus ilmiah, minimal menunjang kegiatan ilmiah. Sikap serupa juga diperlihatkan oleh Rektor Universitas Gadjah Mada M. Adnan, Rektor Universitas Sriwijaya Amran

<sup>127</sup> Lihat Lampiran 28

Halim, dan Rektor Universitas Indonesia Sujudi yang tidak setuju kampanye pemilu masuk kampus<sup>128</sup>. Akhirnya wacana larangan berkampanye di kampus ini pun di sahkan dalam Keppres No.8 tahun 1992 tentang ‘Penyelenggaraan Kampanye Pemilu’. Visualisasi mengenai wacana larangan berkampanye di lingkungan kampus ini tergambar dalam *Oom Pasikom*. Terdapat teks yang bertuliskan “*Kampus tak boleh untuk Kampanye Pemilu!*”. Didalamnya terdapat seorang dengan tubuh terbelah dan berjalan memisah. Yang satu ke arah tulisan “*back to campus*”, sedangkan yang lain menuju tulisan “*back to nowhere*”. Pemandangan ini menggambarkan kebingungan karena adanya dua kepentingan yang berbeda antara kepentingan akademis atau kepentingan yang lain.<sup>129</sup>

Pemilu 1992 berbeda dengan suasana Pemilu 1987. *Pertama*, masyarakat yang memberikan suara telah mengalami peningkatan pendidikan. *Kedua*, telah mulai tumbuh suatu kelas menengah (merupakan pilar demokrasi) yang berpendidikan lebih tinggi dan karena itu pula bersifat lebih kritis. *Ketiga*, suatu proses keterbukaan telah dimulai beberapa waktu yang lalu dan telah direstui oleh pemerintah<sup>130</sup>. Proses ini mencerminkan keinginan masyarakat akan demokratisasi dalam sistem politik Indonesia.

Sebelum tahap pemungutan suara, dilaksanakan pula ‘minggu tenang’ seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Masa minggu tenang ini divisualisasikan pula dalam *Oom Pasikom*<sup>131</sup>. Pada gambar pertama, terdapat tokoh *Oom Pasikom* bersama anak kecil. Mereka terlihat sedang berjalan mengendap-ngendap. Gambar kedua, terlihat *Oom Pasikom* dengan ekspresi wajah emosi berkata, “*Curiga..curiga..curiga!*”. Kemudian seorang anak kecil datang sambil berkata, “*Tenang pak Tenang, ini kan minggu tenang*”. Kedua gambar tersebut membawa pesan ‘ketenangan’, dimana ketenangan dalam hal ini biasanya diidentikan dengan suasana sunyi-senyap, tidak emosional,

<sup>128</sup> <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1991/07/20/NAS/mbm.19910720.NAS14554.id.html> .  
Ahmed K. Soerawidjaja, Sri Indrayati dan Zed Abidien, “*Kuda-kuda untuk sang trauma*”, 20 Juli 1991, diakses pada hari Rabu, 2 Mei 2012 pukul 21.54 wib.

<sup>129</sup> Lihat Lampiran 29

<sup>130</sup> Prof. Miriam Budiardjo, 1994, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 43

<sup>131</sup> Lihat Lampiran 30

tentram, tidak kacau, dll. Dapat dikatakan penggambaran ini bisa mewakili suasana minggu tenang.

Lalu pada saat pemungutan suara, *Oom Pasikom* menggambarkan lelucon dalam kartun editorialnya yang bertuliskan “*Dokter.. dia kehilangan suaranya setelah memberi suara!*”<sup>132</sup>. Penggambaran ini hanya sekadar gambar lucu yang menghibur, berkaitan dengan menggunakan hak suara dalam pemilihan umum. Kemudian pada tahap penghitungan suara, hasil menunjukkan bahwa Golkar yang memperoleh suara terbanyak. Namun perolehan suara Golkar kali ini merosot dibandingkan Pemilu 1987. Kalau pada Pemilu 1987 perolehan suaranya mencapai 73,16 persen, pada Pemilu 1992 turun menjadi 68,10 persen, atau merosot 5,06 persen. Penurunan yang tampak nyata bisa dilihat pada perolehan kursi, yakni menurun dari 299 menjadi 282, atau kehilangan 17 kursi dibanding pemilu sebelumnya.<sup>133</sup>

PPP juga mengalami hal yang sama, meski masih bisa menaikkan 1 kursi dari 61 pada Pemilu 1987 menjadi 62 kursi pada Pemilu 1992 ini. Yang berhasil menaikkan perolehan suara dan kursi di berbagai daerah adalah PDI. Pada Pemilu 1992 ini PDI berhasil meningkatkan perolehan kursinya 16 kursi dibandingkan Pemilu 1987, sehingga menjadi 56 kursi. Ini artinya dalam dua pemilu, yaitu 1987 dan 1992, PDI berhasil menambah 32 kursinya di DPR RI<sup>134</sup>. Perolehan kursi yang didapat oleh masing-masing Orsospol dari hasil Pemilu 1992 ini mendapat sindiran dari kartun *Oom Pasikom* edisi 1 Juli 1992<sup>135</sup>. Terlihat seorang dengan ekspresi amat senang ketika mendapatkan sebuah kursi. Seperti dalam visualisasi pemilu sebelumnya, Kursi dalam hal ini adalah lambang kedudukan dan jabatan. Lalu seorang anak kecil dengan wajah polos bertanya, “*Selain untuk duduk, kursi untuk apalagi sih, Pak?*”. Pertanyaan yang sangat sederhana dan naif namun memiliki makna yang dalam. Khususnya jika dilontarkan kepada para pejabat pemerintah, mengingat ketika kampanye para calon pejabat berlomba-lomba mengambil hati rakyat dengan

<sup>132</sup> Lihat Lampiran 31

<sup>133</sup> [http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=41](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41) dalam “*Pemilu 1977-1997*” diakses pada hari Rabu, 2 Mei 2012 pukul 16.03 wib.

<sup>134</sup> *Ibid.*, <http://www.kpu.go.id/>

<sup>135</sup> Lihat Lampiran 32

seribu janji-janji manis, tetapi setelah duduk di kursi pemerintahan, mereka seolah amnesia dan mengabaikan rakyat.

Mengenai hasil perolehan suara dan Perolehan kursi legislatif dapat melihat tabel dalam lampiran 33<sup>136</sup>.

### 3.1.6 Pemilu 1997

Menjelang pemilihan umum 29 Mei 1997, dinamika kehidupan berpolitik ditandai dengan meningkatnya kekerasan masyarakat berupa aksi-aksi massa yang disertai dengan pengrusakan puluhan gedung pemerintah, tempat ibadah, kendaraan, bahkan korban jiwa manusia. Peristiwa-peristiwa yang muncul merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat. Seperti krisis multidimensi, KKN, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain.

Hal ini nampaknya sejalan dengan semakin kuatnya tuntutan masyarakat agar pemilu 1997 ini benar-benar dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi yang berpedoman pada asas Luber-Jurdil (Langsung Umum Bebas Rahasia-Jujur dan Adil). Kondisi ini pun tergambar dalam *Oom Pasikom* yang sedang melempar dadu dimana di setiap sisi dadu terdapat huruf yang jika digabungkan akan membentuk kata 'Demokrasi'<sup>137</sup>. Huruf "d-e-m-o-k-r-a-s-i" nampak terpecah-pecah dalam kepingan sisi dadu dan tokoh *Oom Pasikom* terlihat sedang bertaruh melempar dadu tanpa tahu hasil lemparannya, mengacu pada permainan dadu yang perprinsip pada teori peluang, dalam hal ini berarti hanya bisa memprediksikan kemungkinan yang akan muncul dari kombinasi sisi dadu. Apakah semua sisi huruf akan menyatu dan membentuk kata 'Demokrasi', atautkah susunan 'Demokrasi' akan memisah secara acak dan berantakan. Analogi ini nampaknya cukup relevan dengan kondisi Indonesia ketika itu. Terutama saat akan menjalani proses demokratisasi berupa Pemilu. Kemunculan kartun ini mengajak kita untuk menerka apakah Pemilu benar-benar memunculkan kehidupan demokrasi yang utuh atau hancur berantakan?.

<sup>136</sup> Lihat Lampiran 33

<sup>137</sup> Lihat Lampiran 34

Serangkaian Kampanye menuju Pemilu 1997 menjadi agenda awal yang dilaksanakan selama 27 hari, yaitu mulai tanggal 27 April-23 Mei 1997 diwarnai berbagai insiden, gejolak, dan beberapa kerusuhan diberbagai tempat<sup>138</sup>, dinilai sebagai kampanye terburuk sepanjang sejarah Pemilu Indonesia selama masa Orde Baru<sup>139</sup>. Dalam kartun editorial *Oom pasikom*, tergambar ada seseorang yang diatas kepalanya mengeluarkan api ketika sedang membaca buku politik. Lalu dibelakangnya ada seorang wanita yang sedang memasak telur diatas api tersebut. Kondisi ini menyimbolkan panasnya suhu politik akibat friksi yang muncul ketika itu, sampai-sampai mampu mematangkan telur<sup>140</sup>. Penggambaran ini memunculkan adanya kesan berlebihan / hiperbola sekaligus humor yang menghibur.

Persaingan kampanye antara OPP (Organisasi Peserta Pemilu) juga tervisualisasi dalam *Oom Pasikom* yang dalam gambar kartun editorialnya terdapat 3 orang membawa kuas dan kaleng cat yang masing-masing berwarna merah, kuning, hijau (Mewakili lambang warna partai). Ketiga orang tersebut terlihat sedang bertarung dengan menggunakan kuas berwarna, pertarungan ini adalah bentuk persaingan dalam kampanye, dimana salah seorang berusaha mendominasi yang lain dengan warna yang dimilikinya<sup>141</sup>.

Akhirnya setelah melalui berbagai tahapan kampanye, ada masa minggu tenang selama sepekan yang divisualisasikan dalam Oom Pasikom Hal ini tervisualisasi dalam *Oom Pasikom* edisi 24 Mei 1997. Seperti kartun yang muncul pada pemilu-pemilu sebelumnya, terlihat seorang anak kecil yang berusaha menenangkan seseorang sambil berkata, "*tenang tenang, Pak tenaang..kampanye sudah usai*". Imbauan untuk tenang ini menganalogikan suasana minggu tenang menjelang kampanye. Kemudian gambar kedua pun

<sup>138</sup> Di Pekalongan, misalnya, terjadi bentrokan antar kelompok pemuda yang pendukung Golkar dan PPP menyebabkan 50 pemuda luka parah, satu bangunan Balai Bispa Kanwil Depkeh dibakar, satu kendaraan dirusak, dan lima rumah mengalami kerusakan akibat lemparan batu. Hal itu terjadi, Rabu (30/4), bermula ketika sekelompok pemuda yang baru pulang mengikuti kampanye Golkar mencabut bendera PPP. Sementara sehari sebelumnya, se usai kampanye PPP, sekitar tiga ribu bendera Golkar lenyap dan rusak. ( <http://www.tempo.co.id/ang/min/02/09/utama5.htm> dalam "*Kampanye 1997 : Di Antara Rusuh dan Boikot*", diakses pada hari Kamis, 3 Mei 2012 pukul 22.32 wib.)

<sup>139</sup> J. Kristiadi, 1997, *Pemilihan Umum 1997: Perkiraan, Harapan, dan Evaluasi*, Jakarta: CSIS, Hlm. xv

<sup>140</sup> Lihat Lampiran 35

<sup>141</sup> Lihat Lampiran 36

sama dengan kartun yang pernah ada pada pemilu sebelumnya. Terdapat seseorang wanita yang mengantarkan seorang laki-laki ke dokter dan berkata, “*Dok, suaranya benar-benar hilang saat ikut pemungutan suara!*”. Kartun ini sama dengan kartun sebelumnya yang mengandung pesan humor dan sekadar menghibur pembaca<sup>142</sup>.

Pemungutan suara tanggal 29 Mei 1997 secara umum, dapat dinilai berjalan lancar, meski pada tahap pelaksanaan kampanye selama 27 hari sebelumnya banyak muncul ketegangan antara masa pendukung partai.

Hasil Pemilu 1997 menunjukkan bahwa Golkar tetap menjadi pemenang. Perolehan suara Golkar mencapai 74,5%, atau naik 6,41. Sedangkan perolehan kursinya meningkat menjadi 325 kursi, atau bertambah 43 kursi dari hasil pemilu sebelumnya. PPP meningkat 5,43%. Begitu juga untuk perolehan kursi. Pada Pemilu 1997 ini PPP meraih 89 kursi atau meningkat 27 kursi dibandingkan Pemilu 1992. Sedangkan PDI, yang mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri setahun menjelang pemilu, perolehan suaranya merosot 11,84%, dan hanya mendapat 11 kursi, yang berarti kehilangan 45 kursi di DPR dibandingkan Pemilu 1992. Dari hasil pemilu 1997 yang diperoleh, rakyat menantikan realisasi janji-janji yang didengungkan selama kampanye. Hal ini tergambar dalam *Oom pasikom* edisi 4 juni 1997, terdapat kata ‘Janji’ yang tertulis pada barbel. Simbolisasi ini menggambarkan bahwa setelah para pejabat terpilih, mereka memikul beban janji yang harus ditunaikan<sup>143</sup>. Tabel perolehan suara Pemilu 1992 dapat dilihat pada Lampiran 39<sup>144</sup>.

## 3.2 Pemilu Masa Reformasi

### 3.2.1 Pemilu 1999

Setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998, wakil presiden B.J. Habibie kemudian disumpah oleh Mahkamah Agung menjadi Presiden RI ketiga di Istana Negara. Dasar hukum pengangkatan B.J. Habibie adalah UUD 1945 dan Tap MPR-RI No.

<sup>142</sup> Lihat Lampiran 37

<sup>143</sup> Lihat Lampiran 38

<sup>144</sup> Lihat Lampiran 39

VII/MPR/1973 yang berbunyi “*Jika Presiden berhalangan, maka wakil presiden ditetapkan menjadi presiden*”<sup>145</sup>.

Ketika Habibie naik sebagai presiden, Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi yang sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh krisis mata uang dan juga utang luar negeri yang luar biasa besarnya sehingga menurunkan nilai rupiah ketika itu. Selain itu kerusuhan Mei 1998 juga telah menghancurkan pusat-pusat bisnis perkotaan, larinya modal asing, hancurnya produksi serta distribusi barang yang mengakibatkan inflasi yang tinggi. Menurut data Bappenas<sup>146</sup> (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Inflasi dalam tahun 1998 diperkirakan mencapai tingkat yang tertinggi sejak tahun 1970. Perkiraan ini berdasarkan pencapaian inflasi sebesar 35,07% selama periode Januari - Mei 1998.

Pada masa pemerintahan Habibie, publik mendesak agar Pemilu yang baru dipercepat dan segera dilaksanakan. Kemudian Pemilu dilaksanakan setelah 13 bulan masa kekuasaan, tepatnya pada 7 Juni 1999. Pada saat itu alasan dipercepatnya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu, pemerintah mengajukan RUU tentang partai politik, Pemilu, dan tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Setelah RUU di setujui, DPR dan di sahkan, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 11 Maret 1999 yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil partai politik dan wakil pemerintah. Hal yang membedakan Pemilu 1999 dengan pemilu sebelumnya (kecuali pemilu 1955) adalah banyaknya peserta partai politik yang berjumlah 48 Parpol.

Menjelang pelaksanaan Pemilu 1999, timbul kekhawatiran terjadinya praktik-praktik politik kotor seperti politik uang. Kekhawatiran ini muncul

---

<sup>145</sup> *Op.cit.*, *Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi*. Hlm. 200

<sup>146</sup> <http://www.bappenas.go.id/node/45/735/perkembangan-inflasi/> diakses pada hari Minggu, 6 Mei 2012 pukul 20.45 wib.

mengingat krisis ekonomi yang sedang dihadapi ketika itu. Hal ini tergambar dalam *Oom Pasikom* edisi 13 Desember 1998. Terlihat sosok mirip Soeharto yang mengenakan pakaian seperti jendral militer sedang duduk dikursi. Visualisasi tersebut seolah menggambarkan kondisi Indonesia sepeninggal pemerintahan Soeharto yang menyisakan situasi *chaos* dengan simbolisasi komposisi warna yang gelap dan suram.<sup>147</sup>

Perubahan rezim ini juga ternyata tidak serta merta berjalan mulus. Sedikit menilik ke belakang, masa transisi ini diwarnai dengan berbagai kasus pertikaian, kerusuhan, dan ancaman disintegrasi bangsa. Misalnya kasus pengrusakan rumah ibadat di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 30 November 1998, kemudian kerusuhan besar dengan latar belakang SARA terjadi di Ambon tanggal 19-20 Januari 1999, dan berbagai kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah disinyalir karena ulah provokator yang ingin memecah belah persatuan<sup>148</sup>. Perjalanan reformasi menuju Indonesia yang demokratis ini tergambar dalam *Oom Pasikom* edisi 3 Maret 1999. Dalam gambar terlihat seseorang memakai peci yang menyimbolkan rakyat Indonesia sedang berjalan diatas senjata-senjata yang berlumuran darah, seperti parang, kampak, pistol, bambu runcing, dll. Kondisi ini sangat relevan mengingat kerusuhan, pertikaian, dan berbagai bentuk ancaman disintegrasi turut mewarnai perjalanan menuju demokratisasi Indonesia ketika itu.<sup>149</sup>

Tahap-tahap awal pelaksanaan Pemilu 1999 yang menjadi pemilu pertama pasca-Orde baru diharapkan dapat berlangsung demokratis. Dengan mengatasnamakan rakyat para elit politik ingin meraih suara sebanyak-banyaknya. Visualisasi ini tergambar dalam *Oom Pasikom* edisi 7 April 1999. Dalam kartun tergambar dua orang yang mengenakan jas (menyimbolkan pejabat pemerintah) sedang mengejar bola dan bersaing untuk merebutnya. rakyat dalam hal ini digambarkan seperti bola yang bisa dioper, digiring, dan ditendang menuju gawang yang menjadi simbol kepentingan politik<sup>150</sup>. Situasi

<sup>147</sup> Lihat Lampiran 40

<sup>148</sup> *Kompas*, 30 Januari 1999

<sup>149</sup> Lihat Lampiran 41

<sup>150</sup> Lihat lampiran 42



keamanan dan stabilitas politik juga semakin memanas. Belum juga tuntas penyelesaian kasus-kasus kerusuhan dan ancaman perpecahan bangsa, pemboman rumah ibadah kembali terjadi. Ketika itu menimpa masjid Istiqlal Jakarta. Para tokoh masyarakat menganggap pemboman tersebut merupakan upaya sistematis kelompok-kelompok yang menginginkan ketidakstabilan negara dan ingin menggagalkan pemilu. Dalam visualisasi *Oom Pasikom*, situasi negara ketika itu di simbolkan sebagai sumbu bom yang semrawut dan terlihat seseorang sedang menyulut sumbu bom dengan api<sup>151</sup>.

Kondisi yang tidak stabil menjelang kampanye Pemilu ini tentunya membutuhkan suatu pedoman atau payung hukum untuk melindungi serta mengorganisir kampanye supaya tidak kacau dan berjalan tertib. Namun mengenai hukum kampanye Pemilu, dalam undang-undang pemilu tidak dijelaskan secara spesifik mengenai parameter hukum kampanye pemilu. UU pemilu menyebutkan bahwa masa kampanye dimulai dari disahkannya daftar caleg, sampai dua hari sebelum pemungutan suara yaitu tanggal 18 Mei-5 Juni 1999<sup>152</sup>. Jadwal kampanye juga dibuat berbeda, sehingga partai-partai politik dapat mengadakan kampanye dihari yang berbeda. Selama masa ini, partai politik menyampaikan program-programnya kepada calon pemilih.

Dalam UU Pemilu juga mencakup ketentuan yang tidak membenarkan pembelian suara dan bentuk kecurangan pemilu lain. Pasal 73 merinci 11 bentuk tindakan ilegal sehubungan dengan pemilu sekaligus sanksi pidananya. Larangan tersebut meliputi<sup>153</sup>:

*(3) Barang siapa pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan*

<sup>151</sup> Lihat Lampiran 42

<sup>152</sup> International Foundation for Election sistem, *Laporan Pemilu 7 Juni 1999 Republik Indonesia*, Washington DC, 2005, Hlm. 15

<sup>153</sup> *Ibid.*, Hlm. 2

*juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.*

Oleh karena itu, ‘pembelian dan penjualan suara’ merupakan sebuah bentuk tertentu kecurangan pemilu yang dapat terkena hukuman pidana. Bentuk lain dari ‘politik uang’ salah satunya adalah menyuap petugas pemilu untuk memanipulasi penghitungan suara. Dalam implementasinya di lapangan, banyak terjadi kecurangan di berbagai daerah, sejumlah parpol dan elit partai melakukan ‘politik uang’. Selain politik uang, peran pemantau pemilu juga melihat indikasi adanya penggunaan fasilitas negara dan pemanfaatan jabatan pemerintahan oleh sebuah partai politik dalam memperoleh suara dari masyarakat. Hal ini tergambar dalam *Oom Pasikom* edisi 1 Mei 1999<sup>154</sup>. Dalam kartun tergambar bunglon yang menjadi simbolisasi partai. Bunglon tersebut terlihat menjulurkan lidahnya yang berstempel uang kemudian menjerat salah seorang yang mengenakan peci (menyimbolkan rakyat Indonesia). Hal ini jelas memiliki arti adanya unsur ‘politik uang’ yang dilakukan partai politik untuk memperoleh dukungan suara dari rakyat.

Selain itu dalam kartun 9 Juni 1999, tergambar ada dua orang yang sedang berdialog mengenai tindak kecurangan seperti intimidasi untuk memilih partai tertentu, pelubangan surat suara meskipun pencoblosan belum dimulai, dan politik uang sesaat sebelum pelaksanaan pemungutan suara<sup>155</sup>. *Caption / keterangan gambar* tersebut jelas menjabarkan mengenai realitas pemilu yang terjadi ketika itu. Dapat dikatakan gambar tersebut mengandung kritik tajam, berbeda dengan visualisasi kartun pada masa Orde baru yang belum berani menyindir secara *to the point*.

Setelah melewati masa penghitungan suara, Hasil final pemilu baru diketahui masyarakat tanggal 26 Juli 1999. Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) langsung melakukan pembagian kursi. Pada tahap ini juga muncul masalah. Rapat pembagian kursi di PPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yang ditetapkan Kelompok Kerja PPI, khususnya

<sup>154</sup> Lihat Lampiran 44

<sup>155</sup> Lihat Lampiran 45

pembagian kursi sisa, ditolak oleh kelompok partai Islam yang melakukan *stembus accoord* (pengalihan suara dari partai yang tidak lolos ke partai yang lolos Pemilu)<sup>156</sup>. Hasil Kelompok Kerja PPI menunjukkan, partai Islam yang melakukan *stembus accoord* hanya mendapatkan 40 kursi. Sementara Kelompok *stembus accoord* 8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak atas 53 dari 120 kursi sisa.<sup>157</sup>

Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya diserahkan kepada KPU. Di KPU perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan melalui voting dengan dua opsi. Opsi *pertama*, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara *stembus accoord*, sedangkan opsi *kedua* pembagian tanpa *stembus accoord*. Hanya 12 suara yang mendukung opsi pertama, sedangkan yang mendukung opsi kedua 43 suara. Lebih dari 8 partai *walk out*. Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan tanpa memperhitungkan lagi *stembus accoord*<sup>158</sup>.

Berdasarkan keputusan KPU, PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) akhirnya melakukan pembagian kursi pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26% dari 462 kursi yang diperebutkan. PDI-P muncul sebagai pemenang pemilu dengan meraih 253 kursi. Golkar memperoleh 120 kursi, PKB 52 kursi, PPP 58 kursi, dan PAN 24 kursi<sup>159</sup>.

Walaupun PDI-P menjadi partai pemenang pemilu, namun pemilihan presiden dilakukan oleh MPR. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999 diadakanlah Sidang Umum MPR dengan agenda pemilihan Presiden. Jadi bagi yang partainya tidak memenangkan suara, mereka masih memiliki peluang untuk menduduki kursi presiden. Upaya itu dilakukan antara lain melalui pembentukan koalisi menjelang Sidang Umum MPR. Visualisasi ini tergambar dalam *Oom Pasikom 7 Juli 1999*<sup>160</sup>. Kemudian akhirnya lewat dukungan poros

<sup>156</sup> [http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=42](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42) diakses pada hari Minggu, 6 Mei 2012 pukul 01.25 wib.

<sup>157</sup> *Loc.cit.*, *Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi*, Hlm. 212

<sup>158</sup> [http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=42](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42) diakses pada hari Minggu, 6 Mei 2012 pukul 01.28 wib.

<sup>159</sup> *Kompas*, 2 September 1999

<sup>160</sup> Lihat Lampiran 46

tengah<sup>161</sup> (koalisi partai-partai Islam) Abdurrahman Wahid pun memenangkan pemilihan presiden.

Pemilihan presiden kemudian diikuti dengan pemilihan wakil presiden. Beberapa calon wakil presiden ketika itu ialah Jendral Wiranto, Akbar Tanjung, Hamzah Haz, dan Megawati Soekarnoputri. Tetapi kemudian Jendral Wiranto dan Akbar Tanjung mengundurkan diri. Dari dua calon yang tersisa, Megawati Soekarnoputri mengungguli Hamzah Haz dalam perolehan suara melalui voting<sup>162</sup>. Akhirnya hasil Pemilu 1999 menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Pemerintahan yang baru ini kemudian divisualisasikan dalam Oom Pasikom edisi 23 Oktober 1999<sup>163</sup>. Terlihat dalam gambar Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri menaiki mobil meninggalkan jalan yang bertuliskan SU(Sidang Umum)-MPR di samping kanan kiri jalan tertulis '*Money Politic*' dan '*Konspirasi*'. Mereka berjalan menuju Indonesia baru, namun jalan yang dilewati penuh dengan bebatuan besar yang menjadi simbol besarnya masalah yang sedang dihadapi ketika itu.

Dalam pemerintahan yang baru ini kemudian Presiden membentuk Kabinet yang diberi nama Kabinet Nasional yang merupakan hasil kompromi kekuatan parpol PDI-P, Golkar, PKB dan kelompok poros tengah (PAN, PPP, PBB, dan Partai Keadilan)<sup>164</sup>. Kabinet hasil kompromi dari berbagai partai ini tergambar dalam *Oom Pasikom*, dan menyebutnya sebagai "*Kabinet Pelangi*", sebutan ini dipilih karena dalam kabinet pun terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai partai yang berbeda. Mengenai tabel hasil perolehan suara Pemilu 1999 dapat dilihat dalam Lampiran 49<sup>165</sup>.

<sup>161</sup> Istilah *Poros Tengah* diperkenalkan oleh Amien Rais, Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) menjelang pilpres sesuai Pemilu 1999. Partai Islam yang tergabung dalam poros tengah ialah PAN, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (PK), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lihat Manning, et.al, 2001, *Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis*, Yogyakarta: LKIS. Hlm. 383.

<sup>162</sup> *Kompas*, 22 Oktober 1999

<sup>163</sup> Lihat Lampiran 47

<sup>164</sup> Lihat Lampiran 48

<sup>165</sup> Lihat Lampiran 49

Dengan demikian, berbagai macam kartun editorial *Oom Pasikom* yang memvisualisasikan pemilu-pemilu Orde Baru (1971-1997), pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Semua kartun editorial yang muncul pada masa itu sama-sama mengungkapkan proses Pemilu dengan cara sembunyi-sembunyi, hanya sekadar menyindir secara halus dan umumnya menggunakan simbol-simbol yang tidak terlalu mencolok. Berbagai bentuk pelanggaran yang sebenarnya terjadi dan selalu berulang di setiap penyelenggaraan Pemilu pun tidak diungkapkan secara gamblang. Karena pada waktu itu kondisi pemerintahan yang represif tidak memungkinkan *Oom Pasikom* berekspresi secara bebas dalam kartun editorialnya.

Kemudian pasca tumbanganya Orde Baru, Pemilu 1999 menjadi Pemilu pertama di era Reformasi. Pemilu pada masa reformasi ini memiliki arti yang sangat strategis dalam proses transisi demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan Pemilu 1999 merupakan momentum untuk mengukur sejauh mana proses demokratisasi bisa berlangsung di dalam suasana politik yang belum sepenuhnya stabil. Sedangkan Pemilu 2004 sekurang-kurangnya merupakan tolok ukur bagaimana kualitas transisi dan konsolidasi demokrasi berjalan setelah kurang lebih enam tahun masa transisi demokrasi.

Pada era Reformasi, kebebasan pers pun mulai lebih terbuka dan longgar. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi bagaimana penggambaran sebuah kartun editorial dalam surat kabar. Nampak sangat jelas terlihat bahwa dalam penggambaran Pemilu 1999, *Oom Pasikom* mulai lebih bebas dalam memvisualisasikan proses pemilu serta berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan dibandingkan dengan masa Orde Baru yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Terlebih ketika Pelaksanaan Pemilu 2004, kartun editorial *Oom Pasikom* menjadi lebih produktif dan lebih berani dalam mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan yang ditemui dilapangan. Untuk memahami lebih jauh dan melihat perbedaan dengan Pemilu 2004, dapat dilihat dalam Bab selanjutnya.

## **BAB IV**

### **Visualisasi Realitas Pemilu 2004 dalam Kartun Editorial *Oom Pasikom***

#### **4.1 Pemilihan Umum 2004**

Dalam merekam perjalanan Pemilu 2004, kartun editorial *Kompas Oom Pasikom* banyak mengungkapkan berbagai realitas yang terjadi selama proses pelaksanaan Pemilu 2004. Dapat dikatakan bahwa pada Pemilu masa Reformasi, penggambaran *Oom Pasikom* ini lebih terbuka dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya pada masa Orde baru. Berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan pemilu pun tak luput dari penggambaran *Oom Pasikom*. Keberanian dalam mengungkapkan kritikan ini tentunya sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah pada masanya, dimana pemerintah masa reformasi ini lebih bersifat permisif dan pers dapat 'berbicara' mengungkapkan opininya secara bebas.

Sejak tahun 1969, *Kompas* pun merajai penjualan surat kabar secara nasional. Khususnya pada tahun 2004, tiras hariannya mencapai 530.000 eksemplar, khusus untuk edisi Minggu bahkan mencapai 610.000 eksemplar. Pembaca koran ini mencapai 2,25 juta orang di seluruh Indonesia<sup>166</sup>. Hal ini menandakan bahwa *Kompas* memiliki tempat dihati pembaca dan kiranya cukup representatif sebagai koran yang mewakili opini masyarakat ketika itu.

Pemilihan Umum Indonesia 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung, dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari Pemilu sebelumnya. Pada pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden (sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui Presiden). Selain itu, pada Pemilu ini pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah seperti Pemilu 1999, tetapi berpasang-pasangan.

Dalam pelaksanaan Pemilu 2004, kompleksitas penyelenggaraan pemilu pun meningkat, karena diselenggarakan tiga kali pemilihan untuk dua lembaga politik yang berbeda pula (Legislatif dan Eksekutif). *Pertama*, Pemilu

---

<sup>166</sup> Cecep Rukendi, *Analisis wacana Pariwisata di Harian Kompas*, dalam Jurnal Kepariwisata Indonesia, Vol. 3 No. 2 Juni 2008, Hlm. 184, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/3208181193.pdf>. diakses pada hari Selasa 15 Mei 2012 pukul 21.58 wib

untuk memilih anggota badan legislatif di tingkat pusat (DPR dan DPD) dan di tingkat daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). *Kedua*, Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden putaran pertama. *Ketiga*, Pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua.

Pelaksanaan Kampanye Pemilu Legislatif 2004 dilaksanakan mulai tanggal 11 Maret 2004 sampai dengan 1 Apr 2004, sedangkan masa tenang dimulai tanggal 2 April 2004 sampai dengan tanggal 4 April 2004. Pemungutan suara untuk DPR dan DPRD dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Pemungutan suara untuk Presiden dan wakil presiden putaran pertama dilaksanakan tanggal 5 Juli 2004, dan Pemungutan suara untuk Presiden dan wakil presiden putaran kedua dilaksanakan tanggal 20 September 2004<sup>167</sup>.

Pada tanggal 23 mei 2004, KPU (Komisi Pemilihan Umum) menetapkan lima pasang calon peserta yang akan bersaing dalam Pemilu 2004, dengan keputusan KPU no.56 Tahun 2004 yang juga memuat nomor urut para calon, yaitu: Nomor 1 untuk pasangan calon Wiranto-Salahudin Wahid; Nomor 2 untuk pasangan calon Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi; Nomor 3 untuk pasangan calon M. Amien Rais-Siswono Yudohusodo; Nomor 4 untuk pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla; dan Nomor 5 untuk pasangan calon Hamzah Haz-Agum Gumelar<sup>168</sup>.

Dalam kartun *Oom Pasikom*, penetapan beberapa pasang calon peserta pemilu ini terlihat sedang bernyanyi dan menari, serta dalam gambar tertulis "*Femilu Refublik Indonesia dua Ribu Emfat*" dan "*Akademi Fresiden Indonesia*" (AFI). Hal ini jelas merupakan sebuah sindiran / kritik berupa parodi *plesetan*, dimana para calon peserta pemilu ini bertingkah layaknya para kontestan di salah satu ajang kompetisi menyanyi yang pernah ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta berjudul AFI (Akademi Fantasi Indosiar). Terlihat jelas bahwa sindiran ini menganalogikan mereka seperti para kontestan yang sedang

<sup>167</sup> Syamsudin Haris, 2005, *Pemilu Langsung ditengah Oligarki Partai*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Netherlands Institute for Multiparty Democracy (IMD), Hlm: vii

<sup>168</sup> Laporan Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 2004, *Buku 1 Resume*, Jakarta: Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2004. Hlm. 30

menunjukkan bakat menyanyinya di atas panggung. ‘Menyanyi’ dalam hal ini adalah janji-janji yang dilontarkan saat kampanye. Simbolisasi ini menggambarkan bahwa janji-janji mereka semasa kampanye dianggap sebagai hiburan belaka. Gambar dapat dilihat di lampiran 50.<sup>169</sup>

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2004, terdapat beberapa pelanggaran dan penyelewengan yang terekam dalam kartun editorial *Oom Pasikom*. Seperti kasus *money politic*, ijazah Palsu caleg, Politisi yang terjerat kasus korupsi, penggunaan fasilitas negara saat kampanye, dll.

Misalnya ketika menjelang Pemilu 2004, Isu mengenai politisi yang terlibat kasus korupsi saat itu melanda salah satu politisi partai Golkar, Akbar Tanjung. Ketika itu Akbar Tanjung berperan sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Sekretaris negara. Ia terjerat kasus penyelewengan dana non-bujeter Bulog (Badan Urusan Logistik) senilai Rp40 miliar. Singkatnya, kasus perkara pidana yang ditangani oleh Mahkamah Agung ini akhirnya memutuskan bahwa Akbar Tanjung tidak bersalah dan dinyatakan bebas, karena ia dianggap melaksanakan perintah jabatan sebagai Mensesneg dari Presiden BJ. Habibie. Harian *Kompas* yang menyindir kasus Akbar Tanjung sebagai isu politisi busuk menjelang pemilu. Hal ini kemudian di gambarkan dalam *Oom Pasikom* sebanyak tiga edisi. *Pertama*, dalam kartun tertulis, “..Ngsiapa Mbilang Ngsangya Ngingni Ngpolingtingsi Mbungsuk!” (Siapa bilang saya ini Politisi busuk!). *Kedua*, terdapat dialog antara tokoh *Oom Pasikom* dengan seorang anak kecil. Tokoh *Oom Pasikom* terlihat sedang membaca koran yang memuat foto menyerupai Akbar Tanjung. *Ketiga*, terlihat kartun mirip Akbar Tanjung yang sedang bergelantungan di pohon beringin. Ketiga gambar ini sama-sama mengangkat isu tentang kasus Akbar Tanjung yang mengkritik secara tajam sekaligus sinis yang dalam Harian *Kompas* disebut sebagai ‘politisi busuk’. Walaupun tidak secara langsung menyebut nama, namun penggambarannya jelas menunjukkan ciri-ciri fisik yang khas dimiliki seorang Akbar Tanjung<sup>170</sup>.

<sup>169</sup> Lihat Lampiran 50

<sup>170</sup> Lihat Lampiran 51



Dalam kurun waktu yang bersamaan, terdapat pula kartun editorial terbitan *Tempo* yang memvisualisasikan kasus Akbar Tanjung dengan sindiran lebih tajam, berani, dan pedas. Gambar Akbar Tanjung menjadi *cover* Majalah *Tempo* dengan hidung panjang menyerupai kartun Pinokio. Akbar Tanjung dianalogikan sebagai sosok Pinokio yang ketika berbohong, hidungnya akan semakin panjang. Hal ini memiliki relevansi dengan kasus penyalahgunaan dana nonbugeter Bulog yang menganggap Akbar Tanjung telah memberikan keterangan palsu dan berbohong kepada publik. Kartun Editorial *Tempo* dapat dilihat dalam Lampiran 52<sup>171</sup>.

Berdasarkan penjelasan kasus tersebut, dapat dibandingkan mengenai visualisasi dari isu yang sama, namun terdapat perbedaan metafora penggambaran dari dua surat kabar yang berbeda, yaitu antara *Kompas* dan *Tempo*. Dalam hal ini, Jakob Oetama selaku Pemimpin Umum *Kompas* pernah berpesan kepada kartunis GM Sudarta mengenai tugas pers yang perannya bukan untuk mengubah pendapat orang lain, bukan untuk mendobrak atau revolusi, melainkan untuk menyampaikan misi perbaikan<sup>172</sup>. Selain itu kebijakan editorial *Kompas* juga bersifat tidak menggugat apalagi menuduh dan menantang, tetapi mengajak berdialog, mengingatkan, dan memberi isyarat<sup>173</sup>. Pernyataan itulah yang menjadi credo dalam membuat kartun editorial. Jadi hal ini yang membedakan kartun *Oom Pasikom* dengan kartun editorial surat kabar lain.

Selain itu *Oom Pasikom* juga menyoroti proses kampanye lainnya, yaitu ketika Jenderal (Purn) R. Hartono selaku Ketua Umum Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mengadakan kampanye di Sleman, Yogyakarta. Dalam orasi kampanyenya, secara terang-terangan ia mengajak masyarakat Yogja untuk menjadi antek Soeharto<sup>174</sup>. Pernyataan Hartono yang mengajak masyarakat menjadi ‘antek’ jelas berkonotasi negatif dan tidak etis. Panwaslu kemudian menindaklanjuti dengan mengenakan pasal Nomor 7 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kampanye

<sup>171</sup> Lihat Lampiran 52

<sup>172</sup> *Loc.cit.*, 40 Tahun *Oom Pasikom*, Hlm. 263

<sup>173</sup> *Ibid.*, 40 Tahun *Oom Pasikom*, Hlm. ix

<sup>174</sup> <http://www.tempo.co.id/hg/nusa/jawamadura/2004/03/15/brk.20040315-40.id.html>, diakses pada hari Selasa 15 Mei 2012 pukul 23.33 wib

Pemilu DPR, DPD, DPRD. Kampanye Hartono ini digambarkan dalam *Oom Pasikom* edisi 17 Maret 2004<sup>175</sup>.

Di sela-sela masa kampanye Pemilu 2004, Taufik Kiemas, suami Presiden Megawati Soekarnoputri, menyatakan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, seharusnya lapor kepada presiden ketika akan mencalonkan diri sebagai capres. Karena menurutnya, itu sudah menjadi etika seorang menteri dalam kabinet presidensial harus memberikan laporan kepada presiden jika menteri ingin melakukan sesuatu. Dalam konteks ini, SBY ketika itu juga dikucilkan dalam kabinet. Menanggapi kejadian ini, Taufik Kiemas mengatakan, “*Jendral bintang empat kok seperti anak kecil*”. Visualisasi mengenai kejadian ini digambarkan dalam *Oom Pasikom* edisi 6 Maret 2004<sup>176</sup>. Dalam gambar terlihat seseorang yang menunjuk anak kecil dan berkata, “*Ngomong jangan seperti anak kecil*”. Gambaran ini merupakan sebuah metafora atas kejadian tersebut.

Selain gejala pernyataan yang mewarnai proses kampanye, kasus laporan pelanggaran Pemilu pun diterima Panitia pengawas Pemilu (pusat) pada tahapan kampanye putaran I. Pada Tanggal 17 Juni 2004, Ahsan Jamet Hamidi dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sebagai Pelapor kasus pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh capres dan cawapres pemilihan Presiden 5 Juli 2004, atas tuduhan *money politic* yang dilakukan oleh peserta pemilu pada pemilihan presiden<sup>177</sup>. Hal ini berarti para pelapor telah melanggar pasal 90 ayat (2) UU No.23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Memang masa menjelang Pemilu 2004 menjadi ajang bagi pemilik modal dan uang untuk melakukan praktek KKN dalam hal penyediaan kotak suara, kertas, dan tinta pemilu. Penggambaran mengenai pelanggaran ini tergambar dalam *Oom Pasikom* edisi 21 Februari 2004 dan 29 Maret 2004<sup>178</sup>. Dalam gambar terlihat kotak suara, kertas, dan tinta pemilu. Kemudian terdapat tulisan “...*Ada suaranya..cring-cring-cring*. Suara “*cring-*

<sup>175</sup> Lihat Lampiran 53

<sup>176</sup> Lihat Lampiran 54

<sup>177</sup> Laporan Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 2004, *Buku 3 Laporan Pengawasan Pemilu*, Jakarta: Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2004.

<sup>178</sup> Lihat Lampiran 55

*cring-cring....*” adalah simbolisasi bunyi uang receh yang menandakan bahwa ada indikasi ‘politik uang’ dalam penyediaan perlengkapan pemilu tersebut.

Dalam Pemilihan anggota Legislatif tingkat daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) pun tak luput dari tindak pelanggaran, seperti kasus penggunaan fasilitas negara selama masa kampanye. Hal ini digambarkan dalam *Oom Pasikom* edisi 10 Maret 2004<sup>179</sup>, dimana terlihat seseorang mengenakan jas berdasi yang menjadi simbolisasi seorang pejabat, sedang duduk diatas kursi yang ditandu oleh beberapa orang. Pada kursi tersebut terdapat *caption* / keterangan gambar yang tertulis ‘Fasilitas negara’. Gambar tersebut jelas menyindir seorang pejabat yang menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Data yang berhasil dihimpun dari dokumen Panitia Pengawasan Pemilihan Umum terkait penggunaan fasilitas negara, dapat dilihat dalam lampiran 57<sup>180</sup>.

Kemudian menurut data yang diterima Panwas Pemilu (Pusat), terdapat sekitar 19 pelanggaran terkait dengan pemalsuan ijazah oleh para peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Visualisasi *Oom Pasikom* terkait masalah ini tergambar dalam edisi 21 Januari 2004<sup>181</sup>. Dalam kartun terdapat gambar hewan keledai yang menjadi personifikasi seorang Caleg (Calon Legislatif). Diperjelas pula dengan *caption* / keterangan gambar yang tertulis pada tubuh keledai tersebut. Dalam hal ini perlu dipahami pula sebuah budaya yang menganggap bahwa hewan keledai adalah hewan yang bodoh. Bahkan dalam sebuah pribahasa Indonesia mengatakan “*hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama*”, yang maknanya merupakan ungkapan kebodohan seseorang. Kartun ini jelas mengandung sindiran keras dan tajam terhadap para Caleg yang menggunakan ijazah palsu dalam pencalonannya. Data yang berhasil dihimpun dari dokumen Panitia Pengawasan Pemilihan Umum terkait pemalsuan ijazah Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam lampiran 59<sup>182</sup>.

---

<sup>179</sup> Lihat Lampiran 56

<sup>180</sup> Lihat Lampiran 57

<sup>181</sup> Lihat Lampiran 58

<sup>182</sup> Lihat Lampiran 59

Setelah masa kampanye usai, kemudian dilaksanakan pemilu tahap I pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih anggota legislatif. Perolehan suara partai politik peserta Pemilu untuk Pemilu anggota DPR adalah Partai Golkar memperoleh 24.480.757 (21,58%) dari total 113.462.414 suara. Kemudian menyusul PDI Perjuangan dengan perolehan 21.026.629 (18,53%), Partai Kebangkitan Bangsa (10,57%), dan Partai Persatuan Pembangunan (8,15%), Partai Demokrat (7,45%), Partai Keadilan Sejahtera (7,34%), dan Partai Amanat Nasional (6,44%). Selengkapnya dapat dilihat tabel hasil penghitungan suara dalam lampiran 60<sup>183</sup>.

Ketika pemilu legislatif baru saja selesai dilaksanakan, tiba-tiba sekitar 19 partai politik menyatakan menolak hasil pemilu, mereka menamakan diri ‘Aliansi 19 Partai Politik’. Umumnya mereka adalah partai-partai kecil ditambah beberapa partai besar seperti PKB, PAN, dan PKS. Tetapi kemudian dua partai terakhir ini menarik diri<sup>184</sup>.

Penolakan ‘Aliansi 19 Parpol’ terhadap hasil pemilu ini didasarkan pada tidak terpenuhinya kewajiban perundang-undangan oleh KPU dan adanya indikasi kecurangan dan diskriminasi dalam pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara. Pernyataan itu disampaikan dua tokoh yang mengaku juru bicara aliansi, yakni Adnan Buyung Nasution dan KH Abdurrahman Wahid. Namun, penolakan hasil pemilu bahkan tuntutan diadakannya pemilu ulang dianggap terlalu mustahil untuk dilakukan mengingat banyaknya waktu, biaya, dan tenaga yang harus dikorbankan. Perihal Aliansi 19 Parpol ini tergambar dalam kartun editorial *Oom Pasikom* edisi 14 April 2004, dimana terlihat kartun mirip Adnan Buyung Nasution sedang memegang kertas bertuliskan “Aliansi 19 Parpol”<sup>185</sup>. Dalam gambar terlihat tokoh *Oom Pasikom* berkata, “*Saya yang nyoblos kok abang yang marah-marah*”. Visualisasi ini adalah sebuah sindiran yang ditujukan kepada Aliansi 19 Parpol khususnya kepada tokoh yang paling vokal, Adnan Buyung Nasution.

Setelah reda persoalan tuntutan Aliansi 19 Parpol, KPU pun segera melanjutkan agenda Pemilu selanjutnya yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden

<sup>183</sup> Lihat Lampiran 60

<sup>184</sup> Denny JA, 2006, *Jejak-Jejak Pemilu 2004*, Yogyakarta: LKIS, Hlm, 264

<sup>185</sup> Lihat Lampiran 61

pada tanggal 5 Juli 2004. Pada masa kampanye menjelang pilpres ini, semua capres berkampanye anti korupsi, namun sangat berlawanan dengan yang realitas yang terjadi di lapangan. Kenyataannya impor gula yang dilakukan induk koperasi unit desa, sebanyak 56.862 ton dinyatakan ilegal, dan kasus penjualan kapal tanker pertamina berindikasi korupsi<sup>186</sup>. Kondisi kontradiktif ini digambarkan pula dalam *Oom Pasikom*<sup>187</sup>, dimana ketika kelima pasangan calon sedang berkampanye anti-korupsi, disaat yang bersamaan pula korupsi masih merajalela.

Dalam pemilu 5 Juli 2004 ini *Oom Pasikom* juga memvisualisasikan mantan Presiden Soeharto yang terlihat sedang berjalan dengan menggunakan tongkat saat menggunakan hak suaranya di TPS. Dalam gambar tersebut nampak seseorang dengan bahasa tubuh penuh rasa hormat dan santun, menyapa orang yang mirip Soeharto dengan menggunakan bahasa jawa (*krama*) halus: “*Wilujeng, Pak..sampun dhangn nggih?*” (Selamat, Pak..sudah sehat ya?)<sup>188</sup>. Pemandangan ini selain menunjukkan budaya hormat dan santun kepada yang lebih tua, umumnya sikap demikian sangat dipelihara di lingkungan feodal Jawa di mana stratifikasi sosial, tata nilai dan tata hubungan dijaga ketat melalui berbagai aturan untuk melestarikan sistem sosial budaya yang dianut. Dalam pergaulan Jawa pinggiran, biasanya bahasa “*ngoko*” (kasar) yang egaliter lebih sering digunakan daripada bahasa “*Krama*” (halus).

Kemudian setelah terdapat beberapa penggambaran *Oom Pasikom* masa pemungutan suara, dilanjutkan dengan penghitungan suara pada tanggal 26 Juli 2004. Hasil penghitungan suara terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004  
Putaran Pertama**

No.	Pasangan Capres	Suara
1	Susilo B.Y. - J. Kalla	39.838.184
2	Megawati - Hasyim M	31.569.104
3	Wiranto-Sallahudin W.	26.286.788

<sup>186</sup> *Kompas*, 23 Juni 2004

<sup>187</sup> Lihat Lampiran 62

<sup>188</sup> Lihat Lampiran 63

4	Amien Rais - Siswono Y.H.	17.392.931
5	Hamzah H. - Agum G.	3.569.861
<b>Jumlah suara</b>		<b>118.656.868</b>

Sumber: Dokumen Panitia Pengawas Pemilu

Total suara sah adalah 118.656.868 suara. Adapun suara tidak sah 2.636.976 (2%). Jumlah pemilih yang tidak menggunakan haknya sebanyak 31.026.700. KPU menyatakan cukup prihatin karena persentasenya lebih besar daripada ketika pemilu legislatif. Pada pemilu legislatif jumlah mereka yang menggunakan hak pilihnya adalah 88%, sedangkan dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I ini turun menjadi 76%<sup>189</sup>. Mengenai Golput ini, terdapat dalam visualisasi *Oom Pasikom*<sup>190</sup>. Visualisasinya hanya kertas kosong dengan tulisan, “*maaf, bukannya saya mau kampanye Golput, melainkan sedang kehabisan ide*”. Pernyataan ini tentunya bermakna sindiran yang bersifat metafora terhadap Golput.

Penghitungan hasil perolehan suara kali ini berbasis teknologi informasi oleh KPU. Namun dalam implementasinya ditemui berbagai masalah dalam proses penghitungan suara. Misalnya soal lonjakan suara misterius yang mencapai 70 juta, kemudian masalah *human error*, *hacker*, dan lain sebagainya<sup>191</sup>. Masalah ini pun tergambar dalam *Oom Pasikom* edisi 14 Juli 2004<sup>192</sup>. Dalam kartun terdapat tulisan, “*Garbage in..Garbage Out*”. Istilah ini lazim digunakan di dunia komputer khususnya dalam hal pengolahan data elektronik yang artinya menandakan sebuah peringatan bahwa tidak ada program yang menghasilkan keluaran yang sempurna apabila memakai data yang keliru. Dalam hal ini, data-data pemilu yang dimasukkan berarti banyak mengandung kesalahan.

<sup>189</sup> Pernyataan keprihatinan KPU terhadap menurunnya jumlah pemilih dalam pemilu presiden putaran pertama dibanding pemilu legislatif, disampaikan oleh Ramlan Surbakti, Wakil ketua KPU. Lihat “*Hasil penghitungan suara Pemilu Presiden Putaran I: Pasangan Yudhoyono-Kalla dan Pasangan Megawati-Hasyim Maju ke Putaran II*”, [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

<sup>190</sup> Lihat Lampiran 64

<sup>191</sup> Marsudi Wahyu Kisworo, 2004, *Masalah-Masalah Perhitungan Suara Berbasis TI Pemilu 2004*, disampaikan dalam diskusi dengan Panwaslu di Jakarta, 8 April 2004. <http://kambing.ui.ac.id/onnopurbo/library/library-ref-ind/ref-ind-1/application/policy/masalah%20sistem%20ti%20pemilu%202004.pdf>. Diakses pada hari Selasa 15 Mei 2012 pukul 00.21 wib

<sup>192</sup> Lihat Lampiran 65

Kemudian berdasarkan hasil penghitungan suara tahap I yang telah ditetapkan KPU pada tanggal 26 Juli 2004, ternyata menunjukkan tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%. Oleh karena itu maka akan digelar Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II yang akan menghadapkan pemenang pertama dan kedua hasil pemilu putaran I. Dalam hal ini pasangan SBY-Kalla yang memperoleh suara 39% dengan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi yang memperoleh suara 31%.

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II ini akan diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004. Kemudian hasil penghitungan suara yang dilakukan sejak hari Sabtu malam, 2 Oktober-Senin, 4 Oktober 2004 secara keseluruhan diperoleh hasil bahwa jumlah suara sah 114.257.054 suara, dan suara tidak sah 2.405.651 suara. Hal itu berarti seluruh suara yang masuk adalah 116.662.705 orang<sup>193</sup>.

Dari total suara sah yang masuk, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang memegang nomor urut 4 pada surat suara, memperoleh 69.266.350 (60,62%) dukungan, sedangkan pasangan Megawati Soekarnoputri- Hasyim Muzadi yang bernomor urut 2, memperoleh 44.990.704 (39,38%) dukungan.<sup>194</sup>

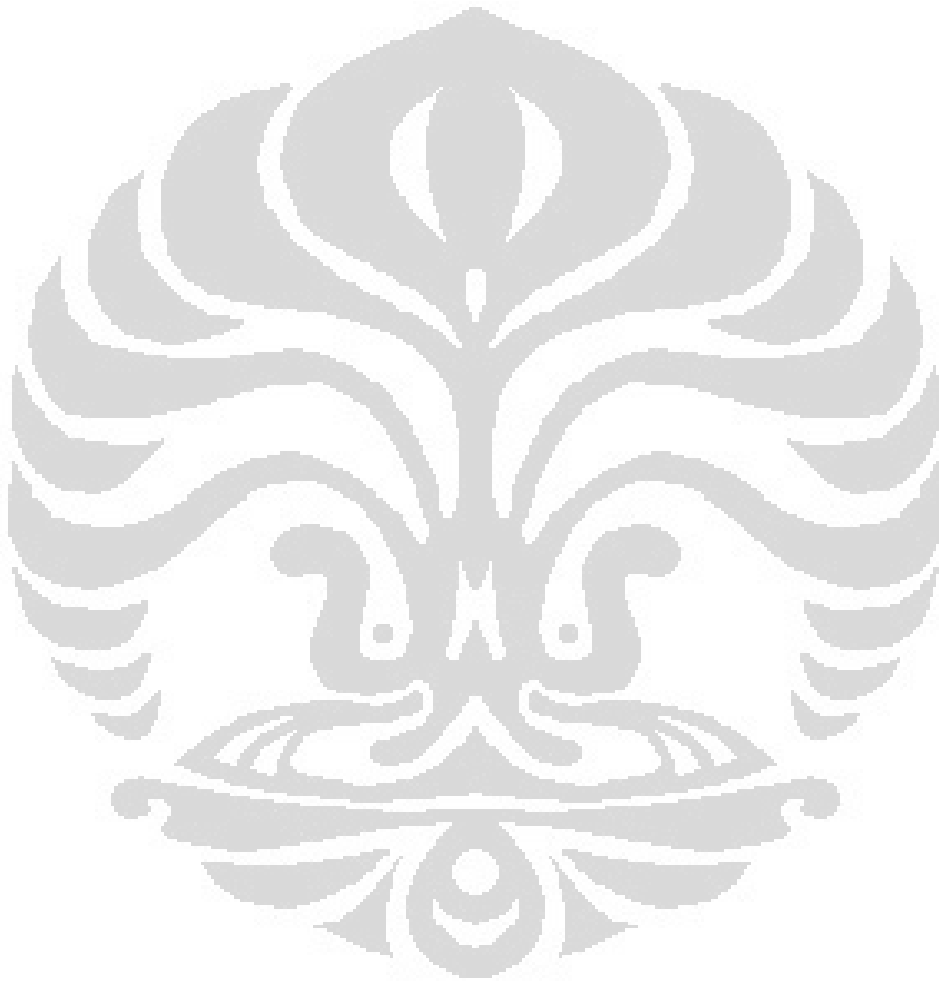
Oleh karena itu, berdasarkan hasil penghitungan suara akhir Pemilu 2004, terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2004-2009.

Dengan demikian, dapat terlihat jelas bagaimana GM Sudarta memvisualisasikan Pemilu 2004 dalam suasana reformasi. Gambar-gambar kartun editorial yang diungkapkan pada pemilu kali ini juga memiliki perbedaan dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang diselenggarakan selama masa Orde baru dan Pemilu pertama masa reformasi tahun 1999. Dalam visualisasi Pemilu kali ini, gambar-gambar yang ditampilkan lebih berani dalam mengungkapkan pola-pola

<sup>193</sup> Opcit., *Buku 3 Laporan Pengawasan Pemilu Pertahanan*, Hlm. 162

<sup>194</sup> Lihat "Rekapitulasi Manual Hasil Pilpres II: Pasangan SBY-Jusuf Kalla Memperoleh 60,62%, Megawati-Hasyim 39,38%, [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

pelanggaran dan tindak kecurangan yang tidak diungkapkan di era sebelumnya. Tentu saja hal ini sangat terkait dengan kebijakan pemerintah yang berkuasa ketika itu. Semakin represif pemerintah yang berkuasa, maka semakin tersamar dan tersembunyi pula gambar yang ditampilkan. Begitu juga sebaliknya, semakin permisif pemerintah yang berkuasa, maka semakin bebas dan gamblang pula gambar yang ditampilkan.





## **BAB V KESIMPULAN**

Perjalanan kartun editorial *Oom Pasikom* dalam mengawal sebuah demokrasi di Indonesia memang mengalami perkembangan dari masa ke masa. Penggambaran proses penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia divisualisasikan dengan cara yang berbeda dan umumnya disesuaikan dengan iklim pemerintahan rezim yang berkuasa. Seperti yang terlihat dalam visualisasi Pemilu *Oom Pasikom* dari zaman Orde Baru sampai Era Reformasi.

Walaupun dalam setiap penyelenggaraan Pemilu mengusung asas demokrasi, namun kenyataannya berbagai macam bentuk pelanggaran, kecurangan, dan penyelewengan yang terjadi dilapangan, tidak bisa semudah itu diungkapkan secara bebas dalam bentuk visualisasi kartun editorial *Oom Pasikom*. Sehingga dalam penyampaiannya, GM Sudarta sebagai seorang kartunis juga menggunakan berbagai cara agar hasil karyanya tetap dimuat sekaligus tetap berada pada koridor yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini tentunya perlu dipertimbangkan dalam membuat hasil karya kartun editorial agar surat kabar yang memuat kartun tersebut bisa terus bertahan dan ‘selamat’ dari pembredelan. Pernah suatu kali pada tahun 1970-an, GM Sudarta menyampaikan kartun yang memuat komentar dan kritik keras. Namun ia mendapat teguran dari Jakob Oetama (Pemimpin Umum *Kompas*) karena menurutnya tugas pers bukan untuk mengubah pendapat orang lain, bukan untuk mendobrak atau revolusi melainkan untuk menyampaikan misi perbaikan. Hal tersebutlah yang kemudian dipegang oleh GM sudarta sebagai credo dalam membuat kartun. Dalam menciptakan karya kartun editorial pun GM Sudarta mengaku sering membuat kartun yang sama bila masalahnya terulang kembali. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan agar senantiasa terjadi perubahan dan perbaikan sejalan dengan peran kartun editorial yang membawa misi perbaikan. Secara tak langsung, dapat dikatakan bahwa GM Sudarta telah melakukan *Self Plagiarism*, dimana ia menggunakan kembali karya yang sebelumnya pernah dibuatnya sendiri, tanpa mencantumkan referensi karya tersebut ke publikasi yang baru. Beberapa kartun yang memiliki kesamaan terdapat dalam edisi 24 April 1987, 10 Juni 1992, 31 Mei 1997, dan 4 Juni 1997.

Ketika memasuki zaman Orde Baru, sikap hati-hati perlu dilakukan dalam membuat kartun editorial. Pada masa ini kebebasan pers sangat terbatas dan sikap mengkritik serta kontra terhadap kebijakan pemerintah dianggap mengganggu stabilitas negara. GM Sudarta pun memahami betul batasan sasaran kritiknya dan tidak menyinggung hal yang berkaitan dengan Soeharto dan keluarga istana, hal ini tentu dimaksudkan agar surat kabar yang menaunginya bebas dari pembredelan. Kondisi ini membuat sebuah karya kartun editorial tidak memiliki ruang yang luas untuk berekspresi secara bebas. Penyelenggaraan Pemilu sebagai syarat kehidupan demokrasi pun penuh dengan rekayasa. Berbagai pelanggaran dan penyelewengan selama Pemilu-pemilu Orde Baru tidak dapat divisualisasikan secara gamblang karena kekhawatiran surat kabarnya akan di breidel. Oleh karena itu pengungkapan kartun editorial semasa Orde baru ini banyak menggunakan simbol-simbol dan metafora yang tersamar dalam menyampaikan kritik / sindiran. Misalnya pada kartun edisi 8 Mei 1971 yang terlihat orang bernyanyi "*Pohon Bering...*" namun kalimat tersebut terputus dan terdapat bagian yang hilang. Dalam gambar tersebut orang itu bermaksud menyebut "Pohon Beringin" (Lambang Golkar), namun kalimat tersebut tak sempat diselesaikannya. Visualisasi ini menggambarkan adanya rasa takut dan kehati-hatian dalam mengucapkan sesuatu.

Perbedaan visualisasi kartun editorial mulai terasa ketika memasuki era Reformasi, dimana pemerintahan pada masa ini cenderung bersikap permisif. Kebebasan pers pun mulai terasa sehingga para kartunis pun bebas mengekspresikan kreativitasnya. Peristiwa yang terjadi selama Pemilu 1999 banyak divisualisasikan kedalam kartun editorial *Oom Pasikom*. Berbagai macam bentuk pelanggaran dan kecurangan selama Pemilu pun mulai diungkapkan. Seperti masalah politik uang, intimidasi, penggunaan fasilitas negara saat kampanye, dan lain-lain. Pada masa ini *Oom Pasikom* mulai berani mengungkapkan realitas yang terjadi saat Pemilu. Cara pengungkapannya pun menjadi lebih *to the point*. Misalnya kartun dalam edisi 1 Mei 1999. Kartun tersebut mengungkapkan adanya kasus politik uang. Visualisasi ini disimbolkan dengan gambar bunglon (menyimbolkan partai) yang menjerat rakyat dengan lidahnya yang bergambar uang. Pengungkapan pelanggaran ini tentunya tidak mungkin diungkapkan pada Pemilu Orba yang bersifat represif.

Dinamika perubahan kartun editorial *Oom Pasikom* terlihat jelas ketika memasuki Pemilu kedua di Era Reformasi pada tahun 2004. Kompleksitas persoalan serta pola-pola aksi kecurangan pada pemilu-pemilu sebelumnya yang kerap kali muncul, kali ini divisualisasikan secara lebih berani, tajam dan *to the point*. Hawa kebebasan ini membuat GM Sudarta sebagai seorang kartunis lebih produktif dalam menghasilkan karya-karyanya. Berbagai pelanggaran Pemilu seperti politik uang, intervensi, penyalahgunaan fasilitas negara, kasus ijazah palsu, manipulasi, dan lain-lain menjadi pemandangan yang sering muncul dalam karya GM Sudarta. Bahkan ia tak segan-segan untuk ‘menunjuk hidung’ seorang oknum yang menjadi sasaran kritiknya. Misalnya seperti kasus Akbar Tanjung yang disebut sebagai ‘politisi busuk’, ataupun kartun dalam edisi 21 Januari 2004 yang menggambarkan hewan keledai sebagai personifikasi dari Caleg (Calon Legislatif) yang menggunakan ijazah palsu untuk mencalonkan dirinya. Hal ini menandakan bahwa iklim pemerintahan yang lebih bebas, membuat kartunis lebih bebas pula dalam berekspresi bahkan mampu mengkritik secara sinis.

Pemilu 2004 ini juga memiliki arti strategis dalam proses transisi demokrasi Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Pemilu masa Reformasi ini merupakan momentum untuk mengukur sejauh mana proses demokratisasi bisa berlangsung. Terlebih pada masa ini transisi demokrasi sudah berjalan sekitar enam tahun terhitung setelah jatuhnya Orde baru. Sekurang-kurangnya, Pemilu 2004 ini bisa menjadi tolok ukur bagaimana kualitas demokrasi Indonesia berjalan pasca Orde baru.

Dengan demikian, melalui kartun editorial *Oom pasikom*, dapat dilihat bahwa sebuah rezim yang berkuasa sangat mempengaruhi visualisasi kartun editorial dari masa ke masa. *Oom Pasikom* pun mampu memvisualisasikan realitas Pemilu secara kreatif dalam dua masa yang berbeda (Orde Baru dan Reformasi). Ketika kata-kata dibungkam, ketika tak cukup ruang untuk berbicara, maka sebuah kartun tetap bisa menjalankan misinya. Kartun editorial *Oom Pasikom* sangat berkontribusi dalam perjalanan umur *Kompas* dan juga dalam sejarah perkembangan kartun editorial di Indonesia.

## DAFTAR SUMBER

### Dokumen:

*Berawal dari Kantor Tumpangan dan Mesin Tik Pinjaman.* Dalam Lembaran Brosur Kompas untuk Hari Pers Nasional 1989. Sumber: Litbang Kompas

*Laporan Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004.* Jakarta: Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2004.

Buku 1 Resume

Buku 3 Laporan Pengawasan Pemilu Pertahapan

Buku 5 Data dan Angka

### Mikrofilm:

*Harian Rakyat*, 25 September 1955

*Harian Rakjat*, 26 September 1955

### Majalah:

*Prisma*, No.1 Tahun XXV Januari 1996

*Tempo*, 30 Juni 1990

*Tempo*, 17 Agustus 2007

### Surat Kabar:

Kompas, 18 Oktober 1969

Kompas, 17 Februari 1976

Kompas, 3 Oktober 1970

Kompas, 17 Maret 1976

Kompas, 29 Oktober 1970

Kompas, 14 April 1976

Kompas, 31 Desember 1970

Kompas, 23 Februari 1977

Kompas, 22 Februari 1971

Kompas, 23 April 1977

Kompas, 20 Maret 1971

Kompas, 30 April 1977

Kompas, 5 Maret 1971

Kompas, 4 Mei 1977

Kompas, 8 Mei 1971

Kompas, 2 Juni 1980

Kompas, 15 Mei 1971

Kompas, 7 Juni 1981

Kompas, 22 Mei 1971

Kompas, 16 Maret 1982

Kompas, 5 Juni 1971

Kompas, 21 April 1982

Kompas, 17 Juni 1971

Kompas, 24 April 1982

Kompas, 13 Maret 1982  
 Kompas, 28 April 1982  
 Kompas, 1 Mei 1982  
 Kompas, 5 Mei 1982  
 Kompas, 21 November 1984  
 Kompas, 22 Oktober 1985  
 Kompas, 1 April 1987  
 Kompas, 24 April 1987  
 Kompas, 2 Mei 1987  
 Kompas, 30 Juni 1990  
 Kompas, 3 Juli 1991  
 Kompas, 10 Juli 1991  
 Kompas, 3 Juni 1992  
 Kompas, 6 Juni 1992  
 Kompas, 10 Juni 1992  
 Kompas, 1 Juli 1992  
 Kompas, 29 November 1995  
 Kompas, 8 Juni 1996  
 Kompas, 15 Maret 1997  
 Kompas, 24 Mei 1997  
 Kompas, 31 Mei 1997  
 Kompas, 4 Juni 1997  
 Kompas, 13 Desember 1998  
 Kompas, 30 Januari 1999  
 Kompas, 3 Maret 1999  
 Kompas, 7 April 1999  
 Kompas, 21 April 1999  
 Kompas, 1 Mei 1999  
 Kompas, 9 Juni 1999  
 Kompas, 7 Juli 1999  
 Kompas, 2 September 1999  
 Kompas, 23 Oktober 1999  
 Kompas, 27 Oktober 1999  
 Kompas, 22 Oktober 1999  
 Kompas, 3 Januari 2004  
 Kompas, 21 Januari 2004  
 Kompas, 4 Februari 2004  
 Kompas, 5 Februari 2004  
 Kompas, 21 Februari 2004  
 Kompas, 6 Maret 2004  
 Kompas, 10 Maret 2004  
 Kompas, 17 Maret 2004  
 Kompas, 3 April 2004  
 Kompas, 14 April 2004  
 Kompas, 7 April 2004  
 Kompas, 23 Juni 2004  
 Kompas, 14 Juli 2004

**Buku:**

- Alfian. 1993. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.  
 Ali, Novel. 1999. *Peradaban Komunikasi Politik..* Bandung Rosda Karya.  
 Brotoatmodko, 1997. *Demokrasi dan HAM dalam Kartun Pers*. Jakarta: Institut Ecata Publication

- Budiardjo, Prof. Miriam. 1992. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cet.4., Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- 1994. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama
- Cambridge Advances Learner's Dictionary. 2nd Edition. Cambridge University Press 2005.
- Gonggong, Dr. Anhar, Prof. Dr. Musa Asy'arie. 2005. *Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi*. Departemen Komunikasi dan Informatika
- Gottschalk, Louis. 2006. *Mengerti Sejarah* (terj. Nugroho Notosusanto), Jakarta: UI Press,
- Haris, Syamsudin. 2005. *Pemilu Langsung ditengah Oligarki Partai*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Netherlands Institute for Multiparty Democracy (IMD)
- International Foundation for Election sistem. 2005. *Laporan Pemilu 7 Juni 1999 Republik Indonesia*. Washington DC.
- Irsyam, Mahrus, et.al. 1985. *Sejarah Kepartaian di Indonesia*. Jakarta: IDSN, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- J.A, Denny. 2006. *Jejak-jejak Pemilu 2004*. Yogyakarta: LKIS
- Jackson, Karl D. and Lucian W.Pye. 1978. (ed.), *Political Power and Communications in Indonesia*. Berkeley: University of California Press
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Cetakan pertama. Edisi ke-2. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Kristiadi, J. 1997. *Pemilihan Umum 1997: Perkiraan, Harapan, dan Evaluasi*. Jakarta: CSIS
- Liddle, R. William. 1994. *Pemlu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik* . Jakarta: LP3ES
- Mahamood, Mulyadi. 1999. *Kartun dan Kartunis*. Stilglow Sdn. Bhd, Selangor.
- Manning, Haydon, et.al. 2001. *Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis*. Yogyakarta: LKIS.
- M, Sudibjo, 1995. *Pemilihan Umum 1992*. Jakarta: CSIS.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: FISIP UGM
- Pramoedjo, Pramono R. 2008. *Kiat Mudah Membuat Karikatur : Panduan Ringan dan Praktis Menjadi Karikaturis Handal*. Jakarta: Creative Media

- Priyanto, S., 2005, *Metafora Visual Kartun pada Surat Kabar Jakarta 1950-1957*, Disertasi, FSRD ITB, Bandung.
- Poerbopranoto, Koentjoro. 1960. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Surabaya: Penerbitan Universitas Airlangga
- Santoso, Topo dkk. . 2006. *Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi).
- Scott, McCloud. 2001. *Understanding Comics*. Jakarta: PT Gramedi
- Sibarani, Agustin. 2001. *Karikatur dan Politik*. Jakarta: PT Gramedia
- Simanjuntak, Togi. 1998. *Wartawan Terpasung*. Jakarta: ISAI.
- Smith, Edward C. 1983. *Pembreidelan Pers di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sobur, Alex. 2003. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suaib, Wahidah. 2005. *Optimalisasi tindak lanjut pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu: Dilema pengawasan pemilu 2004*. Tesis FISIP-UI.
- Sudarta, GM. 2007. *40 Tahun Oom Pasikom: Peristiwa dalam Kartun Tahun 1967-2007*. Jakarta: PT Gramedia
- , 1980. *Indonesia 1967-1980 Kumpulan Kartun*. Jakarta: PT Gramedia
- , 2000. *Reformasi: Sejak Tumbangnya Orde Baru sampai Lahirnya Reformasi dalam Kartun*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suwardi, Dr. Harsono. 1993. *Peranan Pers dalam Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- The Oxford English Reference Dictionary, 1995, Edited by Judy Pearsall And Bill Trumble, New york: Oxford University Press
- Wijana, I Dewa Putu. 2003. *Kartun: Studi Tentang Permainan Bahasa*. Yogyakarta: Ombak Yogyakarta.

### Jurnal:

Haydon Manning and Robert Phiddian. *Censorship and the Political Cartoonist*. Konferensi Asosiasi studi politik Australia di Universitas Adelaide, 29 September-1 Oktober 2004. Dalam [http://www.adelaide.edu.au/apsa/docs\\_papers/Others/Manning.pdf](http://www.adelaide.edu.au/apsa/docs_papers/Others/Manning.pdf).

Richard Ostrom. *Risky Business: Three Political Cartooning Lessons from Indonesia during Suharto's Authoritarian Rule*, *Political Science and Politics*. Vol.40 No.2 (April 2007). Publisher: American Political Science Association.

<http://www.jstor.org/stable/20451948>. diakses pada hari Rabu, 6 Februari 2012 pukul 17.15 wib.

Cecep Rukendi. *Analisis wacana Pariwisata di Harian Kompas*, dalam Jurnal Kepariwisata Indonesia. Vol. 3 No. 2 Juni 2008. <http://isjd.pdi.lipi.go.id/admin/jurnal/3208181193.pdf>. diakses 20 Maret 2012, pukul 15.25 WIB

### Internet:

<http://merahputihbookshop.xikat.com/product/item/6/books/non.fiction/2mj.fikiran.rajat>. diakses 10 Mei 2011, diakses 10 Mei 2011, pukul 23.04 WIB

<http://history22education.wordpress.com/2010/harian-rakjat>. diakses 10 Mei 2011, pukul 23.22 WIB

<http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/djawa-baroe>. diakses 10 Mei 2011, pukul 00.05 WIB

<http://books.google.co.id/books/koran+indonesia+raya>. diakses 10 Mei 2011, pukul 00.18 WIB

<http://www.linkedin.com/company/harian-kompas>. diakses 3 Desember 2011, pukul 00.05 WIB

*Cartoon Analysis Guide*,

<http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/activities/political-cartoon/cag.html>, diakses pada 4 Desember 2011, pukul 23.43 wib.

Agus Hamonangan, Kartun Politik Bukan Lagi Satu-satunya Tema, <http://www.mail-archive.com/forum-pembaca-kompas@yahoo.com/msg17217.html>. diakses pada hari Minggu, 18 Maret 2012 pukul 21.39 wib.

<http://repository.unhas.ac.id>. diakses pada tanggal 9 Maret 2012. Pukul 00.26 wib.

“*Nama Kompas Pemberian Bung Karno*”. <http://lipsus.kompas.com/hut45/sejarahkompas>. diakses pada tanggal 9 Maret 2012. Pukul 17.42 WIB.

<http://www.kompasgramedia.com/aboutkg/history>. diakses pada tanggal 20 Maret 2012. Pukul 13.24 wib.

Jakob Oetama: meresapi komitmen keentrepreneuran, <http://sosok.kompasiana.com/2011/10/17/jakob-oetama-meresapi-komitmen-keentrepreneuran/>. diakses pada tanggal 20 Maret 2012. Pukul 15.40 wib.

[http://repository.upi.edu/operator/upload/s\\_sej\\_022715\\_chapter4.pdf](http://repository.upi.edu/operator/upload/s_sej_022715_chapter4.pdf). diakses pada tanggal 20 Maret 2012. Pukul 14.17 WIB.



<http://www.cartoonesia.web.id/2011/05/sekilas-mengenai-gm-sudarta.html>. diakses pada tanggal 9 Maret 2012. Pukul 13.56 wib.

<http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/691>. diakses pada tanggal 9 Maret 2012. Pukul 13.58 wib.

<http://kartunmartono.wordpress.com/semua-tentang-gm-sudarta/>. “GM Sudarta: Master of the art of criticism”. diakses pada tanggal 9 Maret 2012. Pukul 14.19 wib.

Heyder Affan. 40 Tahun Oom Pasikom: Kartun Tepo seliro. disiarkan Radio BBC Siaran Indonesia, pada Rubrik Seni dan Budaya. Minggu, 8 Juli 2007. dalam <http://heyderaffan.multiply.com/journal/item/7>. Diakses pada hari Minggu, 12 Maret 2012 pukul 19.45 wib

[http://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1c.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf).  
<http://kanalpemilu.net/?q=node/80>. “Jumlah Golput pada Pemilu 1955-2004”. diakses pada hari Rabu, 9 Mei 2012 pukul 14.25 wib.

[http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=43&Itemid=66](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=66). “Pemilu dalam Sejarah”. diakses pada hari Rabu, 9 Mei 2012 pukul 14.25 wib.

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1987/03/28/NAS/mbm.19870328.NAS29262.id.html>. “Sebuah pesta tanpa selimut gula ini dia kampanye”, diakses pada hari Rabu, 2 Mei 2012 pukul 15.11 wib

<http://politik.vivanews.com/news/read/4926-perang-batu-di-lapangan-banten-1-2>. oleh Bonnie Triana, “Perang Batu di Lapangan Banteng”, diakses pada hari Rabu, 2 Mei 2012 pukul 23.38 wib.

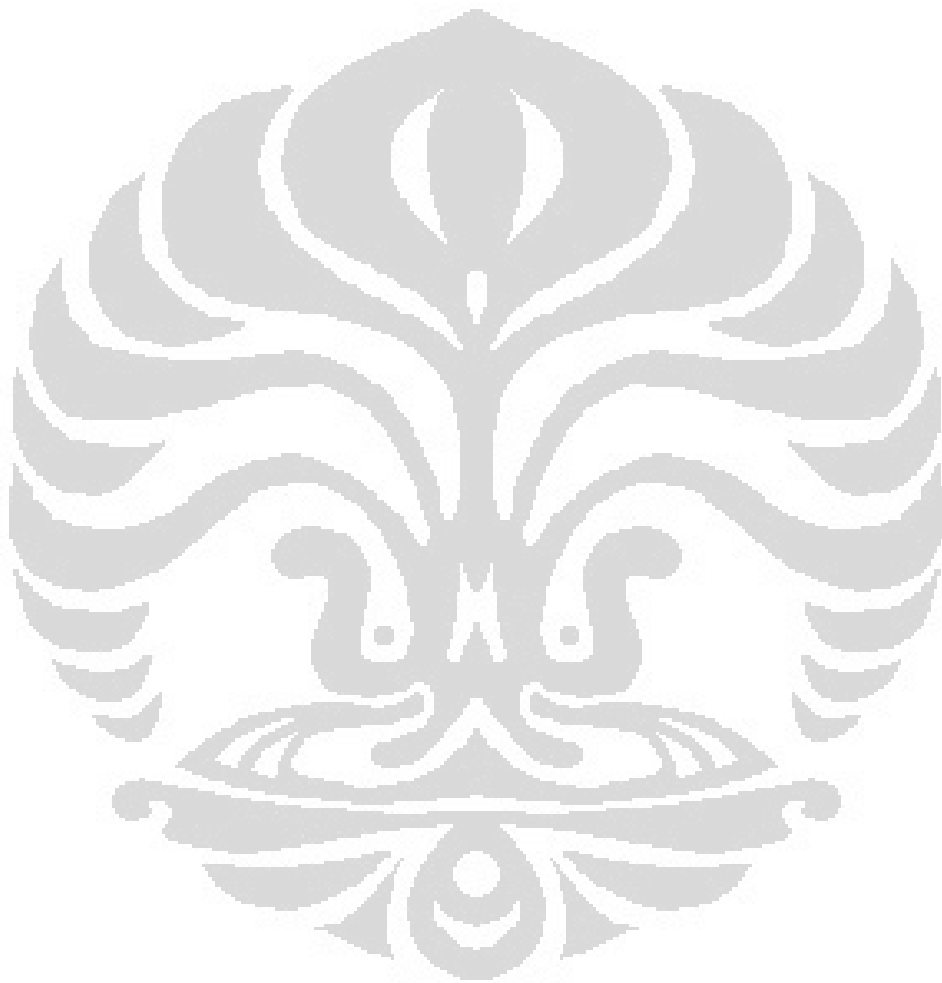
<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1991/07/20/NAS/mbm.19910720.NAS14554.id.html>. Ahmed K. Soerawidjaja, Sri Indrayati dan Zed Abidien, “Kuda-kuda untuk sang trauma”, 20 Juli 1991, diakses pada hari Rabu, 2 Mei 2012 pukul 21.54 wib.

<http://www.tempo.co.id/ang/min/02/09/utama5.html>. “Kampanye 1997 : Di Antara Rusuh dan Boikot”, diakses pada hari Kamis, 3 Mei 2012 pukul 22.32 wib.

<http://www.bappenas.go.id/node/45/735/perkembangan-inflasi/>. diakses pada hari Minggu, 6 Mei 2012 pukul 20.45 wib.

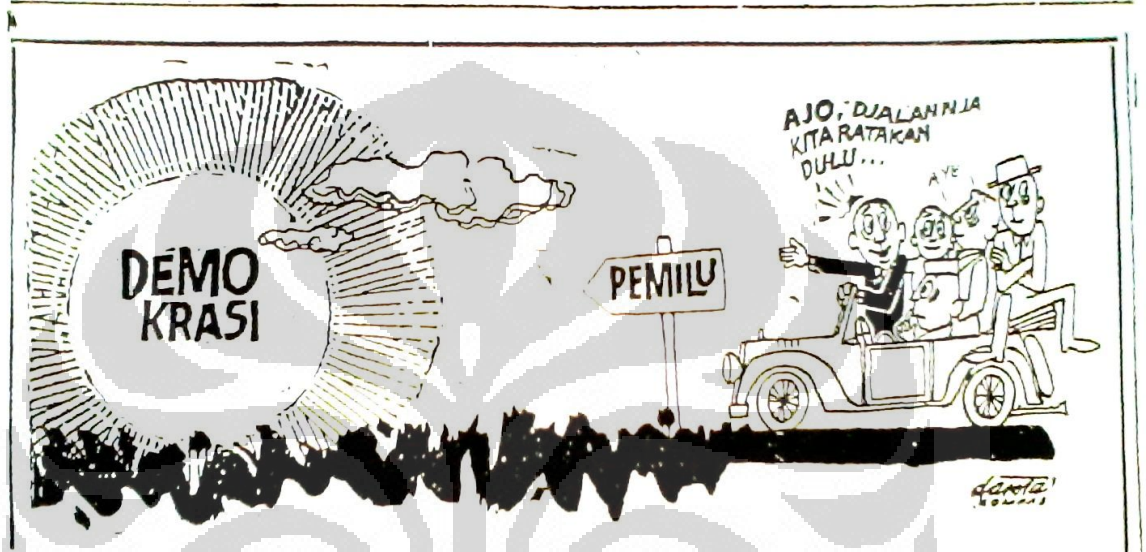
<http://www.tempo.co.id/hg/nusa/jawamadura/2004/03/15/brk,20040315-40.id.html>. diakses pada hari Selasa 15 Mei 2012 pukul 23.33 wib

Marsudi Wahyu Kisworo. Masalah-Masalah Perhitungan Suara Berbasis TI Pemilu 2004. disampaikan dalam diskusi dengan Panwaslu di Jakarta, 8 April 2004. <http://kambing.ui.ac.id/onnopurbo/library/library-ref-ind/ref-ind-1/application/policy/masalah%20sistem%20ti%20pemilu%202004.pdf>. Diakses pada hari Selasa 15 Mei 2012 pukul 00.21 wib.



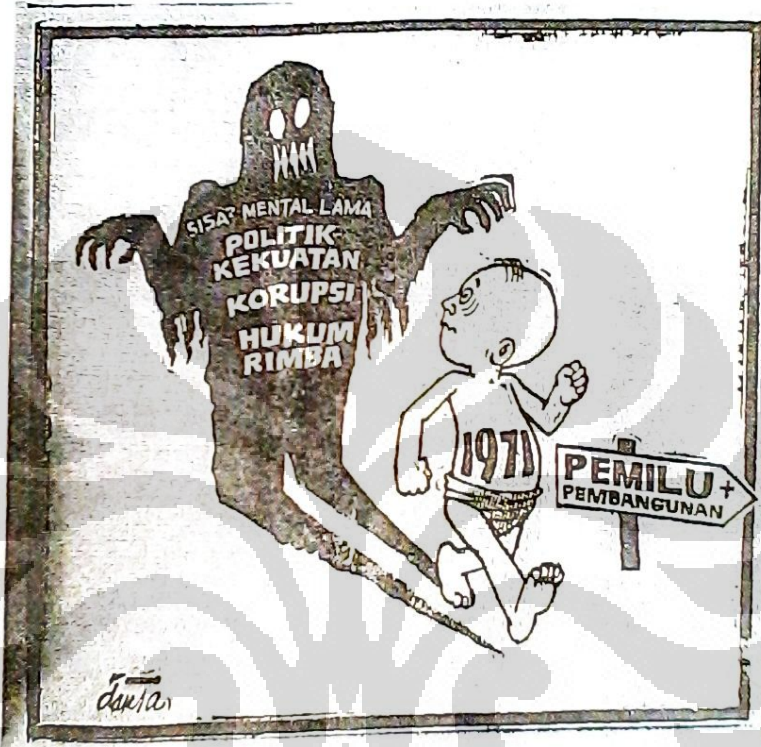
# Lampiran 1

SABTU, 18 OKTOBER 1969

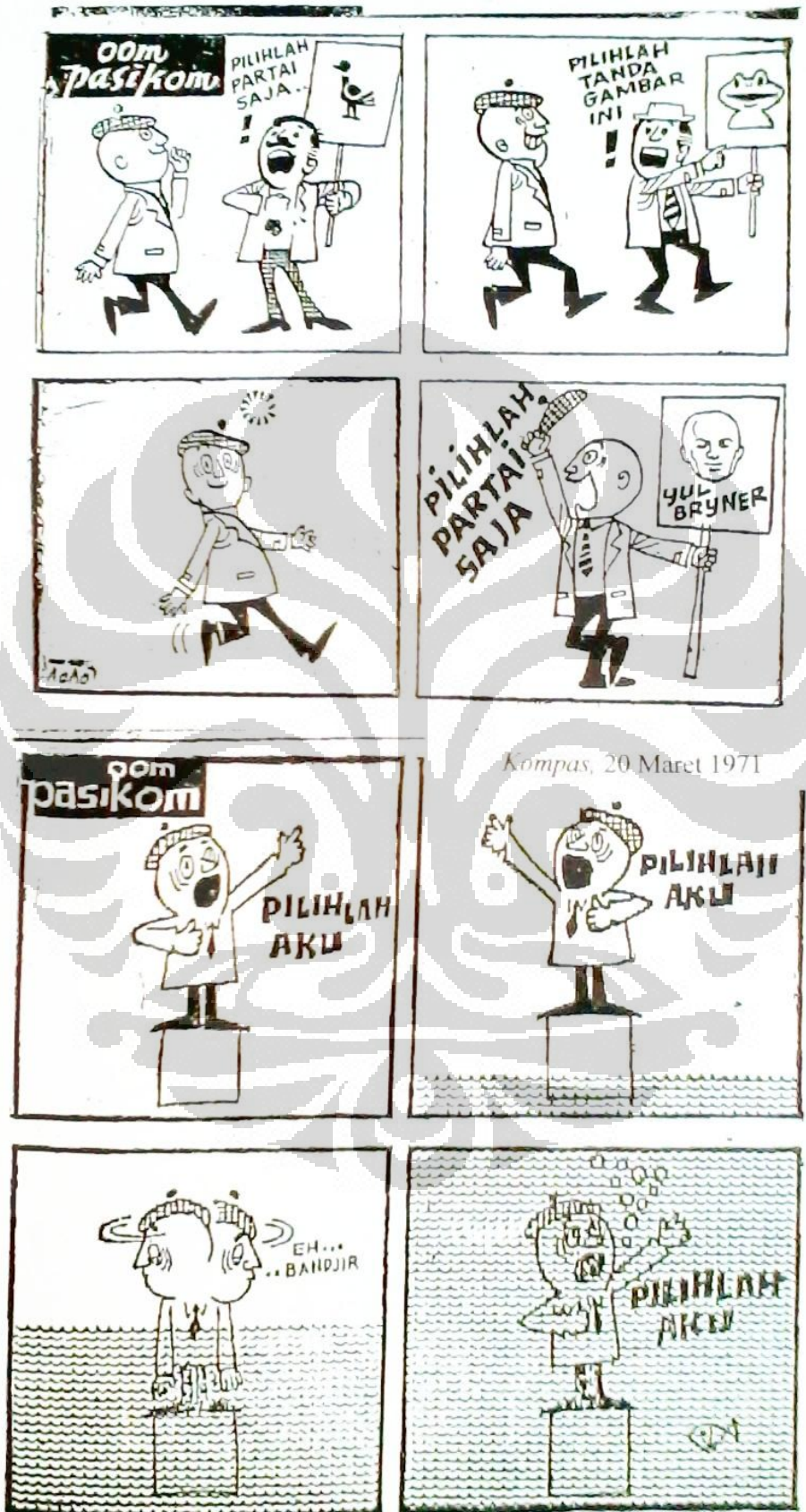


Kompas, 18 Oktober 1969

Lampiran 2



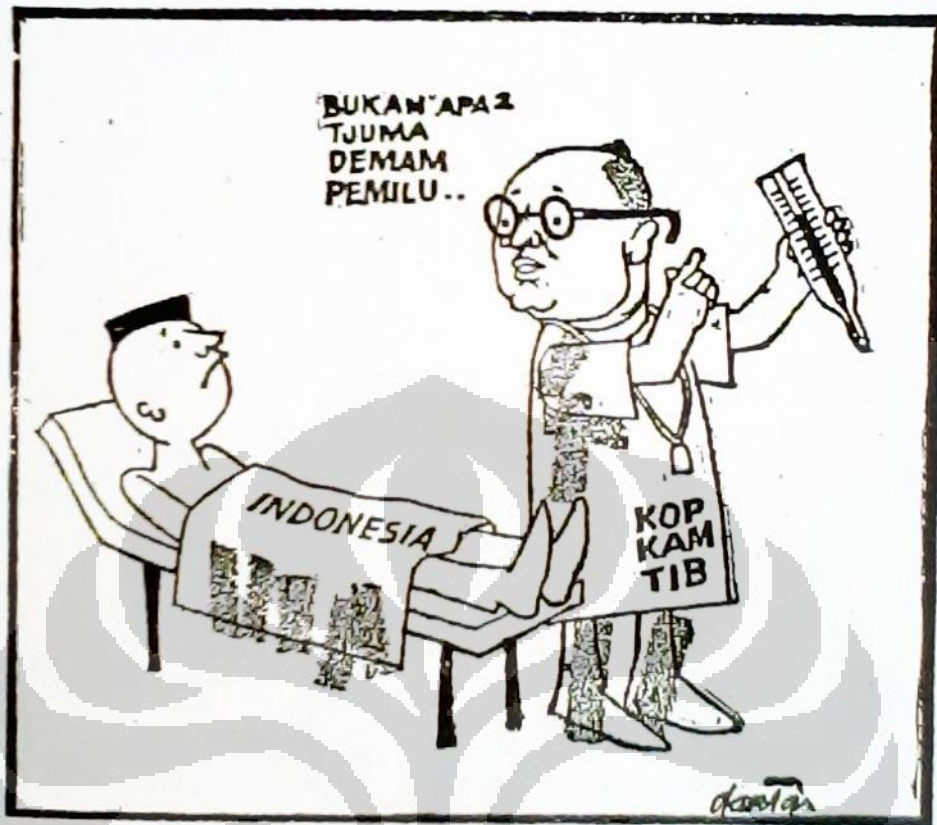
Kompas, 31 Desember 1970







Kompas, 22 Februari 1971



Kompas, 5 Maret 1971

Kompas, 8 Mei 1971



Kompas, 15 Mei 1971

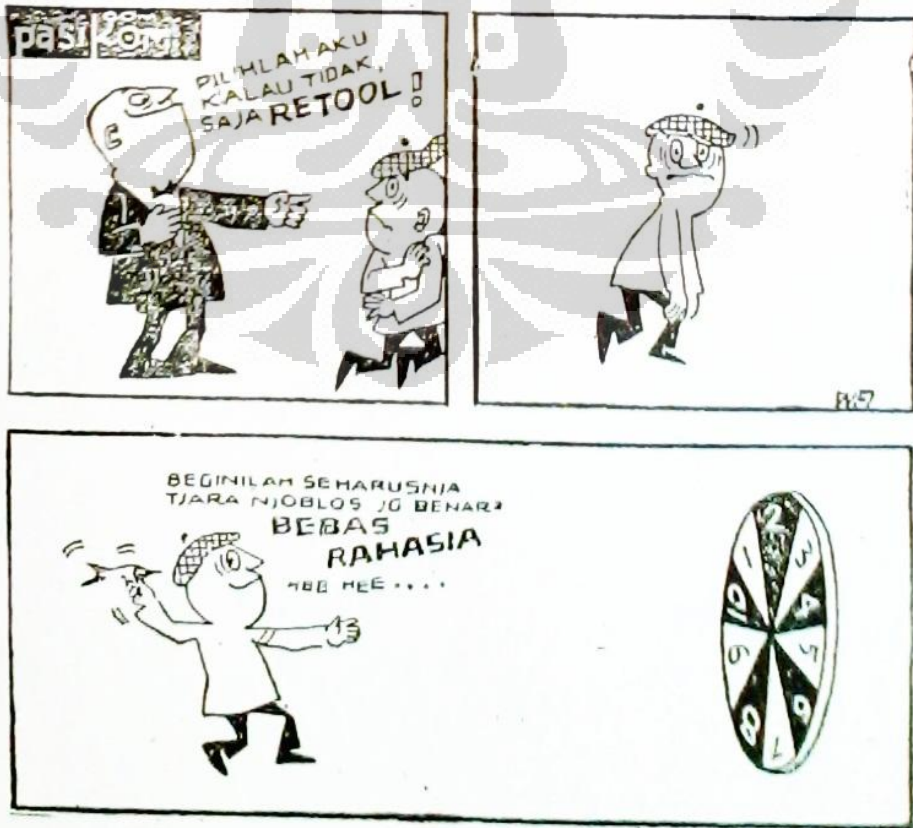




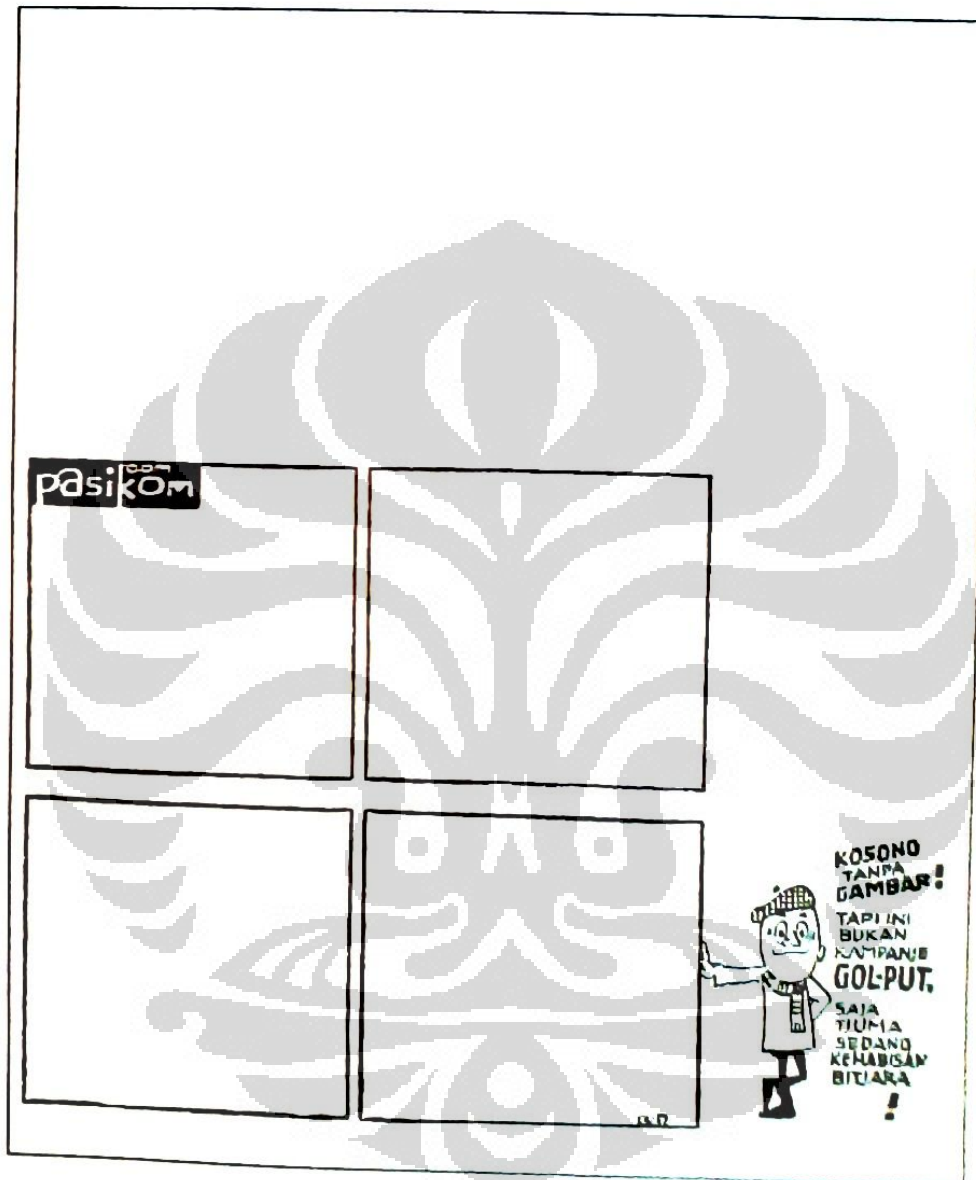
Kompas, 22 Mei 1971



Kompas, 5 Juni 1971



## Lampiran 4



*Kompas*, 17 Juni 1971

## Lampiran 5

Tabel Perolehan Suara Pemilu 1971

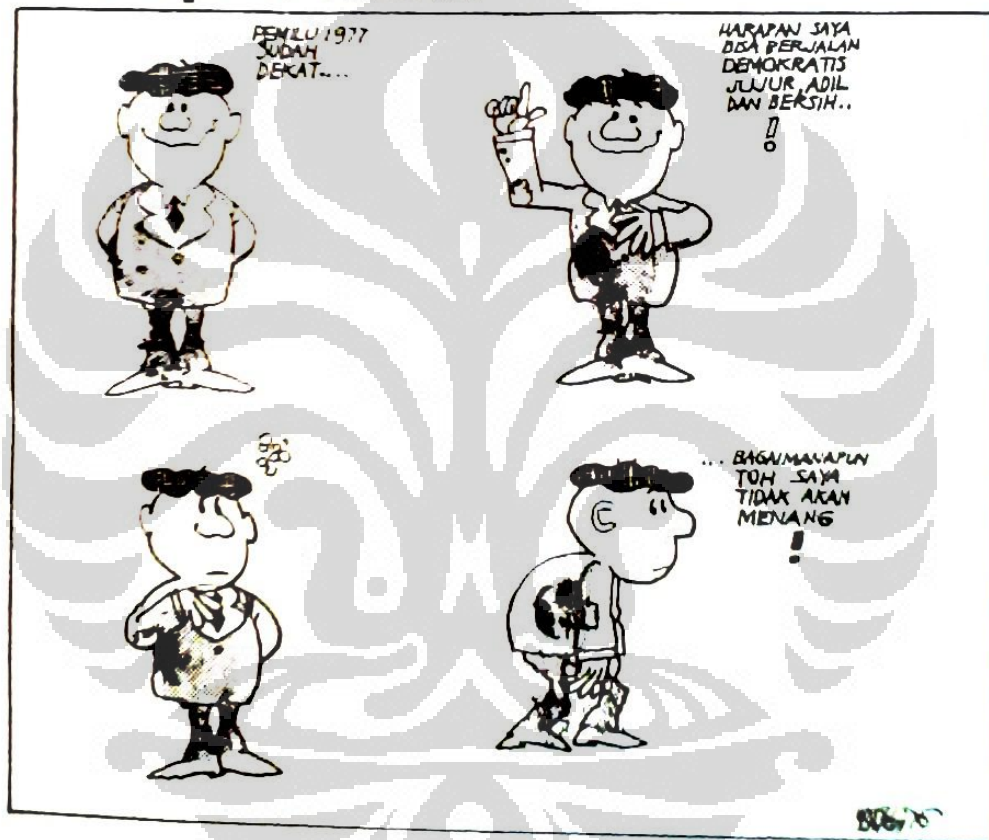
No.	Partai	Suara	%	Kursi
1.	Golkar	34.348.673	62,82	236
2.	NU	10.213.650	18,68	58
3.	Parmusi	2.930.746	5,36	24
4.	PNI	3.793.266	6,93	20
5.	PSII	1.308.237	2,39	10
6.	Parkindo	733.359	1,34	7
7.	Katolik	603.740	1,10	3
8.	Perti	381.309	0,69	2
9.	IPKI	338.403	0,61	-
10.	Murba	48.126	0,08	-
Jumlah		54.669.509	100,00	360

Sumber: <http://www.kpu.go.id/>

Lampiran 6

Kompas, 17 Maret 1976

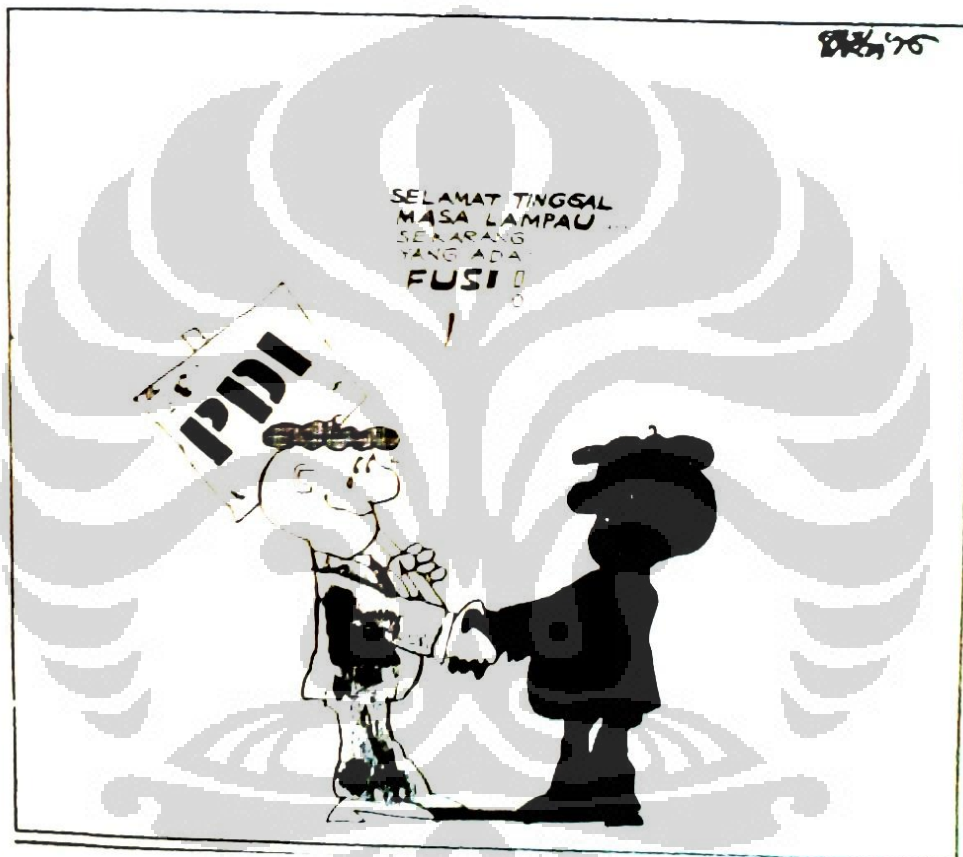
# oom pasikom



Lampiran 7

Kompas, 14 April 1976

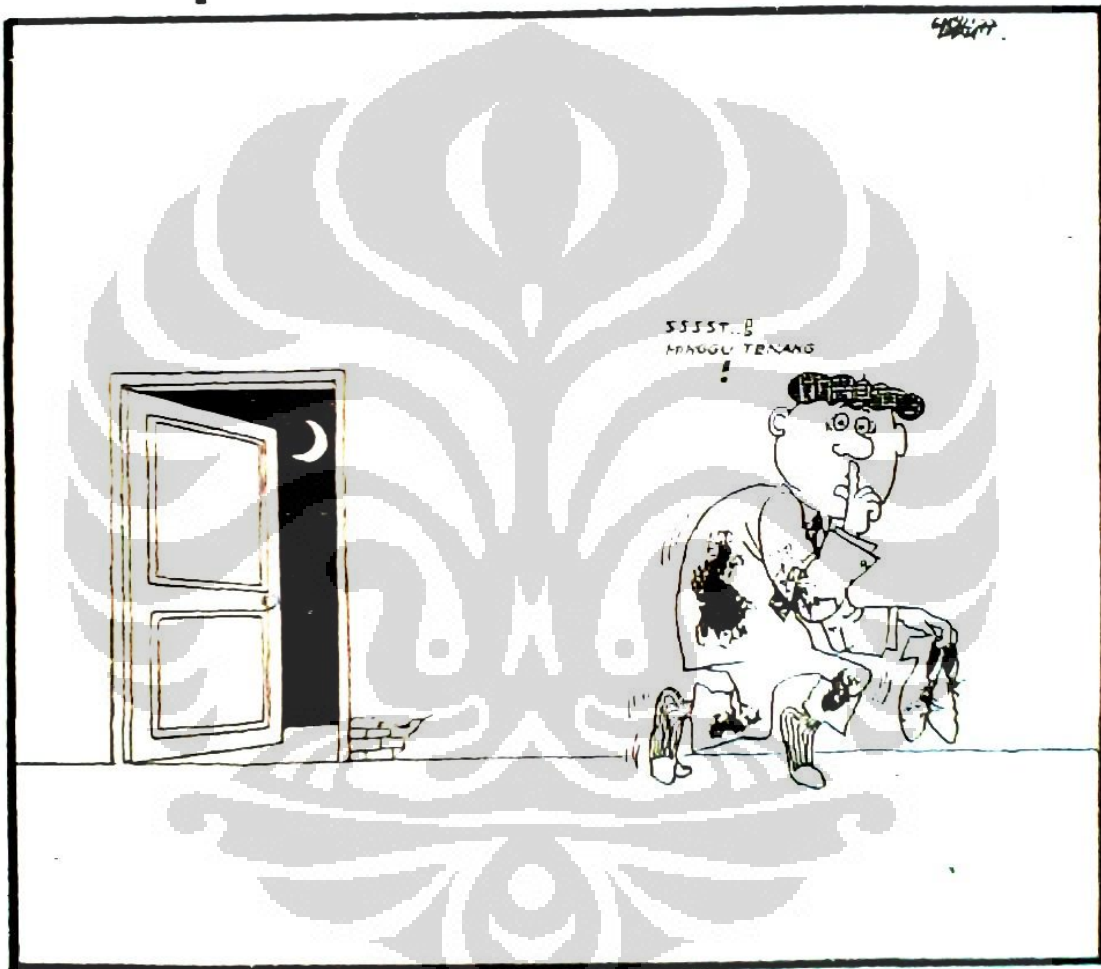
oom pasikom



# Lampiran 8

## oom pasikom

Kompas, 23 April 1977

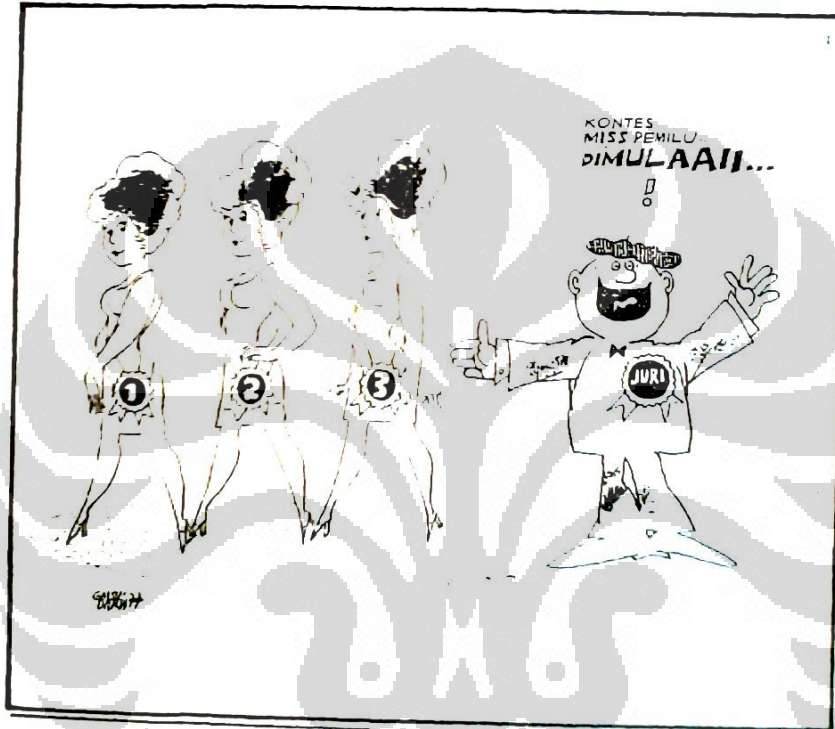




Lampiran 9

Kompas, 23 Februari 1977

oom pasikom

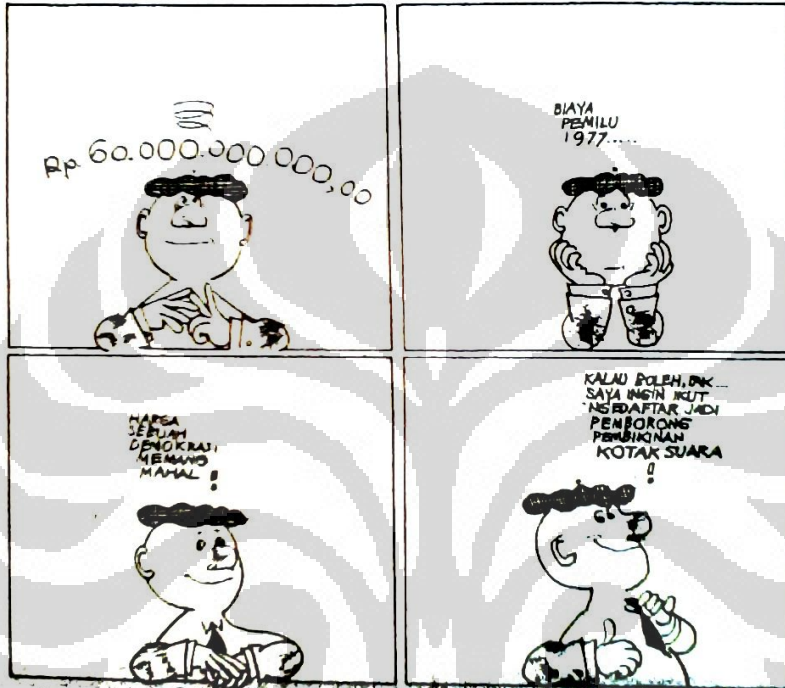


Lampiran 10

Kompas, 17 Februari 1976

oom pasikom

17/2/76

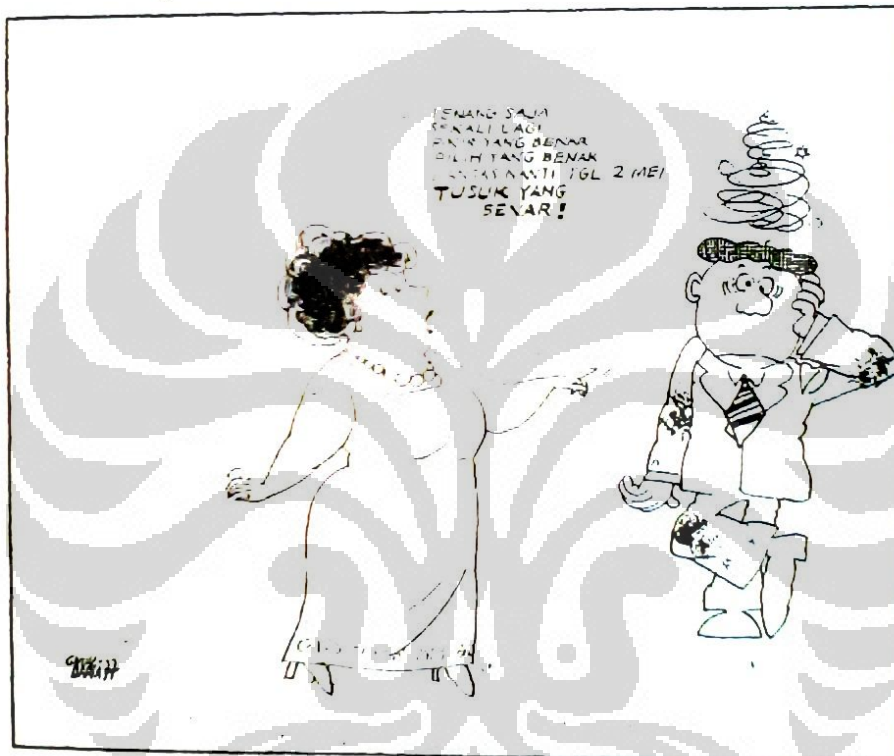




Lampiran 11

Kompas, 30 April 1977

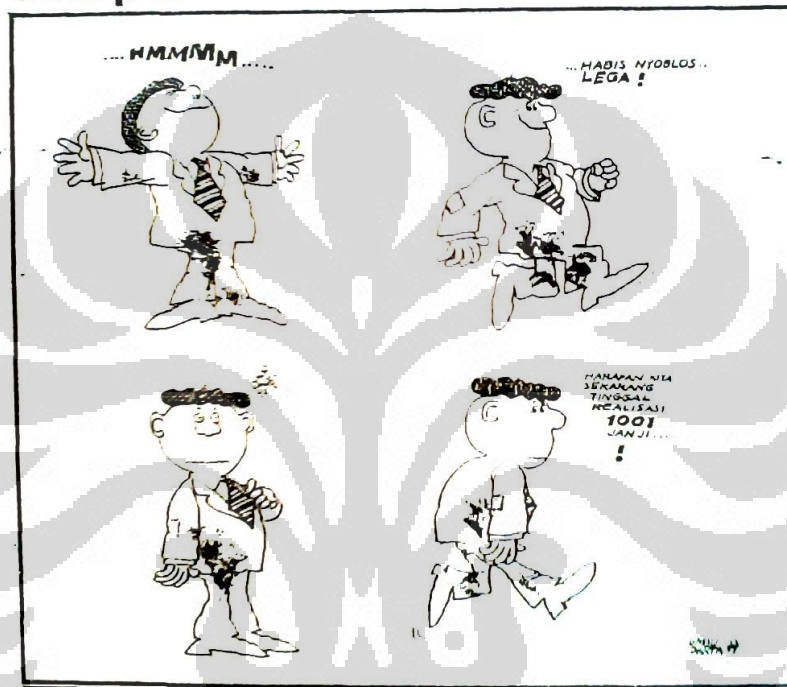
# oom pasikom



## Lampiran 12

Kompas, 4 Mei 1977

### oom pasikom



## Lampiran 13

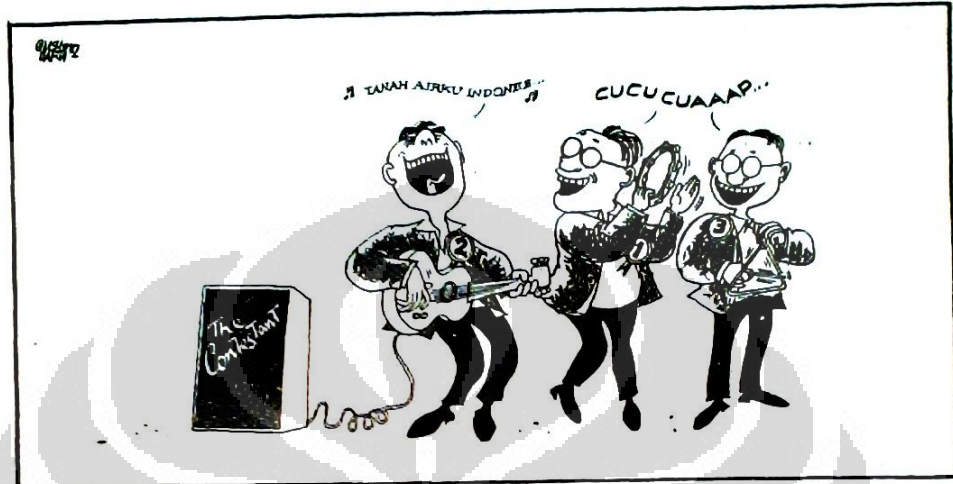
Tabel Perolehan Suara Pemilu 1977

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1977)	Keterangan
1.	Golkar	39.750.096	62,11	232	62,80	- 0,69
2.	PPP	18.743.491	29,29	99	27,12	+ 2,17
3.	PDI	5.504.757	8,60	29	10,08	- 1,48
	Jumlah	63.998.344	100,00	360	100,00	

Sumber: <http://www.kpu.go.id/>

Lampiran 14

Kompas, 16 Maret 1982

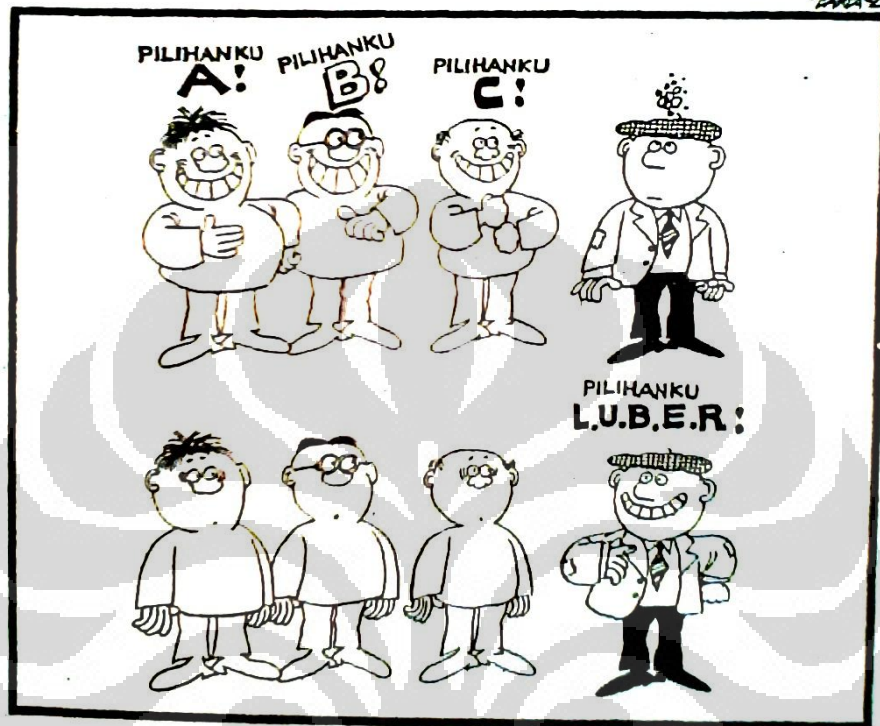


oom pasikom

Kompas, 21 April 1982

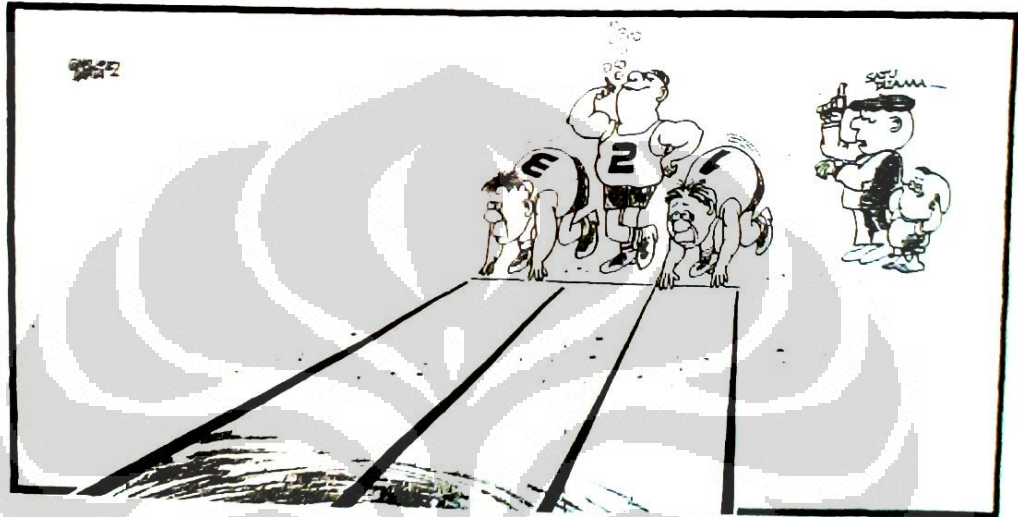


# oom pasikom



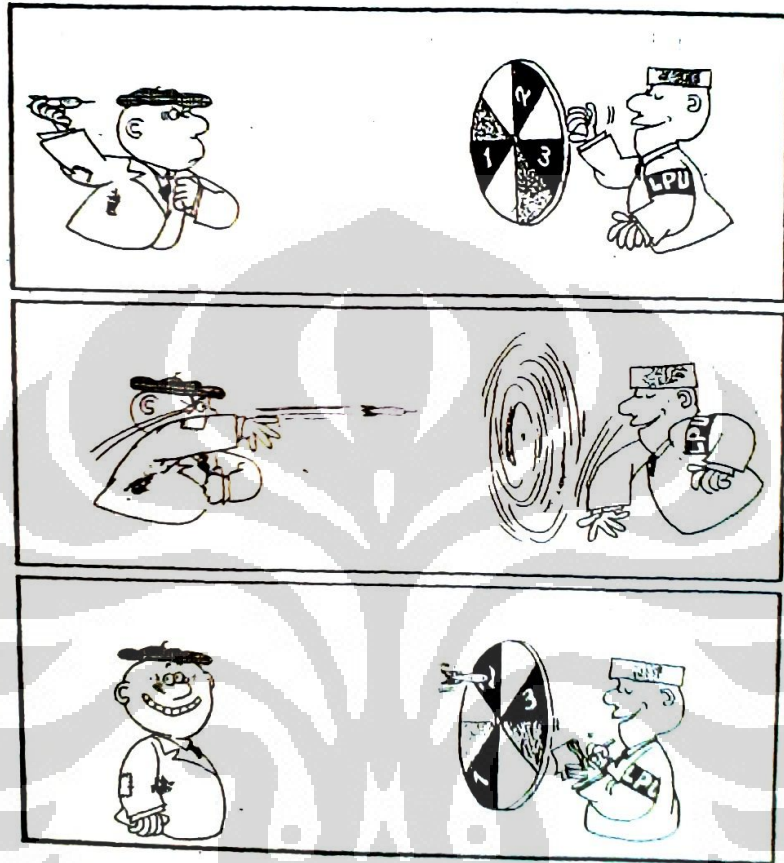
Kompas, 24 April 1982

Lampiran 15



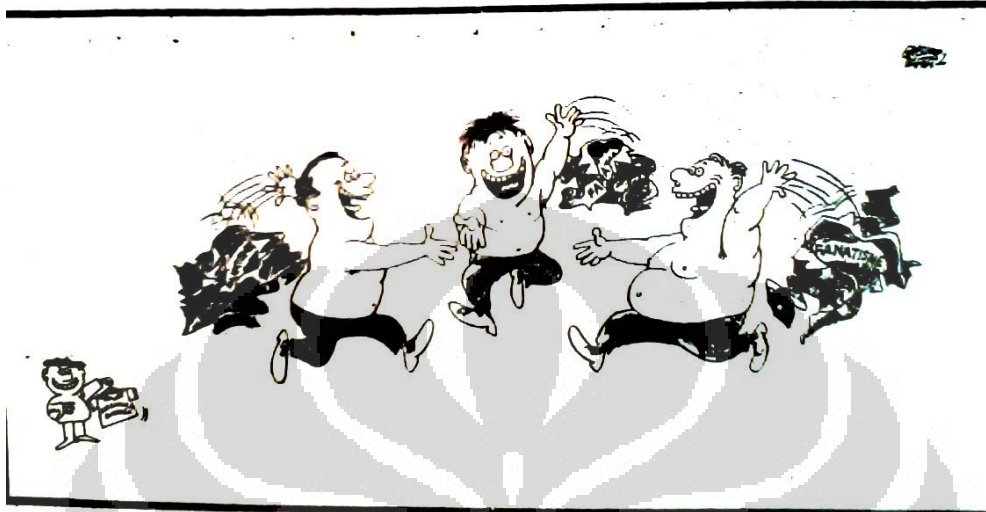
*Kompas*, 13 Maret 1982

Lampiran 16



Kompas, 7 Juni 1981

Lampiran 17



*Kompas*, 28 April 1982





Lampiran 19

**oom pasikom**

*Kompas*, 5 Mei 1982



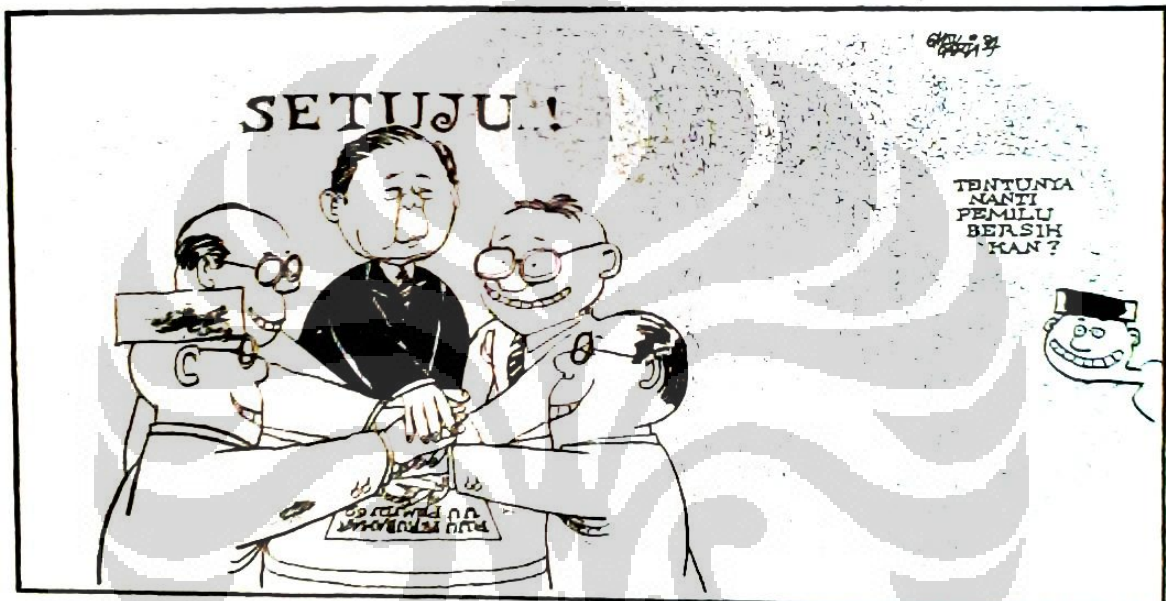
## Lampiran 20

Tabel Perolehan Suara Pemilu 1982

No.	Partai	Suara DPR	%	Kursi	% (1982)	Keterangan
1.	Golkar	48.334.724	64,34	242	62,11	+ 2,23
2.	PPP	20.871.880	27,78	94	29,29	- 1,51
3.	PDI	5.919.702	7,88	24	8,60	- 0,72
	Jumlah	75.126.306	100,00	364	100,00	

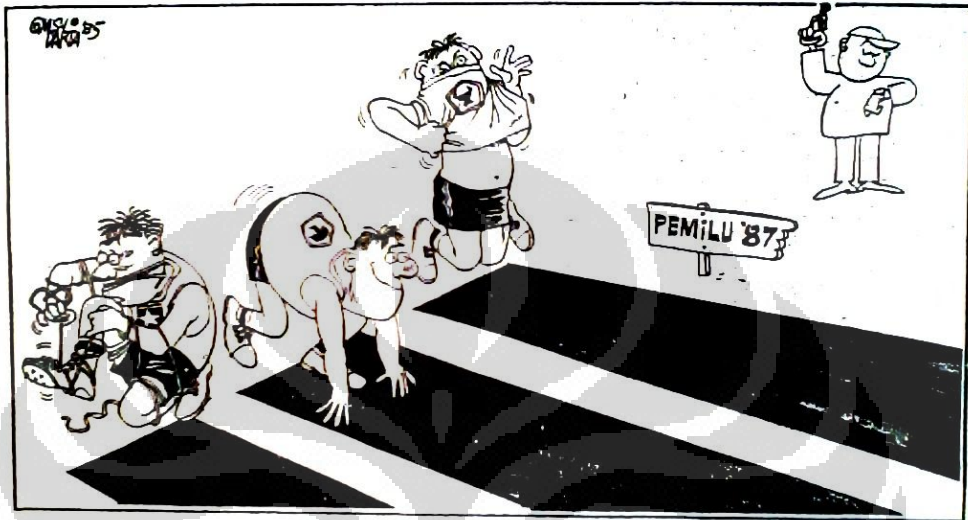
Sumber: <http://www.kpu.go.id/>

Lampiran 21



Kompas, 21 November 1984

Lampiran 22



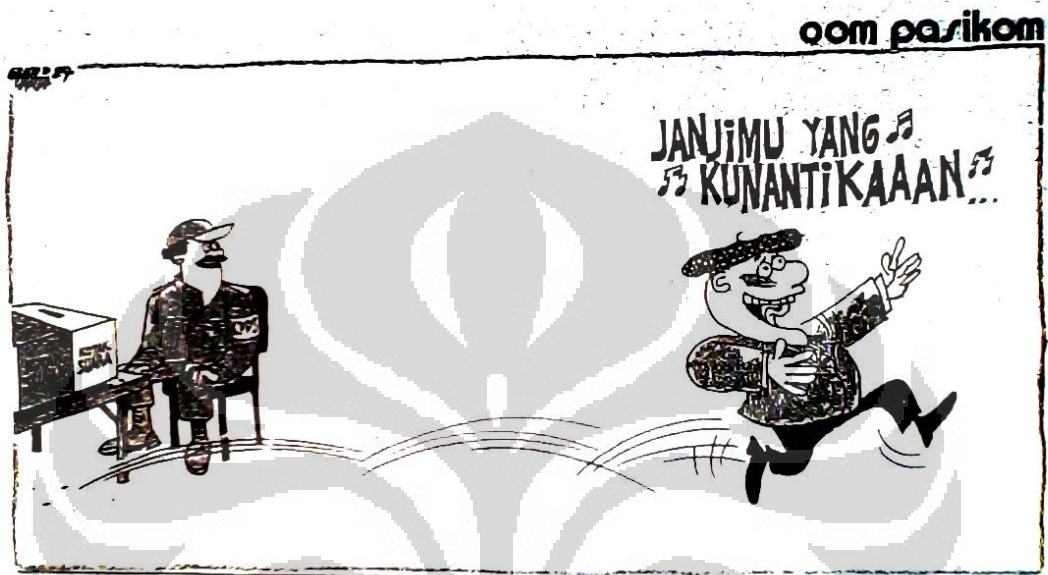
*Kompas*, 22 Oktober 1985

Lampiran 23



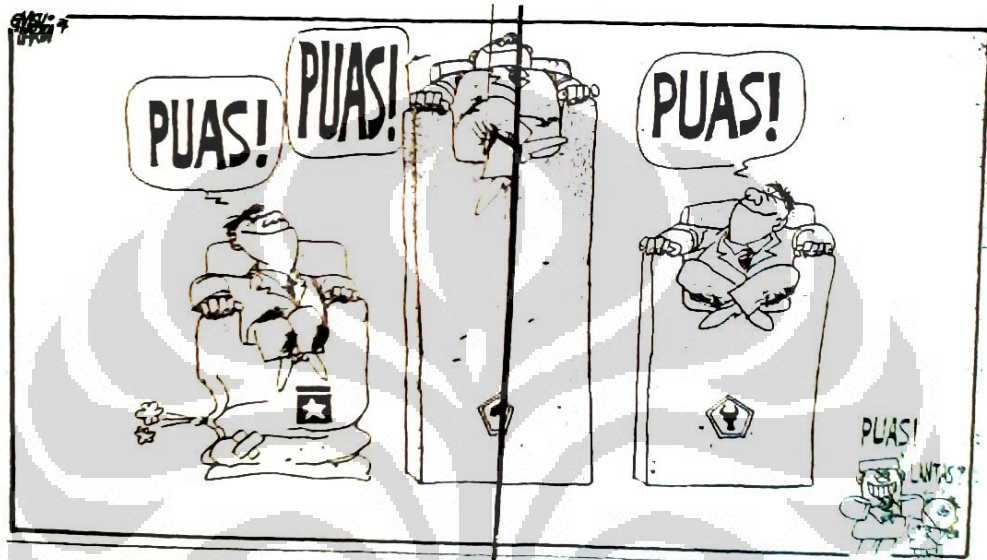
Kompas, 1 April 1987

Lampiran 24



*Kompas*, 24 April 1987

Lampiran 25



*Kompas*, 2 Mei 1987



## Lampiran 26

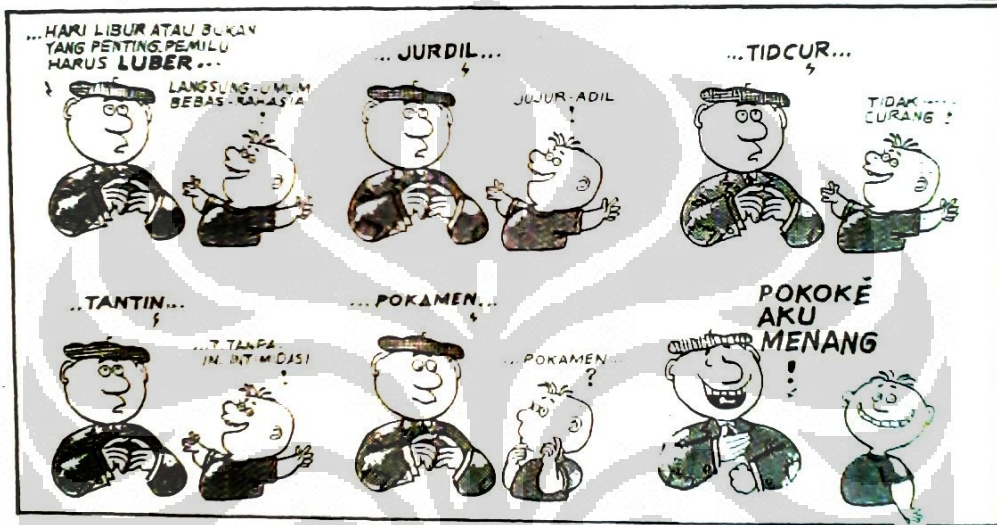
Tabel Perolehan Suara Pemilu 1987

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1987)	Keterangan
1.	Golkar	62.783.680	73,16	299	68,34	+ 8,82
2.	PPP	13.701.428	15,97	61	27,78	- 11,81
3.	PDI	9.384.708	10,87	40	7,88	+ 2,99
Jumlah		85.869.816	100,00	400		

Sumber: <http://www.kpu.go.id/>

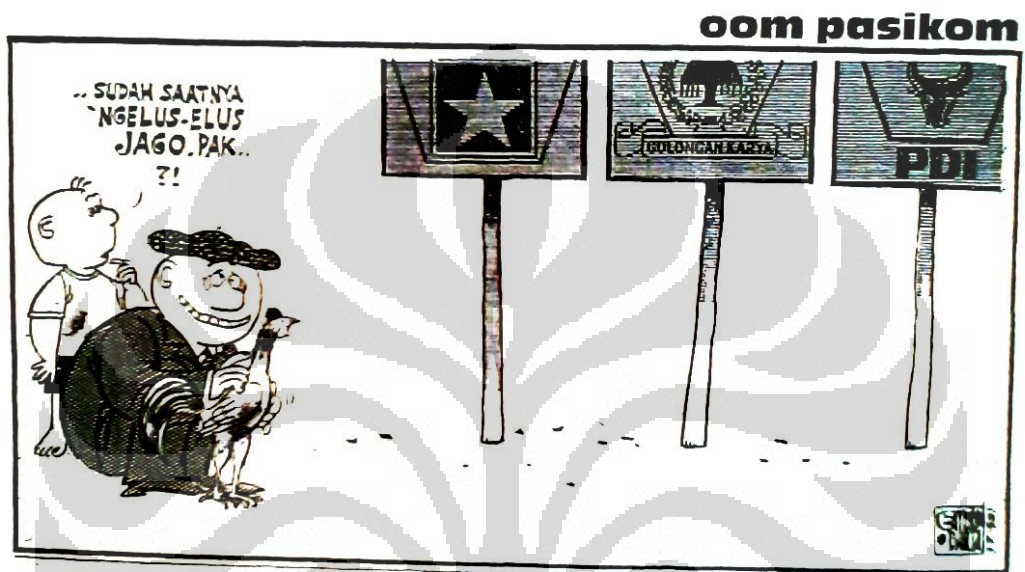
Lampiran 27

**oom pasikom**



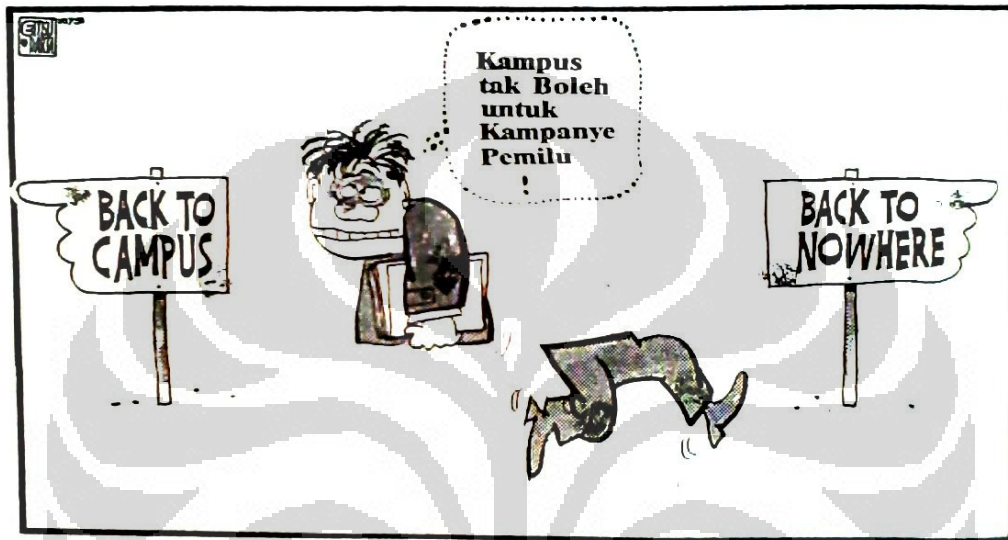
Kompas, 30 Juni 1990

Lampiran 28



*Kompas, 3 Juli 1991*

Lampiran 29



*Kompas*, 10 Juli 1991

Lampiran 30

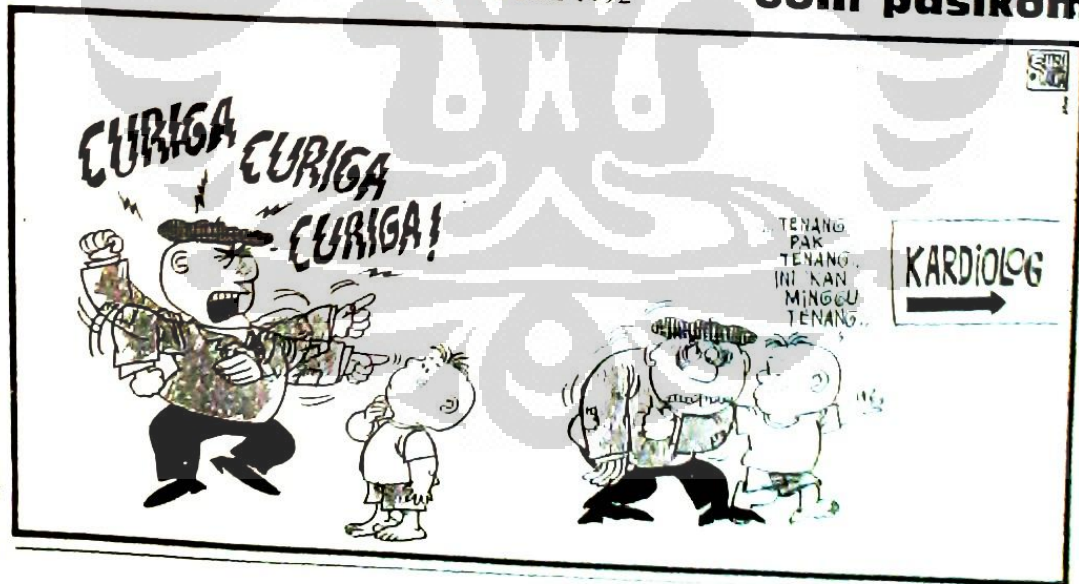
Kompas, 3 Juni 1992

**oom pasikom**



Kompas, 6 Juni 1992

**oom pasikom**



Lampiran 31

**oom pasikom**



*Kompas*, 10 Juni 1992



Lampiran 32

**oom pasikom**



*Kompas, 1 Juli 1992*

### Lampiran 33

Tabel Perolehan Suara Pemilu 1992

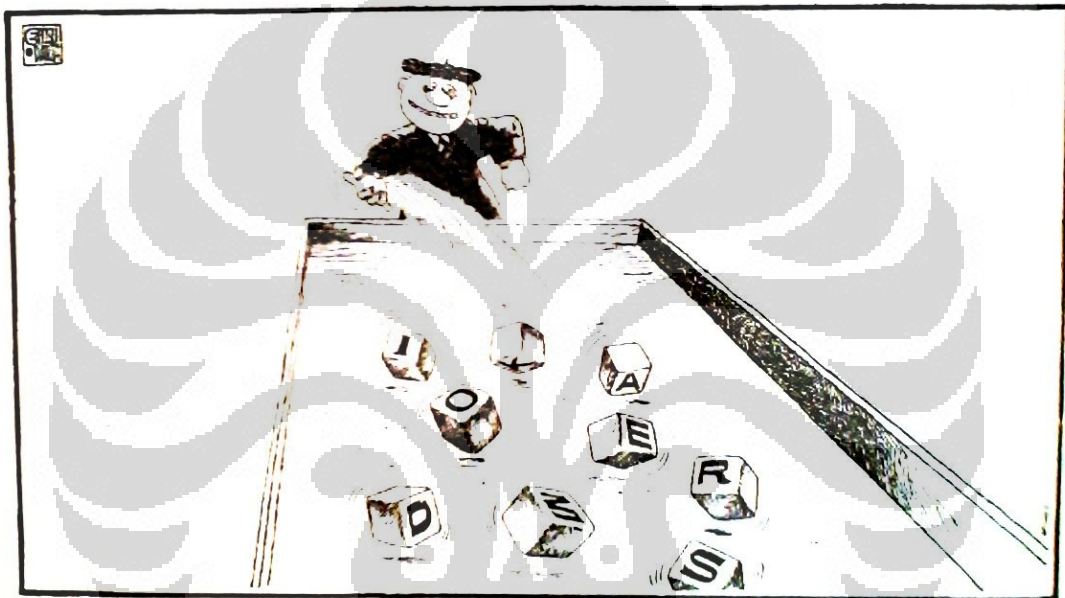
No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1992)	Keterangan
1.	Golkar	66.599.331	68,10	282	73,16	- 5,06
2.	PPP	16.624.647	17,01	62	15,97	+ 1,04
3.	PDI	14.565.556	14,89	56	10,87	+ 4.02
	Jumlah	97.789.534	100,00	400	100,00	

Sumber: <http://www.kpu.go.id/>



Lampiran 34

**oom pasikom**



*Kompas, 8 Juni 1996*

Lampiran 35



*Kompas*, 29 November 1995

Lampiran 36

**oom pasikom**

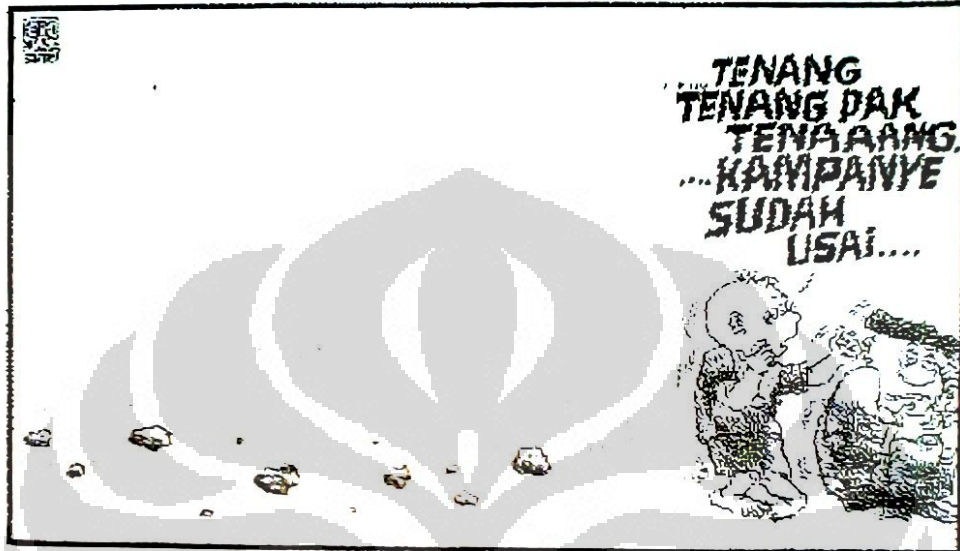


*Kompas, 15 Maret 1997*

Lampiran 37

Kompas, 24 mei 1997

**oom pasikom**



Kompas, 31 Mei 1997

**oom pasikom**



Lampiran 38



*Kompas*, 4 Juni 1997

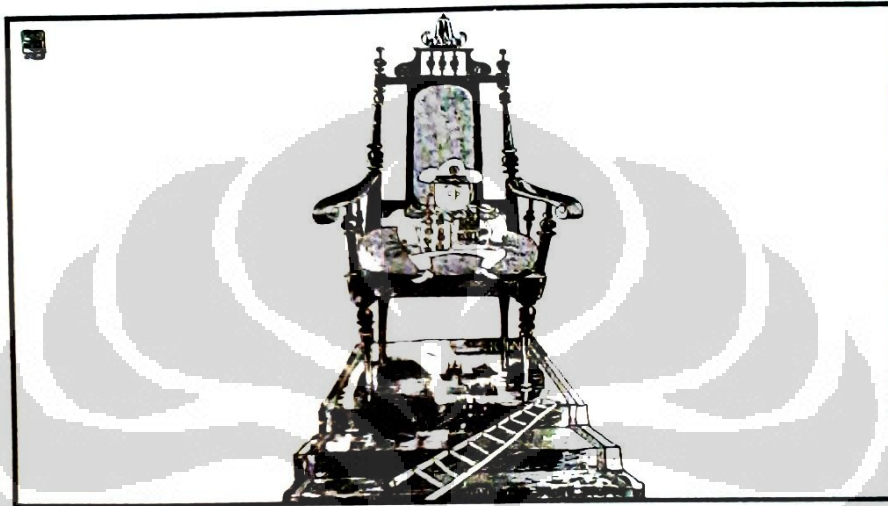
## Lampiran 39

Tabel Perolehan Suara Pemilu 1997

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1997)	Keterangan
1.	Golkar	84.187.907	74,51	325	68,10	+ 6,41
2.	PPP	25.340.028	22,43	89	17,00	+ 5,43
3.	PDI	3.463.225	3,06	11	14,90	- 11,84
	Jumlah	112.991.150	100,00	425	100,00	

Sumber: <http://www.kpu.go.id/>

## Lampiran 40

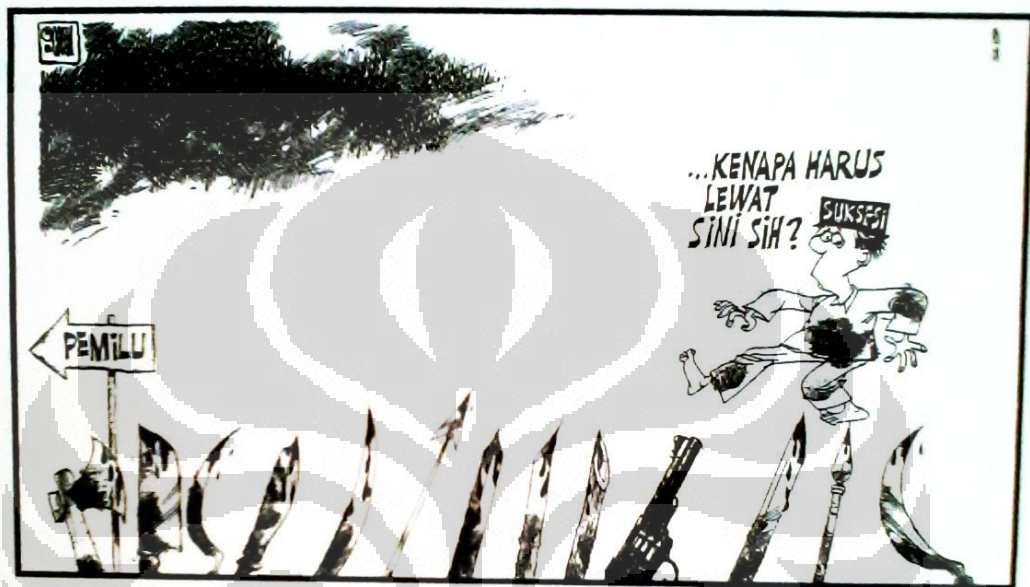


Menjelang pelaksanaan Pemilu 1999, timbul kekhawatiran terjadinya praktik-praktik politik kotor seperti politik uang. Kekhawatiran tersebut sangat beralasan karena suasana krisis ekonomi yang dihadapi bangsa ini dan penerapan sistem pemilu yang masih mengandalkan sistem proporsional. Pemegang tampuk kekuasaan pemerintahan dapat meraih kekuasaan hanya bermodal uang.

*Kompas*, 13 Desember 1998



## Lampiran 41



Perubahan rezim tidak sepenuhnya berlangsung mulus. Masa transisi harus dijalani dengan berbagai kasus pertikaian, kerusuhan, dan ancaman disintegrasi bangsa. Di satu sisi bisa jadi inilah harga yang harus dibayar untuk sebuah perjuangan. Namun menjadi persoalan besar jika jalan yang ditempuh menjadi semakin kabur.

*Kompas*, 3 Maret 1999



## Lampiran 42

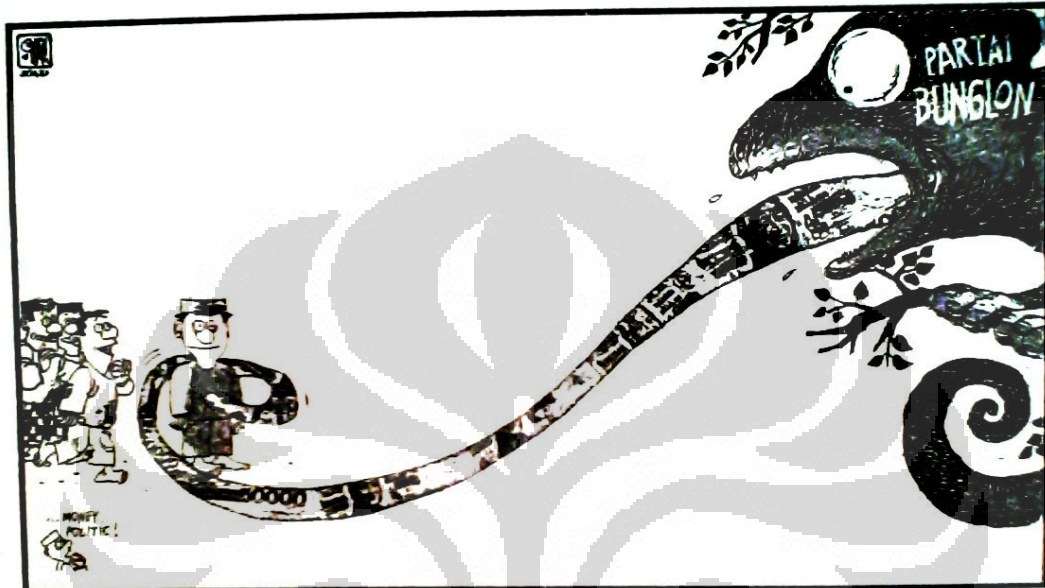


Tahap-tahap awal pelaksanaan Pemilu-1999 sudah di ambang pintu; pemilu pertama pasca-Orde Baru, yang diharapkan dapat berlangsung dengan demokratis. Dengan mengatasnamakan rakyat, para elite politik ingin meraih suara sebanyak-banyak, walaupun sering rakyat itu jadi tumbal.

*Kompas*, 7 April 1999



## Lampiran 44



Kecurangan menjelang pelaksanaan Pemilu 1999 mulai terjadi. Di berbagai daerah, sejumlah partai politik dan elite partai melakukan praktik politik uang. Selain politik uang, para pemantau pemilu juga melihat indikasi penggunaan fasilitas negara dan pemanfaatan jabatan pemerintahan oleh sebuah partai politik dalam merangkul masyarakat.

*Kompas*, 1 Mei 1999

## Lampiran 45



Pelaksanaan Pemilu 1999 tidak lepas dari kekurangan. Sebagai bukti, di berbagai tempat masih dijumpai kecurangan-kecurangan seperti intimidasi untuk memilih partai tertentu, pelubangan surat suara meskipun pemilu belum dimulai, dan politik uang beberapa saat sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Meskipun demikian Presiden B. J. Habibie menyatakan Pemilu 1999 sah. Demikian pula Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menganggap pemilu relatif Luber dan Jurdil

*Kompas, 9 Juni 1999*

## Lampiran 46



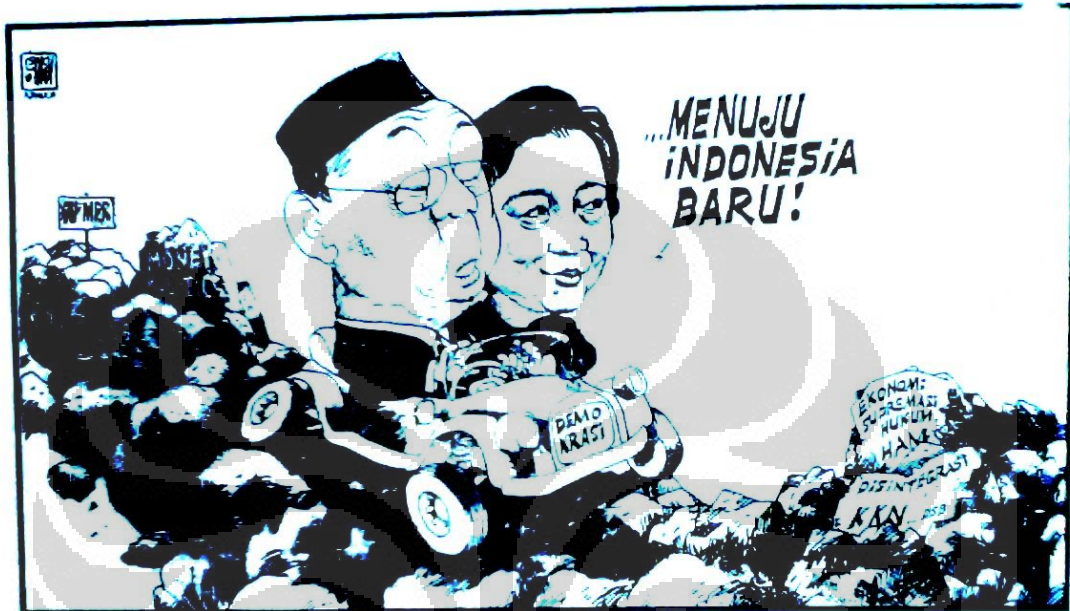
Manuver-manuver politik para elite politik yang berupaya menduduki kursi kepresidenan semakin marak. Tampaknya, usaha-usaha tersebut dilakukan tanpa mengindahkan hasil pemilu. Bagi mereka, meskipun partainya tidak berhasil memenangkan suara, tidak berarti jabatan presiden akan kandas. Upaya itu dilakukan antara lain melalui pembentukan koalisi menjelang Sidang Umum MPR.

*Kompas, 7 Juli 1999*



## Lampiran 47

Kompas, 23 Oktober 1999



Melalui pemilihan yang dianggap demokratis, K.H. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden RI. Ia didampingi oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Sepanjang lima tahun ke depan, keduanya akan menjalankan pemerintahan, menyelesaikan berbagai persoalan bangsa yang teramat pelik seperti pemulihan ekonomi, ancaman disintegrasi, pemberantasan KKN, dan penegakan supremasi hukum.

## Lampiran 48

Kompas, 27 Oktober 1999



Setelah terpilih menjadi Presiden RI, K.H. Abdurrahman Wahid mengumumkan susunan kabinetnya. Meskipun pembentukan susunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, susunan kabinet yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional ini merupakan kabinet hasil kompromi kekuatan partai politik yang ada seperti PDI-Perjuangan, Partai Golkar, PKB, dan kelompok Poros Tengah (PAN, PPP, PBB, dan Partai Keadilan).

## Lampiran 49

**Tabel Perolehan Suara Pemilu 1999**

No.	Nama Partai	Suara DPR	Kursi Tanpa SA	Kursi Dengan SA
1.	PDIP	35.689.073	153	154
2.	Golkar	23.741.749	120	120
3.	PPP	11.329.905	58	59
4.	PKB	13.336.982	51	51
5.	PAN	7.528.956	34	35
6.	PBB	2.049.708	13	13
7.	Partai Keadilan	1.436.565	7	6
8.	PKP	1.065.686	4	6
9.	PNU	679.179	5	3
10.	PDKB	550.846	5	3
12.	PDI	345.720	2	2
13.	PP	655.052	1	1
14.	PDR	427.854	1	1
15.	PSII	375.920	1	1
16.	PNI Front Marhaenis	365.176	1	1
17.	PNI Massa Marhaen	345.629	1	1
18.	IPKI	328.654	1	1
19.	PKU	300.064	1	1
20.	Masyumi	456.718	1	-
21.	PKD	216.675	1	-
22.	PNI Supeni	377.137	-	-
23.	Krisna	369.719	-	-
24.	Partai KAMI	289.489	-	-
25.	PUI	269.309	-	-
26.	PAY	213.979	-	-
27.	Partai Republik	328.564	-	-
28.	Partai MKGR	204.204	-	-
29.	PIB	192.712	-	-
30.	Partai SUNI	180.167	-	-
31.	PCD	168.087	-	-



32.	PSII 1905	152.820	-	-
33.	Masyumi Baru	152.589	-	-
34.	PNBI	149.136	-	-
35.	PUDI	140.980	-	-
36.	PBN	140.980	-	-
37.	PKM	104.385	-	-
38.	PND	96.984	-	-
39.	PADI	85.838	-	-
40.	PRD	78.730	-	-
41.	PPI	63.934	-	-
42.	PID	62.901	-	-
43.	Murba	62.006	-	-
44.	SPSI	61.105	-	-
45.	PUMI	49.839	-	-
46.	PSP	49.807	-	-
47.	PARI	54.790	-	-
48.	PILAR	40.517	-	-
	Jumlah	105.786.661	462	462

**Catatan:**

- Jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi mencapai 9.700.658. atau 9,17 persen dari suara yang sah.
- Apabila pembagian kursi dilakukan dengan sistem kombinasi jumlah partai yang mendapatkan kursi mencapai 37 partai dengan jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi hanya 706.447 atau 0,67 persen dari suara sah.
- SA: Stembus Accord

Sumber: <http://www.kpu.go.id/>

Lampiran 50



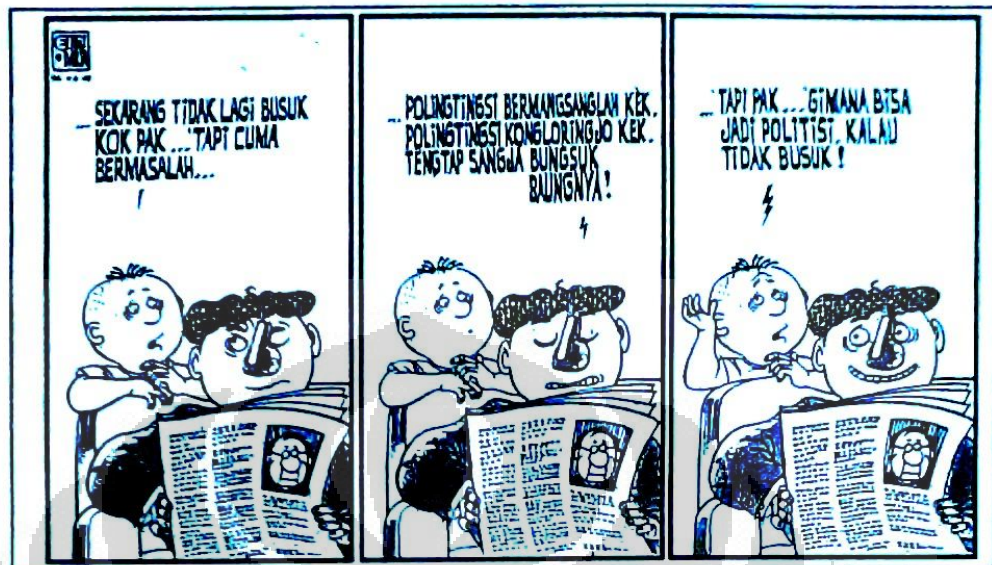
Lampiran 51

Kompas, 3 Januari 2004





Kompas, 4 Februari 2004

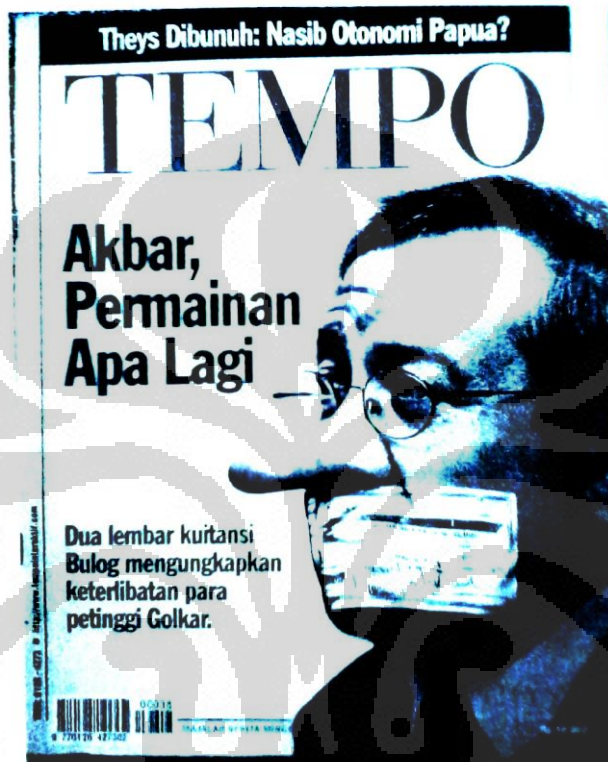


Kompas, 5 Februari 2004



## Lampiran 52

*Tempo*, 19-25 November 2001



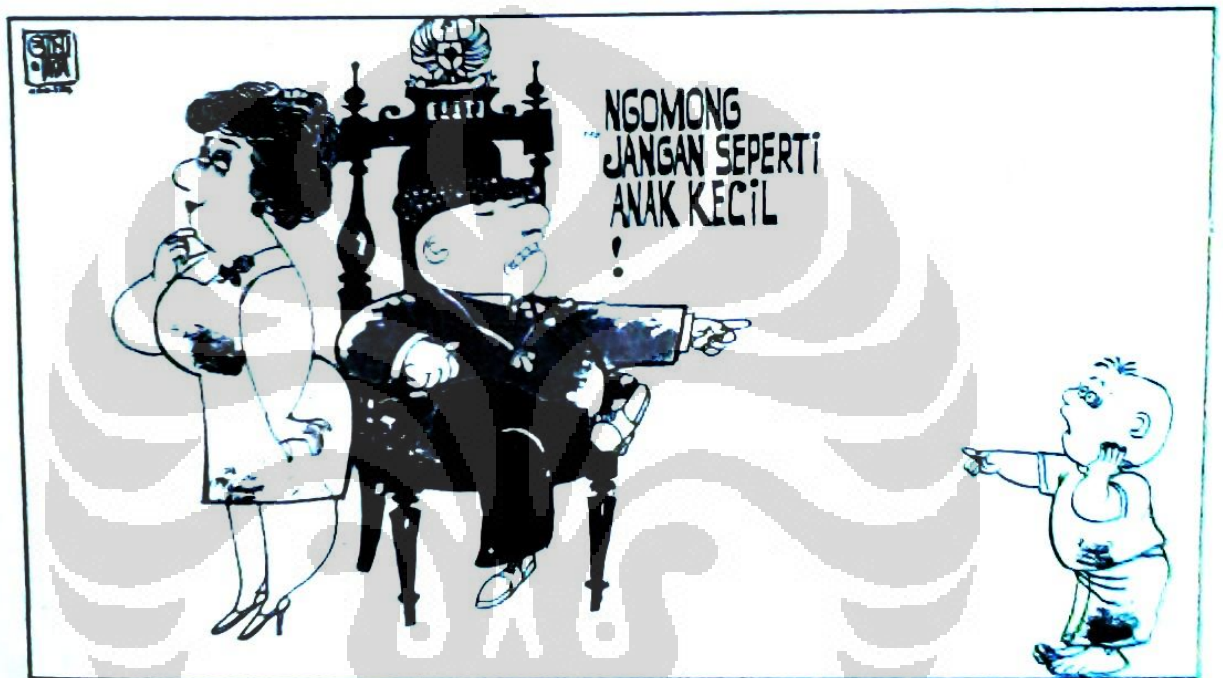
Lampiran 53

Kompas, 17 Maret 2004



## Lampiran 54

*Kompas*, 6 Maret 2004





Lampiran 55

Kompas, 21 Februari 2004



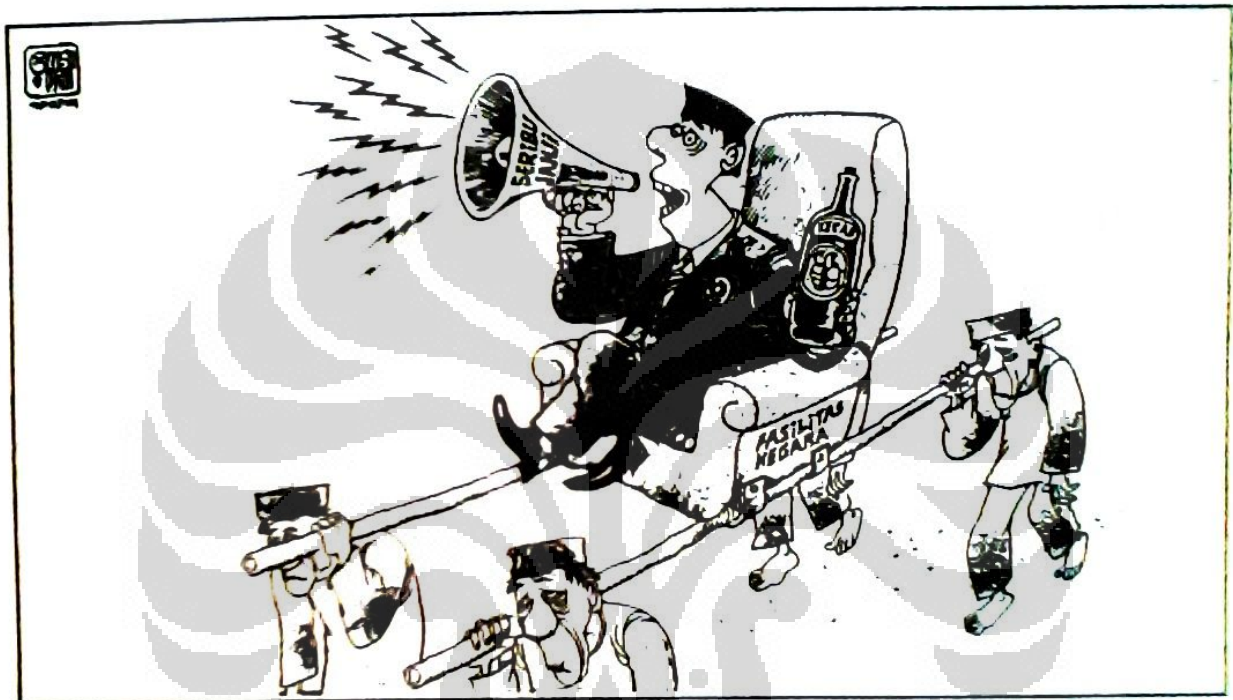
Kompas, 29 Maret 2004





Lampiran 56

Kompas, 10 Maret 2004



## Lampiran 57

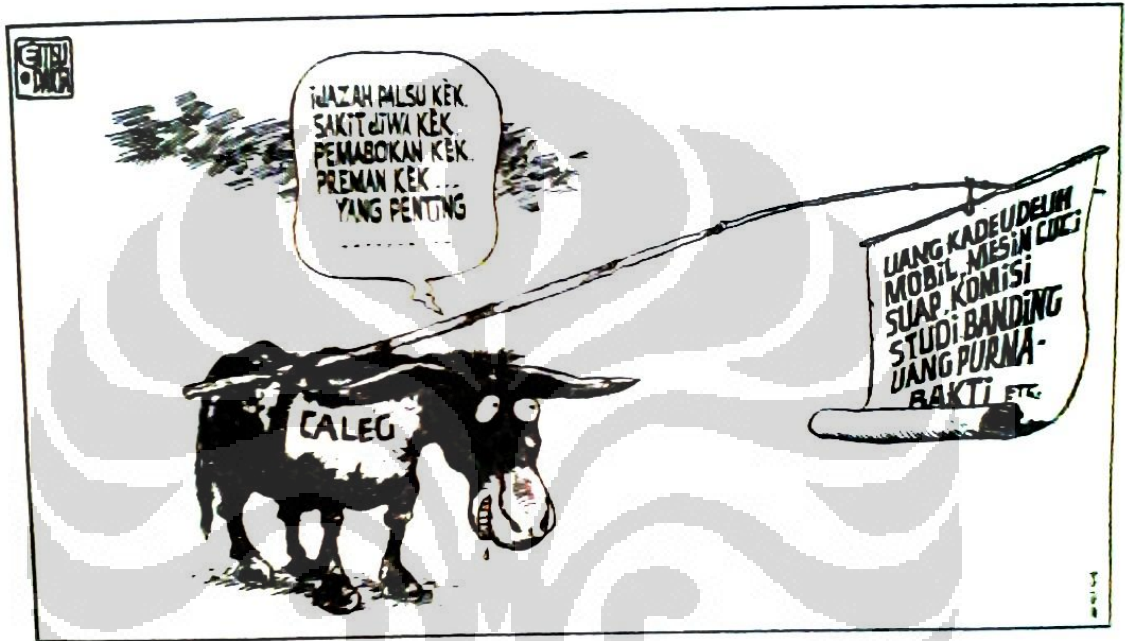
**Daftar Perkara Tindak Pidana Pilpres atas penggunaan fasilitas negara yang sudah divonis oleh Pengadilan Negeri/Tinggi di Wilayah Kalimantan Selatan.**

No	Nama	Pasal Dakwaan	Peserta Pemilu	Uraian Singkat	Penyelesaian Putusan	Ket
1	Yusrie asaid	Pasal 38 huruf (g) UU No.23/2003	DPRD Prop. Kalsel	Terpidana Telah menggunakan Fasilitas negara/ Pemerintah dalam Kampanye	Vonis: Sidang tanggal 30/08/2004 PN Banjarmasin Momvonis denda 800.000 subsider 1 tahun penjara	
2	Mawardi Abbas	Pasal 38 huruf (g) UU No.23/2003	Wakil Bupati Kab. Banjar	Terpidana Telah menggunakan Fasilitas negara/ Pemerintah dalam Kampanye	Vonis: Sidang tanggal 23/08/2004 PN Banjarmasin Momvonis denda 1 Juta subsider 1 Bulan penjara	
3	H.M Hassan	Pasal 38 huruf (g) UU No.23/2003	DPRD Prop. Kalsel	Terpidana Telah menggunakan Fasilitas negara/ Pemerintah dalam Kampanye	Vonis: Sidang tanggal 26/08/2004 PN Banjarmasin Momvonis denda 1 Juta subsider 1 Bulan penjara	
4	Drs. Sugian nor	Pasal 38 huruf (g) UU No.23/2003	DPRD Kab. Tabalong	Terpidana Telah menggunakan Fasilitas negara/ Pemerintah dalam Kampanye	Vonis: Sidang tanggal 4/08/2004 PN Banjarmasin Momvonis denda 1 Juta subsider 1 Bulan penjara	

**Sumber:** Laporan Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 2004. Buku 5 Data dan Angka. Jakarta: Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2004

Lampiran 58

Kompas, 21 Januari 2004



**Uraian Kasus Laporan Pelanggaran Pemilu (Memalsukan ijazah) Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diterima Panwas Pemilu (Pusat).**

No	Tanggal	Pelapor	Terlapor	Ringkasan kejadian	Tindak Lanjut	Ket
1	6 Jan 04	Muji Haryaka	Hj. Sumiati Soekarno (Caleg DPRD DKI dari PDIP Jakarta Utara)	Terlapor diduga memalsukan ijazah untuk keperluan pencalonannya	Tidak ditindak lanjuti	Data kurang lengkap
2	16 Jan 04	Rauf	HA. Munif Basyuni (Caleg DPR-RI dari PKB)	Indikasi pemalsuan ijazah dari terlapor	Diteruskan ke KPU Pusat	
3.	3 Feb 04	Gerakan Anti Politisi Busuk Kab. Cilacap	Fran Lukman (Caleg DPR-RI Dapil Jateng)	Penggunaan ijazah palsu sebagai ijazah pencalonan menjadi caleg	Diteruskan ke Panwas Provinsi Jateng	

**Sumber:** Laporan Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 2004. Buku 5 Data dan Angka. Jakarta: Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2004. Hlm. 44

## Lampiran 60

Perhitungan suara dan kursi DPR hasil Pemilu 2004

Nama Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi	%
PNI Marchenisme	923.159	1	0,81
Partai Buruh Sosial Demokrat	636.397	0	0,56
Partai Bulan Bintang	2.970.487	11	2,62
Partai Merdeka	842.541	0	0,74
Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	58	8,15
Partai Persatuan Demokrat Kebangsaan	1.313.654	5	1,16
Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.952	0	0,59
Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.230.455	1	1,08
Partai Demokrat	8.455.225	57	7,45
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.240	1	1,26
Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.811	1	0,75
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	895.610	0	0,79
Partai Amanat Nasional	7.303.324	52	6,44
Partai Amanat Karya Peduli Bangsa	2.399.290	2	2,11
Partai Kebangkitan Bangsa	11.989.564	52	10,57
Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	45	7,34
Partai Bintang Reformasi	2.764.998	13	2,44
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	109	18,53
Partai Damai Sejahtera	2.414.254	12	2,13
Partai Golkar	24.480.757	128	21,58
Partai Patriot Pancasila	1.073.139	0	0,95
Partai Sarikat Indonesia	679.296	0	0,60
Partai Persatuan daerah	657.916	0	0,58
Partai Pelopor	878.932	2	0,77

Sumber: <http://www.setneg.go.id/>





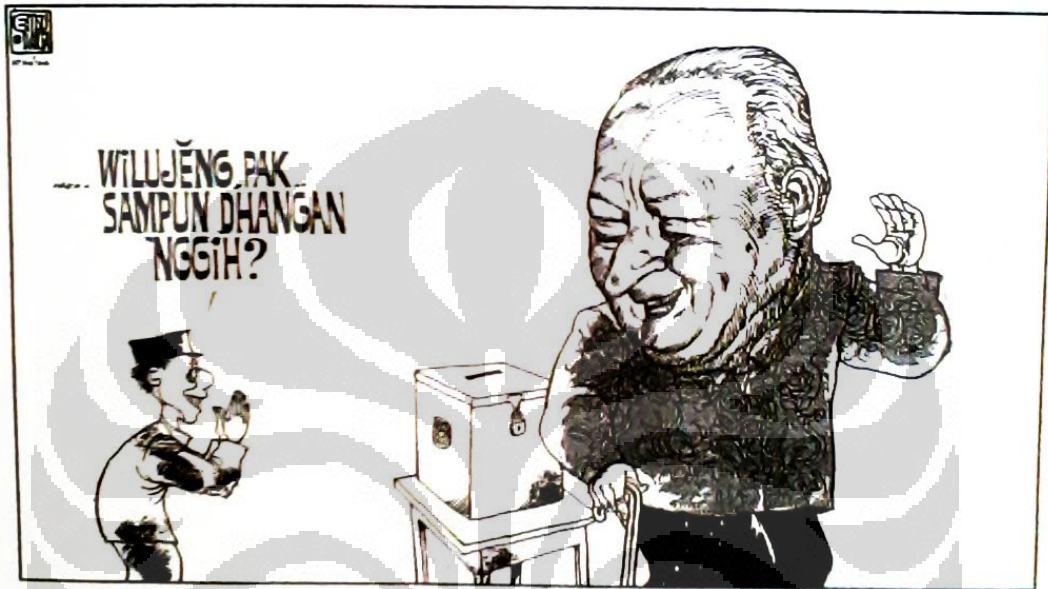
Lampiran 62

Kompas, 23 Juni 2004



Lampiran 63

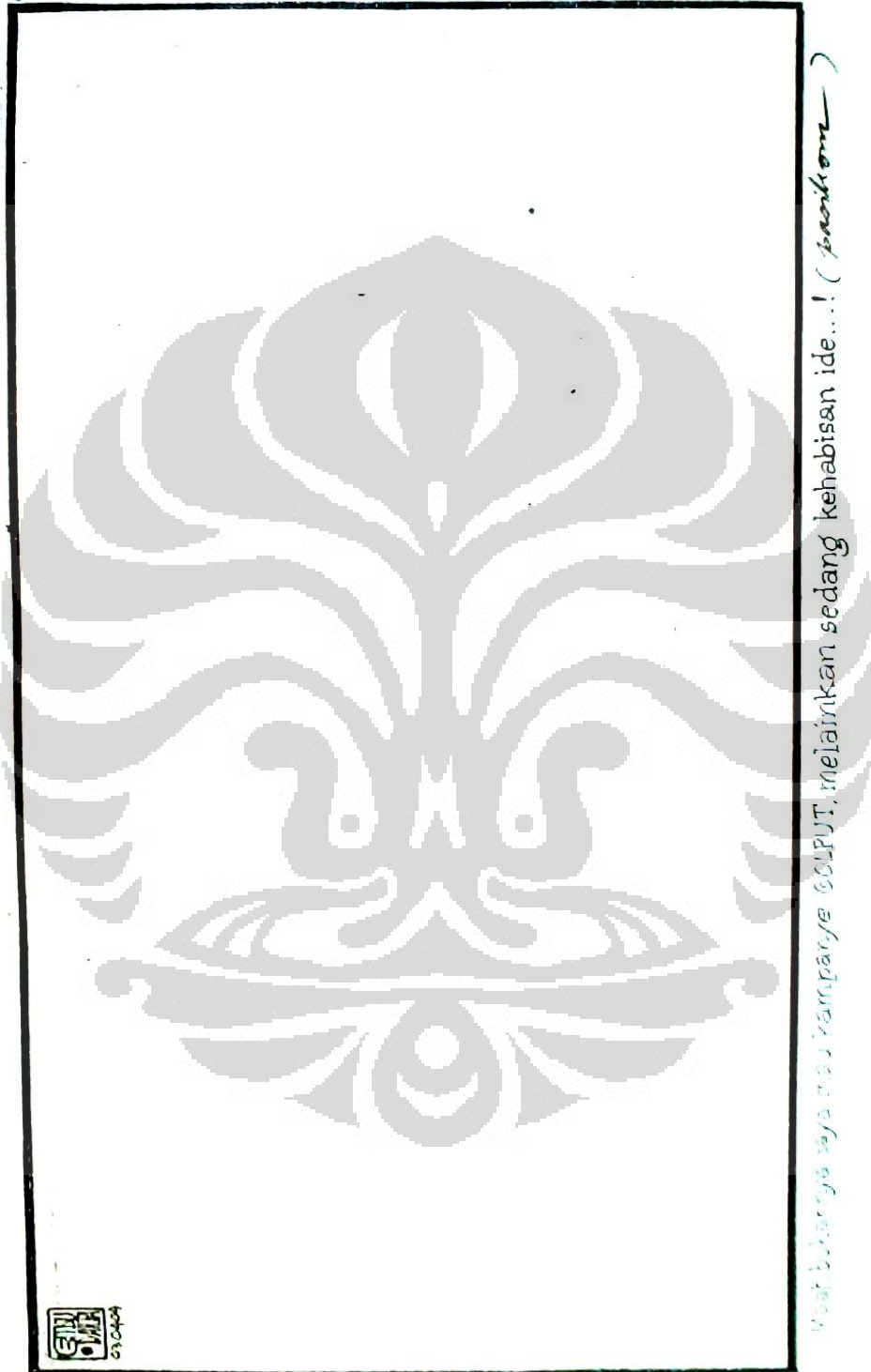
Kompas, 7 April 2004





Lampiran 64

Kompas, 3 April 2004



Lampiran 65

Kompas, 14 Juli 2004



## Berawal dari Kantor Tumpangan dan Mesin Tik Pinjaman

MINGGU, 27 Juni 1965, sekitar tengah malam Jalan Kramat Raya Jakarta sudah sepi. Pertunjukan terakhir di Bioskop Rivoli juga telah berakhir, dan penonton beberapa jam lalu berhamburan pulang. Tinggal beberapa becak yang masih mangkal di malam yang dingin itu.

Namun tak jauh dari situ, di sebuah percetakan, kegiatan justru baru dimulai. Beberapa orang berkumpul dalam percetakan PN Eka Grafika (dahulu "Abadi"), mengelilingi mesin cetak *Duplex*.

Semua mata memandang ke arah satu titik, tempat para pencetak memasang kertas rol. Sebentar-sebentar di antara mereka ada yang melihat arlojinya, seolah tidak sabar dan was-was. Suasananya mirip sebuah penantian lahirnya bayi pertama.

Dan ketika mesin cetak mulai dijalankan, lantas kertas menyentuh *spanraam-spanraam* bensis, huruf-huruf timah isi surat kabar, P.K. Ojong tersenyum dan bergumam, "Sebentar lagi. Sebentar lagi ke luar."

Selain P.K. Ojong (almarihem), ketika itu juga ada Jakob Oetama serta beberapa wartawan di antaranya Theodorus Purba (alm), Tinon Prabawa (alm), Tan Soei Sing (Indra Gunawan), Eduard Liem (Eduard Linggar), Roestam Afandi, Djoni Lambangdjaja, August Parengkuan dan Harthanto Wartawatnya, Erka Muchsin dan Thress Susilastuti, menanti penuh harap di rumah.

Di sudut lain, duduk di kursi menghadapi meja korektor adalah Kang Hok Djin, Kang Tiaw Liang, Dimiyati, Marjono, dan Petrus Hutabarat.

Ketika koran pertama *Kompas* muncul dari mesin cetak, tepuk tangan pun menyambutnya. Diringi kilatan lampu kilat dan kamera Sudardja (wartawan foto majalah *Penabur*), suasana seketika jadi berubah.

Jabang bayi telah lahir. *Harian Kompas* pertama tertanggal 28 Juni 1965 itu keesokan harinya mulai dipasarkan.

KOMPAS pertama terbit empat halaman. Berita utama di halaman satu ketika itu berjudul "KAA II Ditunda Empat Bulan". Sementara *Pojok Kompas* di kanan bawah -mulai memperkenalkan diri, "Mari ikat hati. Mulai hari ini, Dengan, Mang Ued!"

Di halaman pertama pojok kiri atas tertulis nama staf redaksi. Tertulis Pemimpin Redaksi, Drs. Jakob Oetama, Staf Redaksi, Drs. J. Adisubrata, Lie Hwat Nio SH, Marcel Beding, Th. Susilastuti, Tan Soei Sing, J. Lambangdjaja, Tan Tik Hong, Th. Poni Purba, Tinon Prabawa, Eduard Liem.

Melihat penampilan wajah surat kabar *Kompas* terbitan pertama, tidak seorangpun di antara para pemula surat kabar itu optimis korannya akan berusia panjang. Dibandingkan dengan surat kabar lain ketika itu, penampilan wajah *Kompas* kurang bersaing. Apalagi percetakan yang mencetak *Kompas* kurang menjanjikan perbaikan. Namun



demikian, kegigihan dan semangat para pemimpin dan pemula justru membuat *Kompas* tetap hidup dan berkembang.

Perintis *Kompas* adalah P. K. Ojong dan Jakob Oetama, keduanya - yang dua tahun sebelumnya merintis penerbitan Majalah *Intisari* - dibantu 15 wartawan muda yang masih hijau, memulai karya dengan kantor numpang, mesin tik pinjaman, dan sarana lain yang terbatas. Yang menjadi modal utama ketika itu hanyalah semangat, agar karya yang diciptakan melalui *Kompas* ini bisa baik dan juga bisa hidup.

*Kompas* edisi pertama memasang 11 berita luar negeri dan tujuh berita dalam negeri di halaman pertama. Sementara istilah *Tajuk Rencana* ketika itu masih belum ada, namun di halaman II ada *Lahirnya Kompas*, tajuknya surat kabar ini. Di halaman II pula terdapat antara lain lima berita luar negeri dan dua berita dalam negeri. Ditambah tiga artikel, satu di antaranya menyangkut luar negeri. Di halaman ini pula ada kolom liburan *Senyum Simpul*.

Halaman III ketika itu antara lain berisi tiga artikel, satu di antaranya mengenai luar negeri. Ada pula ulasan mengenai penyakit ayas dan *Di Kompas*. Sedangkan halaman IV antara lain berita dan artikel luar negeri (2) dan satu dalam negeri. Di halaman ini hanya tercatat dua berita olahraga, satu di antaranya mengenai "Persiapan Tim PSSI ke Pyongyang".

Iklan ketika itu pun masih kurang dari separuh halaman. Dari enam iklan, satu di antaranya dari

Redaksi *Kompas* tentang "Permintaan menjadi Langganan KOMPAS". Iklan yang paling besar dan bergambar hanya satu, yaitu obat batuk dan cacingan.

KANTOR Redaksi *Kompas* pertama masih numpang di kantor Redaksi Majalah *Intisari* yang menempati salah satu ruang di kantor Percetakan PT Kinta, Jalan Pintu Besar Selatan No. 86-88 Jakarta Kota. Karena percetakan jauh dari sini, maka redaksi malam juga numpang di Redaksi Majalah *Penabur*, di Jl. Kramat. Pelaksanaan keredaksian juga dilakukan di salah satu ruangan percetakan PN Eka Grafika.

Kedua perintis *Kompas* setiap saat terjun langsung ke bawah. Mereka berusaha agar dari hari ke hari mutu *Kompas* kian baik. Karena itu, setelah sebulan dicetak di Eka Grafika, harian ini kemudian dicetak di Percetakan Masa Merdeka di Jl. Sangaji Jakarta. Percetakan ini memang lebih baik. Sekalipun sistem *setting*-nya masih cetak timbul, namun percetakannya sendiri sudah menggunakan mesin rotasi. Karena itu, daya cetaknya lebih cepat. Dan memang semenjak itu oplah *Kompas* naik dari semula 4.800 eksemplar di masa Eka Grafika, melonjak jadi 8.003 eksemplar, hampir dua kali lipat.

Namun kejadian itu memang tak terhindarkan. Tanggal 1 Oktober malam, August Parengkuan dan Poms Purba tengah mendapat giliran tugas redaksi malam di Jalan Sangaji ketika mereka diberi tahu pihak percetakan bahwa *Kompas* beserta surat kabar lainnya tidak boleh terbit. Hanya Harian





Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha serta IKBM Antara dan Pemberitaan Angkatan Bersenjata (PAB) yang diperbolehkan.

Keduanya terperanjat, namun nunta kepada pihak percetakan agar tetap menyelesaikan *lay out* yang tengah disiapkan di malam menjelang dini hari itu.

Larangan untuk tidak naik cetak itu dikeluarkan Penguasa Pelaksana Perang Daerah (Pepelrada). Namun ketika itu, August Parengkuan dan Ponis Purba tetap berkeyakinan bahwa sebenarnya *Kompas* tidak perlu dilarang terbit. Alasannya, *Kompas* sudah mengesampingkan pemberontakan G 30 S/PKI, dan dalam *lay out* sudah disiapkan bahwa *Kompas* edisi 2 Oktober juga memuat pernyataan sikap dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana RE Martadinata. Namun nyatanya ketika itu *Kompas* termasuk yang dilarang naik cetak, sehingga kedua redaktur malam hanya minta *proofdrukt*-nya saja untuk disampaikan kepada pimpinan *Kompas*.

Keesokan harinya, 2 Oktober 1965, August Parengkuan datang lagi ke kantor *Kompas*. Mata masih mengantuk ketika sekitar pukul 07.00 pagi P.K. Ojong dan Jakob Oetama datang. August Parengkuan menyerahkan *proofdrukt* itu.

*Kompas* baru boleh terbit lagi tanggal 6 Oktober. Di masa itu, ada pula koran yang tidak boleh terbit seterusnya. Salah satu harian yang tidak boleh terbit itu semula dicetak di Percetakan PT Kinta, salah satu percetakan yang baik di Jakarta ketika

itu. Karena ada lowongan, maka ketika boleh terbit lagi 6 Oktober, *Kompas* dicetak di PT Kinta.

Observasi Ojong yang menyatakan produk akan lebih cantik bila ia dihasilkan oleh pabrik yang baik, terbukti. Namun *Kompas* tidak hanya lebih cantik, tapi juga meningkat oplahnya menjadi 23.268 lembar.

Tentu saja peningkatan oplah itu tidak melulu berkat makin baiknya percetakan, tapi karena keadaan saat itu memang memungkinkannya. Untuk beberapa saat penduduk Jakarta tidak tahu-menahu keadaan lingkungan kotanya yang cukup hingar-bingar, karena semua penerbitan pers ditutup karenanya, begitu penerbitan pers muncul kembali, kontan diserbui masyarakat yang ingin tahu. Maka, oplah pun melonjak.

MAKIN melonjaknya oplah tentu melonjakkan penghasilan. Namun selama koran tidak memiliki percetakannya sendiri, ia akan tetap tergantung dari orang lain. Percetakan sangat vital bagi kelangsungan hidup koran. *Kompas* pun menyadari hal ini, dan karenanya berkeinginan memiliki percetakan sendiri. Penghasilan yang makin tinggi pasti akan menyusut kalau sudah harus membayar ongkos cetak, misalnya.

Tahun 1966, P. Swantoro memperkuat barisan redaksi *Kompas*, dan sejak itu barisan redaksi makin diperbesar dengan banyaknya wartawan baru yang bergabung. Isi harian itu



makin bervanasi dan mantap. Kemantapan di bidang redaksi ini kemudian diimbangi dengan memantapkan segi manajemen.

Mulai tahun 1971, sirkulasi Kompas diteliti (audit) oleh Akuntan Publik Drs Utomo & Mulia. Akuntan ini pilihan tiga biro iklan terkemuka pada waktu itu. Dengan data audit ini, angka-angka sirkulasi yang diserahkan kepada biro iklan dan para pemasang iklan tiap tiga bulan sekali adalah angka yang sebenarnya. Dengan data itu pula tiap pemasang iklan akan mengetahui bahwa iklannya akan dibaca oleh sekian banyak pelanggan.

Untuk lebih memantapkan penyebaran data audit ini di luar negeri, sejak Desember 1978 Kompas masuk menjadi anggota *Audit Bureau of Circulations*, Sydney, Australia, suatu badan internasional yang dibentuk bersama oleh para penerbit, pemasang iklan, dan biro-biro iklan. Fungsi badan ini adalah mencatat dan menyiarkan angka-angka sirkulasi yang benar dan para anggotanya.

Sampai kini, Kompas merupakan satu-satunya surat kabar di Indonesia yang menyiarkan jumlah sirkulasinya kepada khalayak sesuai kenyataan.

Sirkulasi Kompas memang terus menanjak. Terutama setelah mulai

tahun 1972, surat kabar ini dicetak di Percetakan Gramedia yang merupakan percetakannya sendiri. Namun, di tengah terus melonjaknya oplah karena makin banyaknya pembaca yang memberikan kepercayaan kepada penyajian berita Kompas, pada tahun 1978 Kompas diminta menghentikan penerbitannya. Saat itu ada beberapa media lain yang mengalami nasib serupa.

Beberapa bulan setelah diizinkan terbit kembali, Kompas di bulan September 1978 muncul tujuh kali seminggu dengan mulai diterbitkannya Kompas edisi Minggu.

SEWAKTU lalu, sesuai dengan ketentuan perundangan pada waktu itu yang mengharuskan surat kabar berafiliasi ke salah satu organisasi politik, Kompas berafiliasi kepada Partai Katolik. Namun sejak semula, terutama para perintis surat kabar ini berpendapat, visi kemasyarakatan koran haruslah terbuka. Visi dan sikap itu selain sesuai dengan keyakinan pimpinan, juga cocok dengan fungsi pers di Indonesia, yakni ikut mengembangkan saling pengertian dalam masyarakat yang majemuk. Hal itu sesuai dengan paham Pancasila. \*\*\*

(dari Lembaran Brosur Kompas untuk Hari Pers Nasional 1989)



## VISI **KOMPAS**

MENJADI INSTITUSI YANG MEMBERIKAN PENCERAHAN BAGI PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA YANG DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT, SERTA MENJUNJUNG TINGGI ASAS DAN NILAI KEMANUSIAAN

## MISI **KOMPAS**

MENGANTISIPASI DAN MERESPON DINAMIKA MASYARAKAT SECARA PROFESIONAL, SEKALIGUS MEMBERI ARAH PERUBAHAN (TREND SETTER) DENGAN MENYEDIAKAN DAN MENYEBARLUASKAN INFORMASI YANG TERPERCAYA.

## RAISON D'TRE PERUSAHAAN (PT. Kompas Media Nusantara)

- ☑ Menjadi hati nurani rakyat
- ☑ Mencerdaskan bangsa
- ☑ Bertanggungjawab terhadap masyarakat  
(termasuk usaha mengurangi pengangguran)

### NILAI-NILAI DASAR

- ☑ Menghormati individu (manusia adalah asset utama)
- ☑ Profesionalisme dalam semua aspek usaha
- ☑ Kerjasama dan sinergi
- ☑ Integritas dan kejujuran